



BUPATI LUWU UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PETA JALAN KAKAO LESTARI TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa tanaman kakao merupakan komoditas unggulan dan kebanggaan Kabupaten Luwu Utara serta berkontribusi signifikan terhadap produksi sektor perkebunan dan ekonomi Daerah;
  - b. bahwa pengelolaan perkebunan kakao yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP in Cocoa*) dapat berkontribusi terhadap perbaikan kesehatan ekosistem dan jasa lingkungan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menjadi sumber bahan pangan lokal, meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan sumber kehidupan masyarakat;
  - c. bahwa untuk memberikan arahan kepada semua pihak dalam pengembangan dan pelestarian tanaman kakao di daerah dan sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I huruf I Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Sub Urusan Sarana Pertanian dengan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dan Sub Urusan Prasarana Pertanian dengan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pengembangan Prasarana Pertanian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Kakao Lestari Tahun 2024-2044;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2012 tentang Pengesahan *International Cocoa Agreement* 2010 (Persetujuan Kakao Internasional 2010) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Budidaya Kakao yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP in Cocoa*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 516);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 375);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN KAKAO  
LESTARI TAHUN 2024-2044.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kakao adalah tanaman kakao (*Theobromacacao*L.) yang bijinya diolah melalui proses fermentasi, dicuci atau tanpa dicuci, dikeringkan dan dibersihkan untuk menjadi berbagai produk turunan.
6. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
7. Peta Jalan Kakao Lestari Tahun 2024-2044 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang menjabarkan visi, strategi, intervensi, dan kegiatan pengelolaan komoditas kakao yang berkelanjutan di Kabupaten Luwu Utara yang disertai dengan analisis dampak, kerangka pendanaan pemetaan pemangku kepentingan dan lini masa yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yakni tahun 2024 sampai dengan tahun 2044.
8. Indikator kunci adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu intervensi atau kegiatan.
9. Kelompok Kerja Peta Jalan Kakao Lestari atau yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja merupakan kelembagaan yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan peta jalan kakao lestari serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.
10. Tim monitoring dan evaluasi merupakan bagian kelompok kerja peta jalan kakao lestari yang berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari.

11. Penyedia layanan merupakan bagian dari tim monitoring dan evaluasi yang berfungsi untuk mengelola alat bantu monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari.
12. Kontributor Teknis merupakan bagian dari tim monitoring dan evaluasi yang berfungsi untuk mengumpulkan, melakukan analisis, dan *input data* hasil monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari.
13. Tim verifikasi merupakan bagian dari tim monitoring dan evaluasi yang berfungsi untuk memeriksa dan memverifikasi data hasil monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari yang dihasilkan oleh kontributor teknis.

## Pasal 2

Peta Jalan Kakao Lestari Tahun 2024-2044 merupakan instrumen dokumen perencanaan komprehensif yang mengintegrasikan pengelolaan komoditas Kakao dengan berbagai tingkat perencanaan Daerah, meliputi rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, rencana strategis PD, maupun program lainnya terkait komoditas Kakao.

## Pasal 3

- (1) Peta jalan Kakao Lestari Tahun 2024-2044 memuat :
  - a. selayang pandang Kakao Luwu Utara;
  - b. pendekatan lanskap dalam penyusunan peta jalan;
  - c. isu strategis, visi, dan ruang lingkup;
  - d. strategi dan intervensi;
  - e. rencana kerja pelaksanaan, terdiri atas:
    1. kelembagaan dan tata kelola;
    2. rencana kegiatan;
    3. penjabaran indikator; dan
    4. monitoring dan evaluasi.
- (2) Uraian Peta Jalan Kakao Lestari Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Peta Jalan Kakao Lestari Tahun 2024-2044 menjadi pedoman bagi:

- a. PD terkait;
- b. kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang membudidayakan komoditas Kakao;
- c. perusahaan di sektor perkebunan Kakao;
- d. forum Kakao;
- e. asosiasi Kakao;
- f. koperasi;
- g. lembaga swadaya masyarakat; dan
- h. stakeholder terkait lainnya.

Pasal 5

Untuk mendukung pelaksanaan Peta Jalan Kakao Lestari Tahun 2024-2044 dibentuk Kelompok Kerja yang beranggotakan para pemangku kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Pendanaan Peta Jalan Kakao Lestari Tahun 2024-2044 bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 2 Desember 2024

BUPATI LUWU UTARA,

LINDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba  
pada tanggal 2 Desember 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,

BAHARUDDIN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024 NOMOR 19

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETA JALAN KAKAO LESTARI KABUPATEN LUWU UTARA**

**PETA JALAN KAKAO LESTARI  
KABUPATEN LUWU UTARA**

**1. Selang Pandang Kakao Luwu Utara**

**1.1 Potensi Komoditas Unggulan Kakao**

Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan perkebunan di Indonesia yang menempati urutan kelima produksi terbesar setelah kelapa sawit, karet, kopi, dan kelapa (BPS, 2019). Sebagai salah satu komoditas unggulan ekspor, produksi kakao juga menyumbang cukup signifikan terhadap kontribusi ekonomi pertanian<sup>1</sup>. Indonesia merupakan eksportir terbesar kakao ketiga di dunia setelah Ghana dan Pantai Gading. Namun selama tahun 2013 sampai 2017, produksi kakao di Indonesia menunjukkan penurunan baik dari luasan lahan maupun volume ekspor. Hal ini juga diakibatkan oleh tidak optimalnya pengelolaan kebun, tingginya serangan hama, dan penurunan produksi serta pendapatan petani kakao (Wijayanto, 2019). Sekitar 80 persen dari produk kakao Indonesia berasal dari tujuh provinsi, empat berlokasi di Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat) dan tiga di Sumatera (Sumatera Barat, Lampung, dan Aceh). Pengembangan kakao masih merupakan prioritas nasional karena keunggulan kompetitifnya seperti biaya yang rendah, kapasitas produksi tinggi, dan sistem pasar yang terbuka (Leksono, Mustafa, Gama, Afandhi, & Zairina, 2021).

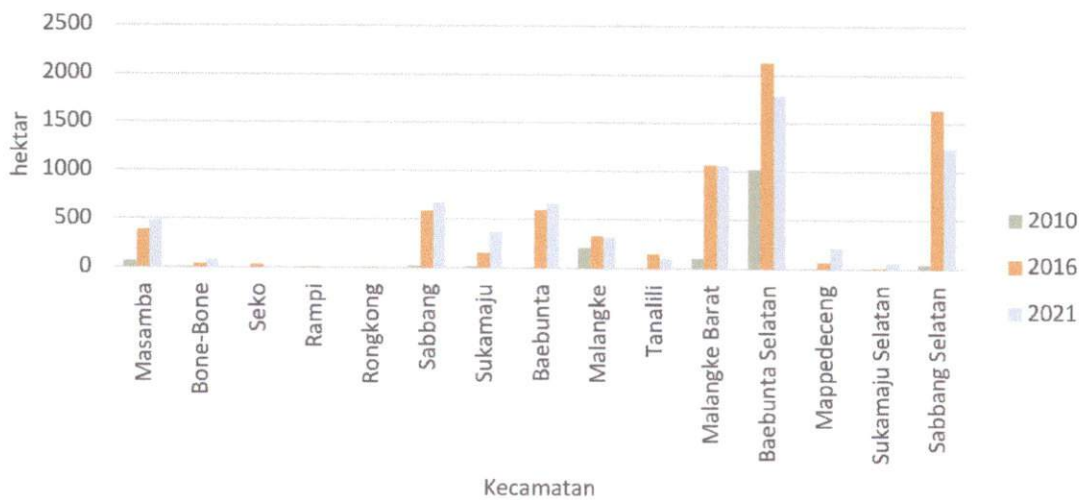
Luwu Utara dikenal sebagai salah satu penghasil kakao terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan<sup>2</sup>. Sebagai kabupaten terluas di Provinsi Sulawesi Selatan, sektor ekonomi berbasis lahan terutama perkebunan merupakan motor utama perekonomian wilayah. PDRB Kabupaten Luwu Utara ditopang dari sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 47,02 persen pada tahun 2020 (BPS, 2021). Hampir setengah dari PDRB pertanian didapatkan dari subsektor perkebunan, salah satunya adalah kakao. Kejayaan kakao di Luwu Utara mencapai puncaknya pada tahun 2011 saat dicanangkan sebagai daerah sentra kakao di Indonesia.

Pada tahun 2009, Kabupaten Luwu Utara memiliki sekitar 56.000 hektar kebun kakao namun saat ini berkurang sampai 40.814 hektar (BPS, 2021). Meskipun demikian, pengembangan kakao masih menjadi sumber penghidupan petani, data statistik perkebunan menunjukkan produksi kakao di Luwu Utara pada tahun 2020 mengalami peningkatan produksi sebesar 17 persen dari tahun sebelumnya. Kecamatan dengan kebun kakao paling luas antara lain Kecamatan Baebunta Selatan, Sabbang Selatan, dan Malangke Barat (Gambar 1.1). Kebun kakao di Luwu Utara merupakan kebun kakao rakyat yang dikelola langsung oleh petani. Permasalahan yang ditemui dari pengelolaan skala kecil (*smallholder*) antara lain serangan hama penyakit tanaman yang berkontribusi pada penurunan produktivitas dan kualitas biji kakao yang dihasilkan petani.

---

<sup>1</sup> Komoditas kakao (biji mentah dan hasil olahan) menyumbang devisa sebesar USD 1,1 Miliar pada tahun 2019.

<sup>2</sup> Produksi kakao di Provinsi Sulawesi Selatan terbesar di Kabupaten Luwu Utara yaitu 21,13 persen diikuti oleh Kabupaten Luwu sebesar 19,72 persen (BPS, 2019).

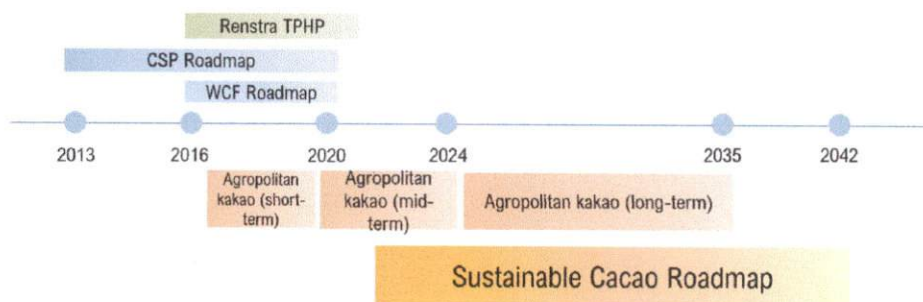


Gambar 1.1 Persebaran Luas Kebun Kakao berdasarkan Kecamatan Tahun 2010, 2016, dan 2021 (sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara)

Kabupaten Luwu Utara dikenal sebagai sentra kakao yang memiliki potensi benih kakao berkualitas. Klon unggul Luwu Utara seperti kakao masamba memiliki ukuran buah besar (Kementan, 2019). Namun, saat ini kondisi tanaman kakao di Luwu Utara sebagian mengalami penurunan kualitas produksi dan tanaman berumur tua. Penggunaan obat-obatan dan pupuk kima berlebihan juga masih dilakukan oleh petani kakao yang mengakibatkan gangguan keseimbangan unsur hara tanah (Fairuzia, Krisnamurthi, & Rifin, 2020).

Pada tahun 2020, Kabupaten Luwu Utara mengalami bencana banjir yang menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi. Kondisi ini ditenggarai akibat penurunan kualitas lingkungan yang mengakibatkan Sungai Masamba, Rongkong, dan Rada meluap. Ancaman bencana alam seperti banjir mungkin berulang kembali seiring dengan dampak perubahan iklim. Penghidupan masyarakat yang bergantung pada sektor berbasis lahan menjadi lebih rentan akibat intensitas bencana yang terjadi. Untuk itu, dibutuhkan pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan berketahanan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao melalui praktik pengelolaan yang berkelanjutan; **Kakao Lestari, Rakyat Sejahtera**. Inisiatif peningkatan keberlanjutan pengelolaan kakao sudah mulai dibangun mulai tahun 2013 (Gambar 1.2). Pemerintah mengupayakan integrasi antar unsur pemangku kepentingan (pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, dan media). Peta jalan kakao lestari bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan kakao berkelanjutan sebagai respon atas berbagai permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan kakao di Kabupaten Luwu Utara.



Gambar 1.2 Inisiatif pengelolaan kakao lestari di Kabupaten Luwu Utara

Penyusunan peta jalan merupakan upaya menjabarkan visi melalui langkah-langkah atau tahapan menuju pengelolaan kakao lestari di Kabupaten Luwu Utara. Dokumen peta jalan dapat menjadi alat komunikasi untuk mengartikulasikan pemikiran strategis dan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan kepentingan para pihak. Komitmen yang kuat dari para pihak merupakan awal dari pengelolaan kakao secara lestari. Upaya ini dilakukan dengan peningkatan produktivitas kakao. Tentunya dengan tetap menjaga dan memperbaiki hutan dan lahan yang didukung dengan kemitraan antara sektor swasta, petani, masyarakat, serta penggiat lingkungan. Selain itu, inisiatif ini juga melibatkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk jasa ekosistem pada skala global, nasional, dan lokal seperti pembayaran jasa lingkungan.

## 1.2 Kakao Sebagai Penyumbang Ekonomi Daerah

### *Profil Kakao di Kabupaten Luwu Utara*

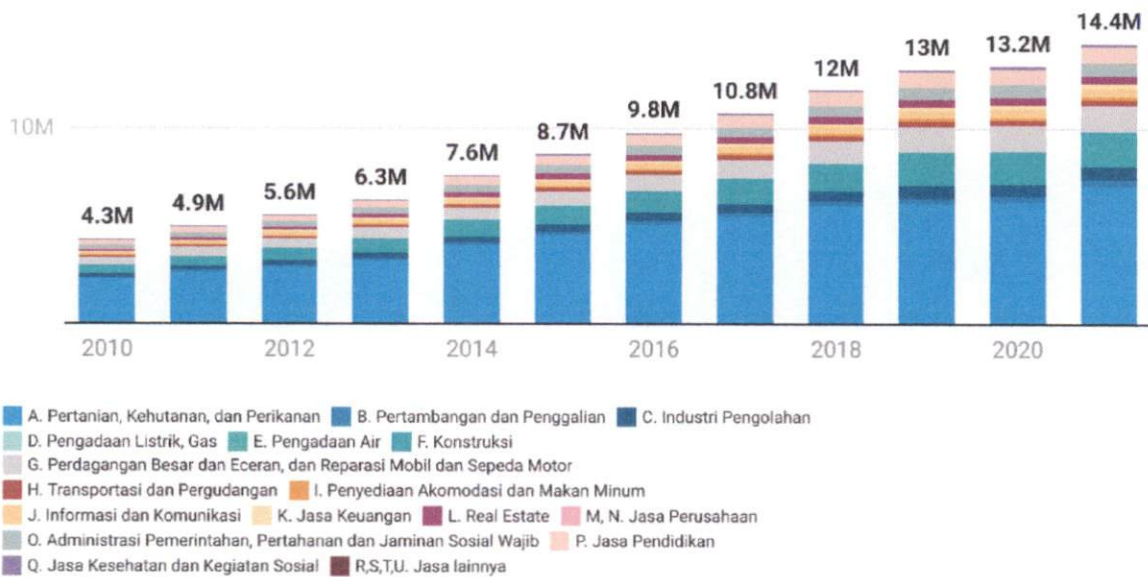
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, termasuk sektor perkebunan kakao. Kapasitas ekonomi Luwu Utara ditinjau dari beberapa indikator seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi/PDRB. PDRB menggambarkan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Luwu Utara dalam jangka waktu analisis. Melalui analisis PDRB ini, dapat dilihat produktivitas Luwu Utara sekaligus kontribusi sektor ekonomi/lapangan usaha terhadap ekonomi daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan maupun rata-rata nasional. Walaupun pada tahun 2019, terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi 7,11 persen. Di tahun 2020, terjadi kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, kontraksi ekonomi yang dialami Kabupaten Luwu Utara tidak sebesar kontraksi ekonomi provinsi maupun nasional. Selain kabupaten Luwu Utara, terdapat 11 kabupaten lain di Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2019 tercatat PDRB Kabupaten Luwu Utara sebesar 13,05 triliun rupiah (Gambar ). Di tahun 2021 telah terjadi peningkatan PDRB mencapai 14,4 triliun rupiah (BPS, 2021).

*Tabel 1.1 Indikator pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dan Nasional (sumber: RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2021-2026)*

Indikator pertumbuhan ekonomi	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	Persen	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
Prov. Sulawesi Selatan	Persen	7,42	7,21	7,07	6,92	-0,70
Kab. Luwu Utara	Persen	7,49	7,60	8,42	7,11	-0,59

Apabila ditinjau dari sektor ekonomi/lapangan usaha yang menyokong PDRB Kabupaten Luwu Utara, pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling tinggi terhadap struktur PDRB Kabupaten Luwu Utara (Gambar 1.3). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencakup kegiatan ekonomi/lapangan usaha yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, peternakan, pemanenan hasil hutan serta penangkapan dan budidaya ikan/biota air, juga mencakup jasa penunjang masing-masing kegiatan ekonomi tersebut (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, 2020).



Gambar 1.3 Struktur PDRB Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Berlaku (dalam juta rupiah) (sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara, 2021)

Pada tahun 2010 tercatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 53,81% terhadap PDRB Kabupaten Luwu Utara. Namun demikian, kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan secara konsisten mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2021, sektor ini berkontribusi 49 persen terhadap PDRB kabupaten (Gambar 1.4). Sebaliknya, terjadi peningkatan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Walaupun demikian, kontribusi sektor berbasis pertanian, kehutanan, dan perikanan masih merupakan penyumbang PDRB terbesar.



Gambar 1.4 Persentase kontribusi sektor berbasis lahan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Luwu Utara 2010-2021 (sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara, diolah)

Perkebunan kakao termasuk dalam kategori sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kakao merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Luwu Utara sehingga berkontribusi cukup besar terhadap sektor tersebut. Dalam RPJMD Kabupaten Luwu Utara tahun 2021-2026, pengembangan kakao termasuk sebagai satu dari tiga prioritas pembangunan yang akan mendapatkan pendanaan selama lima tahun periode perencanaan.

#### *Pengembangan kakao dalam konstelasi wilayah*

Kakao termasuk salah satu komoditas unggulan di Indonesia. Luas perkebunan kakao di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 1.497.467 ha. Sulawesi selatan merupakan salah satu Provinsi yang memiliki perkebunan kakao terluas kedua di Indonesia setelah Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Luwu Utara, merupakan salah satu sentra produksi kakao Indonesia. Namun demikian, setidaknya dalam lima tahun terakhir, terdapat penurunan luas perkebunan kakao. Rata-rata penurunan luas perkebunan kakao di Indonesia sekitar 3,11 persen per tahun. Penurunan luas perkebunan kakao di Sulawesi Selatan termasuk yang tertinggi dari kelima provinsi sentra produksi kakao di Indonesia. Penurunan luas perkebunan kakao di Sulawesi Selatan mencapai -7,77 persen per tahun.

*Tabel 1.2 Provinsi dengan Luas Area Perkebunan Kakao Terbesar di Indonesia tahun 2017-2021 (sumber: BPS, diolah) (ha)*

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan (%)
Sulawesi Tengah	285.788	283.626	279.298	279.218	272.079	-1,53
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>237.712</b>	<b>218.169</b>	<b>201.216</b>	<b>196.281</b>	<b>196.378</b>	<b>-7,77</b>
Sulawesi Barat	145.787	144.971	144.381	143.931	139.974	-0,41
Sulawesi Tenggara	254.957	254.811	246.296	246.049	239.043	-3,34
Sumatera Barat	132.557	121.721	114.746	84.969	79.034	-5,73
<b>Indonesia</b>	<b>1.658.421</b>	<b>1.611.014</b>	<b>1.560.944</b>	<b>1.528.383</b>	<b>1.497.467</b>	<b>-3,11</b>

Selain penurunan luas lahan kakao, produksi kakao di Sulawesi Selatan juga cenderung menurun setidaknya dalam lima tahun terakhir. Rata-rata produksi kakao di Sulawesi Selatan menurun 9,27 persen per tahun. Pada tahun 2021 tercatat produksi kakao di Sulawesi Selatan yaitu 118.148 ton. Secara agregat, produksi kakao Indonesia juga cenderung menurun. Kondisi ini memprihatinkan mengingat kakao merupakan salah satu komoditas yang banyak dibudidayakan oleh petani rakyat dan memiliki potensi pemasaran yang besar baik untuk pasar domestik maupun ekspor.

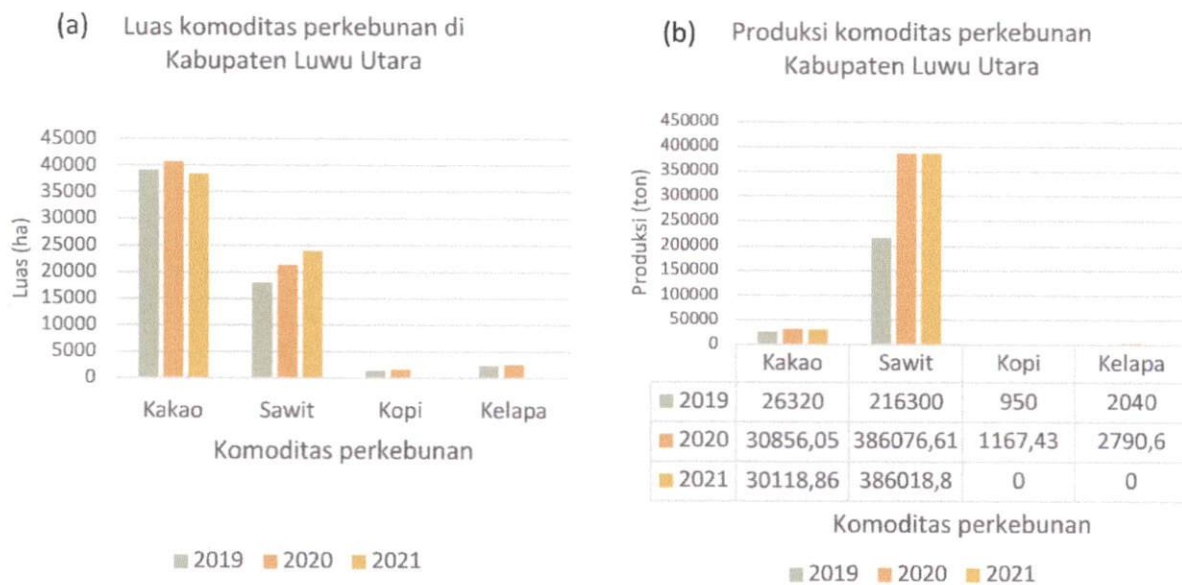
*Tabel 1.3 Provinsi dengan Produksi Kakao Terbesar di Indonesia tahun 2017-2021 (sumber: BPS, diolah) (ton)*

Provinsi	2017	2018	2019	2020	2021	Pertumbuhan (%)
Sulawesi Tengah	100.590	125.473	128.154	127.207	126.838	2,14
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>100.391</b>	<b>124.952</b>	<b>133.366</b>	<b>103.470</b>	<b>118.148</b>	<b>-9,27</b>
Sulawesi Barat	543.333	71.787	71.374	71.329	72.600	-0,58
Sulawesi Tenggara	92.831	123.088	115.023	114.919	113.974	-6,55
Sumatera Barat	46.052	58.980	53.072	43.293	42.380	-10,02
<b>Indonesia</b>	<b>590.684</b>	<b>767.280</b>	<b>734.796</b>	<b>713.378</b>	<b>728.046</b>	<b>-4,23</b>

Secara luasan, luas perkebunan kakao di Kabupaten Luwu Utara mencakup sekitar 19-21 persen luas area perkebunan kakao di Sulawesi Selatan (tahun 2019-2021). Dalam hal produksi, Kabupaten Luwu Utara menyumbang sekitar 30 persen terhadap produksi kakao Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena

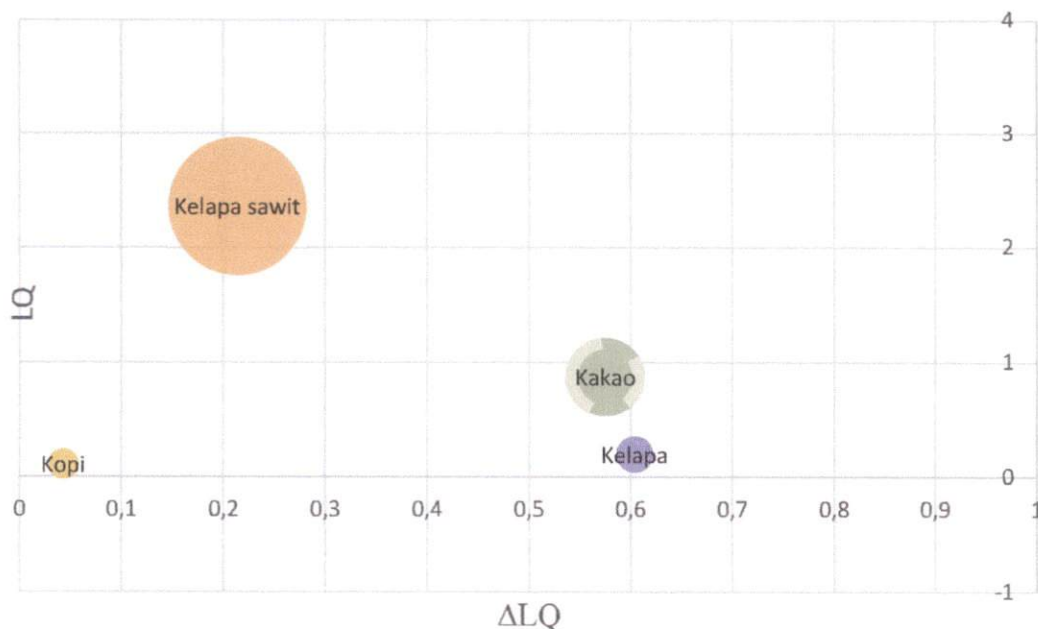
itu, perkebunan kakao di Kabupaten Luwu Utara memiliki nilai yang cukup strategis bagi perkembangan perekonomian kabupaten maupun provinsi, terutama dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Apabila ditinjau dari komoditas perkebunan lain di Luwu Utara, kakao memiliki luas area terbesar dibandingkan komoditas unggulan lain seperti sawit, kopi, maupun kelapa. Namun sayangnya, dalam tiga tahun terakhir, produksi kakao masih relatif rendah dibanding komoditas perkebunan lain, terutama sawit. Rata-rata produktivitas komoditas kakao di Kabupaten Luwu Utara dalam tiga tahun terakhir mencapai 0,73 ton/ha. Walaupun demikian, produktivitas rata-rata kakao di Luwu Utara masih lebih tinggi dibanding rata-rata produktivitas kakao di Sulawesi Selatan yaitu 0,59 ton/ha. Produktivitas yang rendah disebabkan oleh banyaknya tanaman berumur tua dan penggunaan lahan yang tidak efektif. Banyak kebun kakao masyarakat yang pelan-pelan ditinggalkan atau dialihfungsikan karena harga yang relatif rendah dibandingkan satu dekade yang lalu.



Gambar 1.5 Luas Area (ha) (a) dan Produksi (ton) (b) Komoditas Perkebunan Utama di Kabupaten Luwu Utara tahun 2019-2021 (sumber: Kabupaten Luwu Utara dalam Angka 2020, 2021, 2022, diolah)

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan di Kabupaten Luwu Utara relatif terhadap Provinsi Sulawesi Selatan (Gambar 1.6). Analisis ini dilakukan berdasarkan besaran produksi dalam ton dari tahun 2016-2021. Terdapat dua komoditas yang merupakan sektor basis di Luwu Utara yaitu kelapa sawit dan kakao. Meskipun LQ kelapa sawit menunjukkan nilai paling besar, namun DLQ atau laju pertumbuhan produksi kakao menunjukkan nilai yang lebih besar dibandingkan kelapa sawit.



Gambar 1.6 Nilai LQ komoditas unggulan Luwu Utara dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan (2016-2021)  
(sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara, diolah)

Apabila dilihat sebaran luas area dan produksi kakao per kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sabbang memiliki luas area kakao terbesar mencapai 7.590,75 pada tahun 2021 (Tabel 1.4), disusul oleh Kecamatan Sabbang Selatan dan Malangke. Bila dilihat dari produksi kakao, Kecamatan Malangke memiliki tingkat produksi tertinggi pada tahun 2021. Sebagian kecamatan mengalami penurunan luas area kakao dalam beberapa tahun terakhir seperti Kecamatan Sabbang Selatan, Baebunta, Baebunta Selatan, Malangke Barat, Sukamaju, Sukamaju Selatan, Bone-bone, dan Rongkong. Adapun kecamatan yang mengalami peningkatan luas dalam 2 tahun terakhir yaitu Seko, Rampi, Mappedeceng, dan Malangke. Keempat kecamatan ini juga mengalami peningkatan produksi kakao. Penurunan produksi kakao yang signifikan dalam 2 tahun terakhir terjadi di Kecamatan Baebunta Selatan, Sukamaju, Sukamaju Selatan, dan Bone-bone.

Tabel 1.4 Luas Area dan Produksi Perkebunan Kakao di Luwu Utara berdasarkan Kecamatan Tahun 2019-2021 (sumber: Kabupaten Luwu Utara dalam Angka 2020, 2021, 2022, diolah)

Kecamatan	2019		2020		2021	
	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)	Luas (ha)	Produksi (ton)
Sabbang	6.620	3.580	7.467,99	4.885,71	7.590,75	4.885,71
Sabbang Selatan	5.130	2.990	5.849,6	4.437,32	5.519,6	4.401,32
Baebunta	5.360	4.640	5.476,9	4.879,01	4.334,6	4.875,46
Baebunta Selatan	3.900	3.020	4.697,56	4.028,78	3.863,39	3.232,74
Malangke	5.420	5.180	2.411,51	1.606,07	5.321,95	5.158,13
Malangke Barat	1.500	680	1.504,5	792,04	1.480,5	792,04
Sukamaju	1.460	650	5.208	5.090,63	1.086,5	667,14
Sukamaju Selatan	670	340	3276	2.497,81	756	345,5
Bone-bone	1.010	640	1.186,25	705,14	777,25	523,73
Tanalili	1.090	430	757	345,5	822,25	441,01
Masamba	2.860	1.650	960,75	441,01	2.270,36	1.661,62
Mappedeceng	3.080	1.970	1.005,5	656,21	3.247,72	2.456,01
Rampi	270	80	181,5	46,92	314	87,1
Rongkong	180	40	575	356,8	333	155,54
Seko	670	430	256	871	717,25	435,81
<b>Luwu Utara</b>	<b>39.220</b>	<b>26.320</b>	<b>40.814,06</b>	<b>30.856,05</b>	<b>38.435,12</b>	<b>30.118.86</b>

## 2. Pendekatan Lanskap dalam Penyusunan Peta Jalan

### 2.1 Prinsip dan Kerangka Kerja

Penyusunan peta jalan menggunakan tiga prinsip utama yaitu inklusif, integratif, dan *informed*. Prinsip inklusif diterapkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam menyampaikan aspirasi mengenai pengelolaan kakao yang lestari. Para pihak terlibat dalam proses negosiasi komponen rencana yang kemudian disepakati bersama. Proses perencanaan dilakukan secara integratif artinya mempertimbangan berbagai rencana yang sudah ada baik rencana pembangunan, tata ruang, maupun sektoral untuk menghindari proses yang *silo* (sektoral). Terakhir, prinsip informed atau berbasis informasi yaitu melakukan analisis berdasarkan data yang sah. Kemudian dilakukan analisis proyeksi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan serta pemodelan skenario. Penyusunan skenario yang berbasis keruangan (spasial) akan membantu pemangku kepentingan memvisualisasikan risiko dan peluang di masa depan ketika mengambil suatu kebijakan tertentu.



Gambar 2.1 Prinsip penyusunan peta jalan

Pendekatan yang dilakukan dalam proses penyusunan peta jalan adalah pendekatan bentang lahan. Pendekatan ini berupaya memahami hubungan yang tercipta dari interaksi antara manusia, pertanian, kehutanan, perikanan, sistem penghidupan non-pertanian, keanekaragaman hayati, dan infrastruktur untuk menciptakan skema pengelolaan penggunaan lahan untuk mencapai tujuan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan berdasarkan *shared value* dan *co-benefits*.

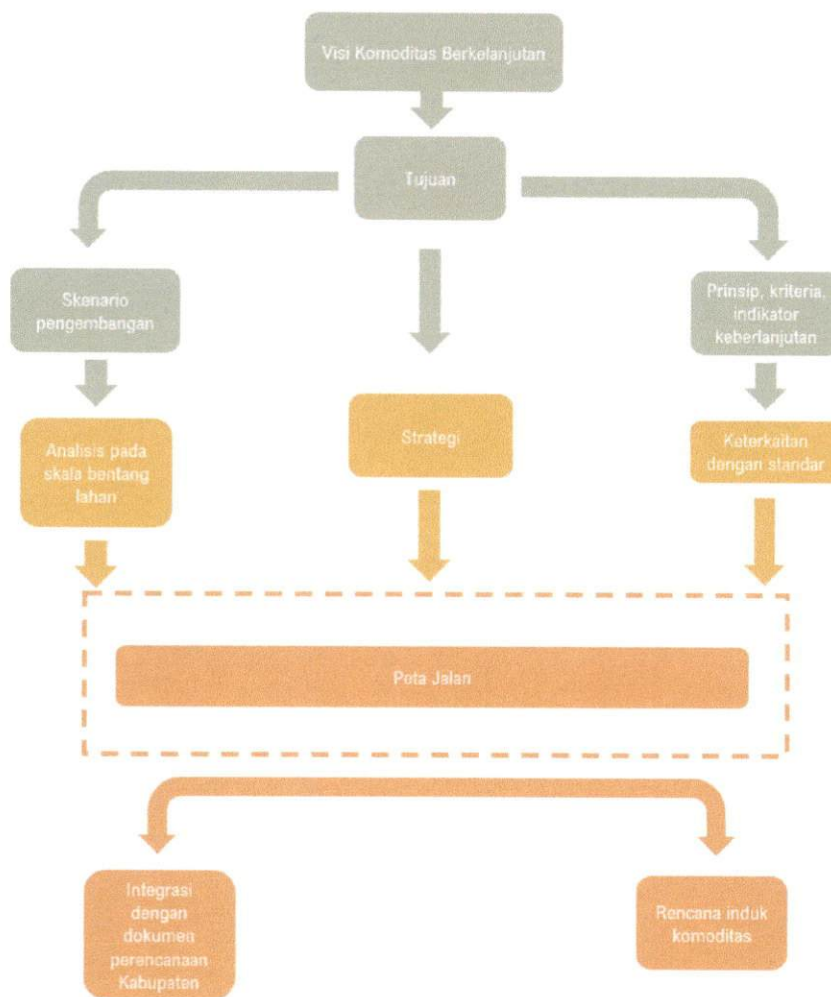
### 2.2 Sasaran

Sasaran peta jalan kakao lestari, yakni:

- sektor kakao dan turunannya sebagai salah satu sektor berbasis lahan dan sumber daya alam terbarukan (*renewable resource*);
- akses terhadap sumber daya dan pendapatan petani kakao sebagai salah satu sumber kesejahteraan;
- kemampuan masyarakat dalam pengelolaan berbagai aset penghidupan berbasis pengelolaan kakao sehingga memiliki tingkat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang tangguh;
- ekosistem dan bentang lahan kakao dengan berbagai fungsi mitigasi dan adaptasi perubahan, serta biodiversitas; dan
- kontribusi ekonomi dari sektor kakao terhadap pendapatan ekonomi daerah.

### 2.3 Alur Kerja Penyusunan Peta Jalan

Penyusunan peta jalan dimulai dari proses diskusi dan bertukar pendapat antar pihak untuk menentukan visi serta penguatan komitmen (alur dapat dilihat pada Gambar 2.2). Bersamaan dengan diskusi awal, dilakukan kajian pendahuluan (*desk study*). Dari hasil kajian didapatkan preseden prinsip, kriteria, dan indikator pengelolaan komoditas berkelanjutan, terutama kakao yang sudah ada. Kemudian dilakukan pertemuan ahli untuk menajamkan prinsip, kriteria, dan indikator pengelolaan kakao lestari. Hasil dari pertemuan ini kemudian didiskusikan bersama dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Luwu Utara untuk memberikan konteks dan isu lokal. Penyusunan peta jalan dimulai dari proses diskusi dan bertukar pendapat antar pihak untuk menentukan visi serta penguatan komitmen.



Gambar 2.2 Alur kerja penyusunan peta jalan kakao lestari

Proses analisis dilakukan dengan pengolahan data sosial, ekonomi, dan biofisik yang telah dikumpulkan. Dengan menggunakan pendekatan sistem, sumber daya lahan menjadi pusat analisis karena perannya yang sentral untuk mengembangkan komoditas strategis. Analisis dinamika penggunaan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan skenario kebijakan, alokasi lahan, ekspansi pertanian, perubahan harga komoditas, perubahan produktivitas, dan hilirisasi kemudian disimulasikan dalam skenario pengembangan komoditas. Pemangku kepentingan mendiskusikan kembali strategi, pilihan skenario terhadap bentang lahan, serta keterkaitan dengan standar yang menjadi bahan penyusun utama peta jalan. Peta jalan yang sudah tersusun diharapkan dapat

terintegrasi dengan dokumen perencanaan kabupaten dan menjadi rujukan bagi penyusunan rencana induk komoditas kakao.



Gambar 2.3 Tahapan penyusunan peta jalan kakao lestari di Kabupaten Luwu Utara

## 2.4 Keterhubungan Peta Jalan Kakao Lestari dengan Standar Pengelolaan Kakao di tingkat Nasional dan Global

Peta jalan kakao lestari memiliki relevansi dengan berbagai standar pengelolaan kakao yang berlaku baik di tingkat nasional maupun global. Indikator yang digunakan dalam penilaian capaian strategi dan intervensi peta jalan kakao lestari dapat dipetakan dalam berbagai standar keberlanjutan yang umum digunakan di Indonesia. Setidaknya terdapat empat standar atau perangkat penilaian keberlanjutan tingkat yurisdiksi yang ditelaah dalam studi ini.

Pemetaan indikator peta jalan kakao lestari sudah dilakukan terhadap indikator keberlanjutan yang digunakan dalam empat standar atau perangkat tersebut. Pemetaan ini dilakukan untuk membantu para pemangku kepentingan melihat relevansi antara peta jalan kakao lestari dengan standar keberlanjutan yang umum digunakan. Melalui pemenuhan target peta jalan kakao lestari, Kabupaten Luwu Utara turut memenuhi standar keberlanjutan lainnya, terutama pada indikator-indikator yang bersesuaian.

### 1. Terpercaya

Terpercaya adalah platform nasional untuk mengukur dan memverifikasi tingkat keberlanjutan pada skala yurisdiksi (kabupaten). Perangkat ini bertujuan untuk mengukur kinerja yurisdiksi kawasan produsen komoditas pertanian secara transparan. Terpercaya merupakan perangkat yang dibangun oleh Bappenas dengan komite penasihat yang terdiri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, perwakilan kabupaten, Lingkar Temu Kabupaten Lestari, AMAN, SPKS, RSPO, KEHATI, WRI, dan IDH. Pengukuran keberlanjutan yurisdiksi dalam Terpercaya sangat relevan dengan komoditas kelapa sawit. Perangkat penilaian Terpercaya terdiri dari 4 aspek dengan 22 indikator (Tabel 2.1). Indikator peta jalan kakao lestari bersinergi dengan setidaknya 55 persen indikator Terpercaya, terutama pada aspek ekonomi dan lingkungan.

Tabel 2.1 Aspek dan indikator Terpercaya

Aspek/Prinsip/Tujuan	No	Indikator Terpercaya	Relevan dengan indikator pada Intervensi:
Lingkungan hidup Aspek lingkungan menekankan pada perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati serta jasa ekosistem seperti perlindungan tanah dan pengaturan air, serta peningkatan kesejahteraan daerah melalui pengurangan kebakaran dan kabut asap serta peningkatan kualitas air.	1.	Perlindungan hutan permanen	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	2.	Perlindungan kawasan yang penting untuk layanan ekologi	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	3.	Pencegahan kebakaran	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	4.	Perlindungan lahan gambut	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	5.	Mitigasi perubahan iklim	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan

Aspek/Prinsip/Tujuan	No	Indikator Terpercaya	Relevan dengan indikator pada Intervensi:
			kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	6.	Hutan produksi dikelola secara berkelanjutan	-
	7.	Pengendalian polusi air dan udara	Intervensi 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan dan Intervensi 5.2 Pembayaran Jasa Lingkungan
<b>Sosial</b> Aspek sosial mencakup perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak adat, dan perlindungan ( <i>safeguard</i> ) yang memastikan legalitas produksi dan keadilan sosial. Selain itu, aspek sosial juga meninjau penguasaan lahan, partisipasi formal petani kecil dalam ekonomi, dan peningkatan hak-hak pekerja.	8.	Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan	-
	9.	Pengakuan hak adat	-
	10.	Resolusi konflik	-
	11.	Bagian untuk petani kecil	Intervensi 2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan dan Intervensi 2.2 Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao
	12.	Registrasi petani kecil	Intervensi 2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan dan Intervensi
<b>Ekonomi</b> Aspek ekonomi menilai manfaat bagi masyarakat pedesaan khususnya petani kecil, dari partisipasi dalam produksi komoditas, dan dari mempertahankan akses dan harga pasar.	13.	Produktivitas petani kecil	Intervensi 3.1 Peningkatan kapasitas budidaya kakao dengan GAP
	14.	Organisasi petani kecil	Intervensi 2.4 Pengembangan kelembagaan keuangan petani; 2.5 Korporasi petani kakao; 2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan
	15.	Dukungan untuk petani kecil	Intervensi 2.3 Penyuluhan kakao tepat sasaran; 2.6 Bantuan peralatan pertanian; 2.8 pelatihan dan penyediaan sarana K3; 3.2 Akses terhadap sarana pendukung
	16.	Industri minyak sawit yang bertanggung jawab (termasuk ISPO dan RSPO)	Tidak relevan
	17.	Lapangan pekerjaan pedesaan	Intervensi 3.3 Diversifikasi produk kakao; 3.4 Agribisnis kakao; 4.1 Pengembangan rantai pasok yang efektif dan integratif
<b>Tata Kelola</b> Aspek tata kelola memastikan tata kelola rantai pasok komoditas transparan, berkelanjutan, dan inklusif.	18.	Proporsi anggaran kabupaten dialokasikan untuk keberlanjutan	Intervensi 2.10 Kebijakan kakao lestari
	19.	Akses informasi publik	-
	20.	Partisipasi multi pemangku kepentingan dalam perencanaan	Intervensi 2.10 Kebijakan kakao lestari

Aspek/Prinsip/Tujuan	No	Indikator Terpercaya	Relevan dengan indikator pada Intervensi:
	21.	Mekanisme pengaduan	-
	22.	Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten; 1.3 Perluasan terbatas kebun kakao; 1.4 Alokasi lahan agroforestri kakao

## 2. LandScale

LandScale (<https://www.landscape.org/>) adalah platform skala global untuk melakukan penilaian keberlanjutan terhadap pengelolaan komoditas dalam suatu yurisdiksi. Tujuan dari LandScale adalah memudahkan pengguna untuk menilai risiko dan secara adaptif berinvestasi, memantau, dan mengukur dampak keberlanjutan di tingkat lanskap. LandScale dibentuk melalui kerja sama Verra, Rainforest Alliance, dan Conservation International. Perangkat penilaian LandScale terdiri dari 8 aspek dan 36 indikator. Indikator peta jalan kakao lestari bersinergi dengan setidaknya 79 persen indikator kunci LandScale, terutama aspek lingkungan, tata kelola, dan produksi. Berbeda dengan Terpercaya yang lebih menekankan pada komoditas sawit, perangkat LandScale relevan untuk semua komoditas pertanian dan perkebunan.

Tabel 2.2 Aspek dan indikator LandScale

Aspek/Prinsip/Tujuan	No.	Indikator LandScale	Indikator Peta Jalan
Perlindungan dan Restorasi Ekosistem Alami	1.	Perlindungan ekosistem alami	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten; 1.3 Perluasan terbatas kebun kakao;
	2.	Konversi ekosistem alami	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten; 1.3 Perluasan terbatas kebun kakao;
	3.	Degradasi ekosistem	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten; 1.3 Perluasan terbatas kebun kakao;
	4.	Restorasi ekosistem	1.3 Perluasan terbatas kebun kakao; 1.4 Alokasi lahan agroforestri kakao
	5.	Konektivitas ekosistem	-
Perlindungan dan Restorasi Keanekaragaman Hayati	6.	Ancaman terhadap spesies	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten; 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan; 5.2 Pembayaran Jasa Lingkungan
	7.	Konversi habitat biodiversitas	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan

Aspek/Prinsip/Tujuan	No.	Indikator LandScale	Indikator Peta Jalan
			kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	8.	Degradasi habitat biodiversitas	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	9.	Restorasi habitat biodiversitas	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten; 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan; 5.2 Pembayaran Jasa Lingkungan
	10.	Perlindungan habitat biodiversitas	Intervensi 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan; 5.2 Pembayaran Jasa Lingkungan;
Mempertahankan dan meningkatkan jasa ekosistem	11.	Kuantitas air	Intervensi 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan; 5.2 Pembayaran Jasa Lingkungan;
	12.	Kualitas air	Intervensi 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan; 5.2 Pembayaran Jasa Lingkungan;
	13.	Emisi dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lain	Intervensi 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan; 5.2 Pembayaran Jasa Lingkungan;
	14.	Kesehatan tanah	-
	15.	Jasa ekosistem lain	Intervensi 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan; 5.2 Pembayaran Jasa Lingkungan;
Peningkatan standar penghidpan masyarakat rentan	16.	Pendapatan rumah tangga dan aset	Seluruh intervensi pada Strategi 2
	17.	Kesehatan dan nutrisi	-
	18.	Edukasi	-
	19.	Air dan sanitasi	-
	20.	Infrastruktur dasar	-
	21.	Kerentanan	-
Penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia	22.	Pekerja anak	Intervensi 2.9 Sistem pencegahan dan pengawasan pekerja anak
	23.	Kerja paksa	-
	24.	Hak perempuan	Intervensi 2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan dalam usaha tani kakao
	25.	Hak asasi lainnya	-
Perlindungan hak atas lahan dan sumber daya serta pengurangan konflik	26.	Tata kelola lahan	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	27.	Konflik lahan	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan

Aspek/Prinsip/Tujuan	No.	Indikator LandScale	Indikator Peta Jalan
			kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	28.	Tata kelola sumber daya alam	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
Transparansi, partisipasi, inklusi, dan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan pengelolaan lahan	29.	Adopsi dan penegakan rencana tata gunakan	Intervensi 2.10 kebijakan kakao lestari yang mendukung modal penghidupan petani
	30.	Koordinasi perangkat daerah dalam perencanaan kebijakan dan pengelolaan penggunaan lahan	Intervensi 2.10 kebijakan kakao lestari yang mendukung modal penghidupan petani
	31.	Partisipasi pemangku kepentingan secara inklusif dalam perencanaan penggunaan lahan	Intervensi 2.10 kebijakan kakao lestari yang mendukung modal penghidupan petani
	32.	Korupsi dan pelanggaran dalam pemanfaatan lahan	-
Pertanian, agroforestri, dan kehutanan ayng beregenerasi	33.	Produktivitas pertanian, agroforestri, dan kehutanan	Intervensi 3.1 Peningkatan kapasitas budidaya kakao dengan GAP
	34.	Efisiensi penggunaan input pertanian	Intervensi 3.1 Peningkatan kapasitas budidaya kakao dengan GAP
	35.	Adopsi praktik pengelolaan lahan berkelanjutan	Intervensi 3.1 Peningkatan kapasitas budidaya kakao dengan GAP
	36.	Adopsi praktik pengelolaan limbah berkelanjutan	-

### 3. SourceUp

SourceUp (<https://sourceup.org/>) adalah platform skala global yang menilai keberlanjutan dari rantai nilai komoditas. SourceUp dibangun atas inisiasi IDH. SourceUp berfungsi sebagai penghubung antara suatu area produksi (*compact area*) dengan pembeli. Melalui perangkat ini kelompok produsen tertentu dapat mendaftarkan area mereka untuk dinilai keberlanjutannya menggunakan perangkat penilaian SourceUp. Perangkat ini akan merekomendasikan area yang punya tingkat keberlanjutan tinggi kepada pembeli (*buyer*). Melalui aplikasi ini pembeli juga dapat memperlihatkan secara transparan *sourcing area* dan bentuk-bentuk kegiatan lingkungan maupun sosial yang dilakukan. Perangkat penilaian SourceUp terdiri dari 4 aspek dan 9 indikator kunci. Indikator peta jalan kakao lestari bersinergi dengan setidaknya 49 persen indikator kunci SourceUp.

Tabel 2.3 Aspek dan indikator SourceUp

Aspek/Prinsip/Tujuan	No.	Indikator SourceUp	Indikator Peta Jalan
Hutan dan ekosistem alami	1.	Konversi ekosistem alami menjadi penggunaan lahan lain	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	2.	Proporsi area pertanian yang mengadopsi Praktik Pertanian yang Baik termasuk memiliki sertifikasi komoditas	Intervensi 3.1 Peningkatan kapasitas budidaya kakao dengan GAP; 4.4 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan
Penghidupan	3.	Proporsi anak (usia 4-15 tahun) yang tidak sekolah dan bekerja	Intervensi 2.9 Sistem pencegahan dan pengawasan pekerja anak
	4.	Pendapatan tahunan rumah tangga petani	Seluruh intervensi pada Strategi 2
Sumber daya manusia	5.	Rata-rata penghasilan pekerja pertanian per jam/minggu/bulan	Seluruh intervensi pada Strategi 2
	6.	Jumlah atau persentase pekerja pertanian yang tergabung dalam kelompok/organisasi	Intervensi 2.4 Pengembangan kelembagaan keuangan petani; 2.5 Korporasi petani kakao; 2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan
Tata kelola lahan	7.	Proporsi anggota masyarakat yang memiliki hak atas lahan yang jelas disertai kepemilikan dokumen legal	Intervensi 2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan
	8.	Jumlah konflik lahan dan sumber daya yang tidak terselesaikan	-
	9.	Persentase lanskap dengan kepemilikan lahan yang jelas dan dipublikasikan secara transparan	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten; 2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan

#### 4. KSD (Kerangka Daya Saing Daerah)

Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL) bersama dengan kabupaten anggota dan jejaring mitra menyusun Kerangka Daya Saing Daerah (KSD) (<https://www.kabupatenlestari.org/>). KSD merupakan sebuah rangkuman dari kebijakan nasional dan kerangka berbasis pasar untuk peningkatan produktivitas komoditas lestari yang diselaraskan dengan kebijakan di daerah. Tujuan pembentukan kerangka ini adalah untuk memudahkan daerah (kabupaten) dalam menunjukkan klaim kredibilitas pembangunan berkelanjutan yang dapat diterima secara komprehensif oleh konsensus global melalui mekanisme yang sudah ada. KSD terdiri dari 5 aspek dan 18 indikator. Indikator peta jalan kakao lestari bersinergi

dengan setidaknya 50 persen indikator KSDS, terutama terkait ketangguhan ekonomi, pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, serta insentif.

Tabel 2.4 Aspek dan indikator KSDS

Aspek/Prinsip/Tujuan	No.	Indikator KSDS	Indikator Peta jalan
Perencanaan dan penetapan tujuan	1.	Rencana pembangunan daerah yang mendukung TPB dan penurunan emisi GRK	Intervensi 2.10 kebijakan kakao lestari yang mendukung modal penghidupan petani
	2.	Rencana aksi daerah yang mendukung pemenuhan TPB dan penurunan emisi GRK	Intervensi 2.10 kebijakan kakao lestari yang mendukung modal penghidupan petani
	3.	Rencana tata ruang wilayah yang mendukung TPB	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	4.	Ketersediaan ruang keterlibatan publik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	-
	5.	Keterbukaan informasi publik dan mekanisme pengaduan	-
Ketangguhan ekonomi	6.	Pertumbuhan ekonomi makro yang sejalan dengan TPB	Semua intervensi dalam Strategi 2 dan 3
	7.	Perbaikan kondisi investasi dan perizinan yang mendukung TPB	-
	8.	Peningkatan pendapatan daerah dan efisiensi anggaran untuk mendukung TPB	-
	9.	Pengelolaan hutan dan pemanfaatan ruang yang mendukung TPB	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten; 2.2 Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao
	10.	Rantai pasok industri komoditas strategis kabupaten yang mendukung TPB	Intervensi 4.1 Pengembangan rantai pasok yang efektif dan integratif
	11.	Peran aktif petani/pekebun dalam mendukung pengembangan rantai pasok komoditas strategi kabupaten	Intervensi 2.4 Pengembangan kelembagaan keuangan petani; 2.5 Korporasi petani kakao; 2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan

Aspek/Prinsip/Tujuan	No.	Indikator KDSD	Indikator Peta jalan
Ketangguhan sosial	12.	Penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	-
	13.	Pemenuhan hak masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat atas tanah	-
	14.	Mekanisme penanganan konflik lahan dan SDA	-
Ketangguhan lingkungan dan SDA	15.	Tata kelola hutan dan lahan	Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten; 1.3 Perluasan terbatas kebun kakao; 1.4 Alokasi agroforestri kakao
	16.	Pelibatan aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan	Intervensi 2.4 Pengembangan kelembagaan keuangan petani; 2.5 Korporasi petani kakao; 2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan
	17.	Peningkatan penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	-
Insentif	18.	Ketersediaan mekanisme insentif untuk upaya masyarakat yang mendukung TPB	Intervensi 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan; 5.2 Pembayaran Jasa Lingkungan; 5.5 Penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

### 3. Isu Strategis, Visi, dan Ruang Lingkup

#### 3.1 Isu Strategis Pengelolaan Kakao Lestari di Kabupaten Luwu Utara

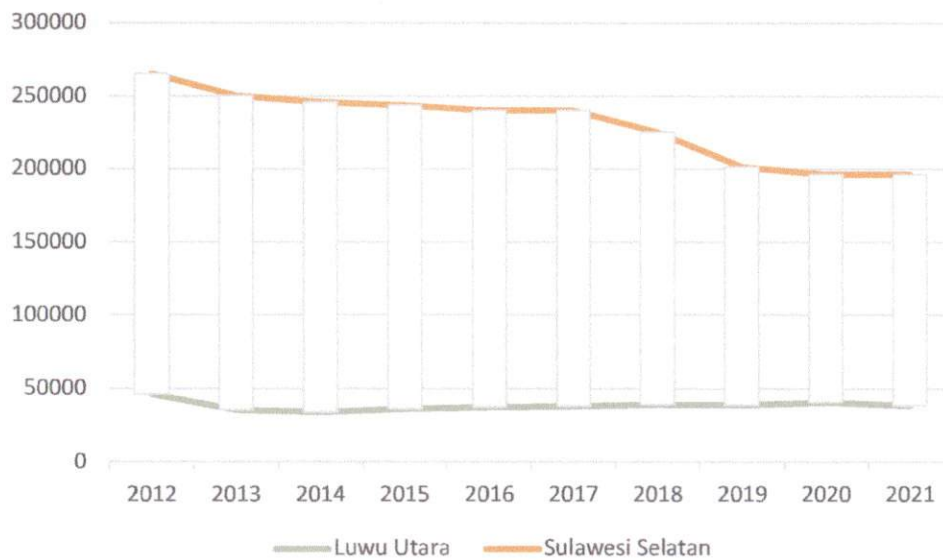
Kabupaten Luwu Utara memiliki modal yang besar dalam mengembangkan komoditas kakao secara berkelanjutan, dengan mempertimbangkan isu strategis antara lain: (i) penataan dan alokasi lahan untuk pengembangan komoditas kakao sesuai dengan kesesuaian lahan; (ii) kebun kakao merupakan kebun rakyat yang membutuhkan peningkatan keahlian petani dalam praktik pertanian yang baik dalam rangka perbaikan produktivitas kakao; (iii) perbaikan pasar dan rantai nilai yang efisien dan berkeadilan bagi petani.

#### Lahan

##### *Interpretasi Tutupan Lahan*

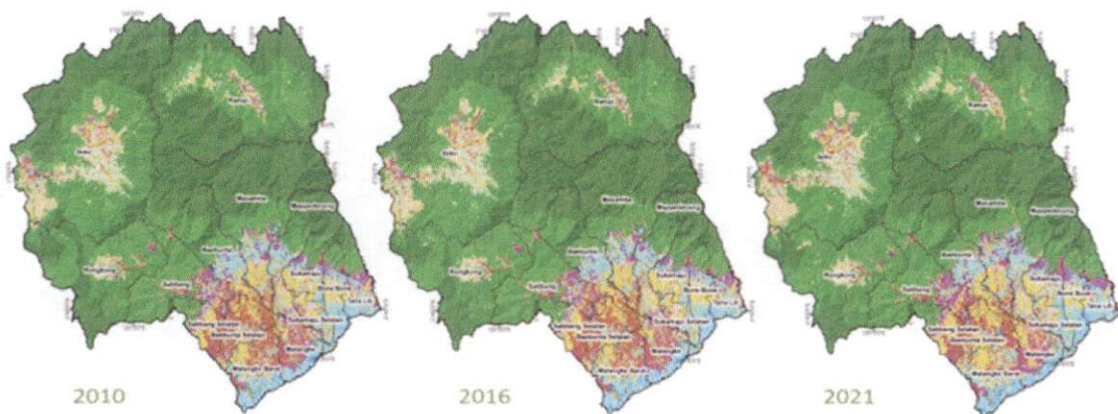
Luas lahan kakao di Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan dari 46.185 ha pada tahun 2012 sampai di angka 38.435 ha pada tahun 2021 (BPS, 2021). Dapat dilihat pada Gambar bahwa kecenderungan penurunan ini cukup signifikan terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, luas kebun

kakao di Luwu Utara meskipun menurun masih cenderung stabil dibandingkan perubahan di tingkat provinsi.



Gambar 3.1 Luas lahan kakao di Luwu Utara dan Sulawesi Selatan (ha)

Interpretasi tutupan/penggunaan lahan dilakukan pada tahap awal untuk dapat menginventarisasi sebaran kakao dan kelas penggunaan lahan lainnya di Luwu Utara. Gambar 3.2 memperlihatkan 18 kelas tutupan/penggunaan lahan yang relevan dengan kondisi Luwu Utara untuk peta jalan kakao lestari. Pemetaan citra satelit dilakukan secara semi otomatis pada resolusi 30 m menggunakan google earth engine dengan analisis berdasarkan objek (OBIA). Hasil peta menunjukkan 4 tipe kelas tutupan hutan, 8 kelas dengan penggunaan lahan yang produktif dan 6 kelas lainnya termasuk kategori tutupan/penggunaan lahan lainnya.

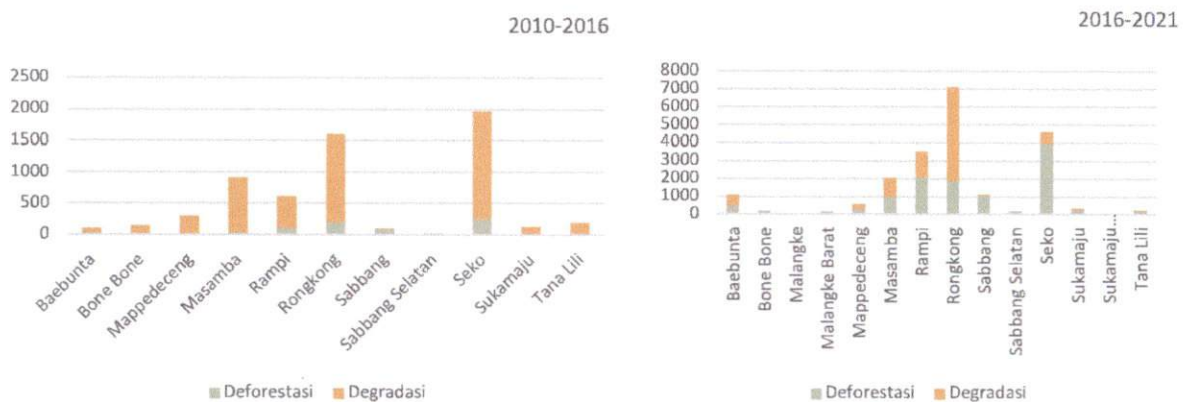


### Legend



Gambar 3.2 Interpretasi tutupan/penggunaan lahan Luwu utara

Gambar 3.3 menjelaskan jika luas hutan terus menurun sejak 2010 sampai 2021. Kehilangan tutupan lahan hutan pada periode 2016-2021 lebih tinggi dibandingkan 2010-2016. Dari tren perubahan tersebut, diketahui terjadi deforestasi dan degradasi hutan pada periode tahun 2010-2016 seluas 6132 ha dan 21.480 ha pada periode 2016-2021.

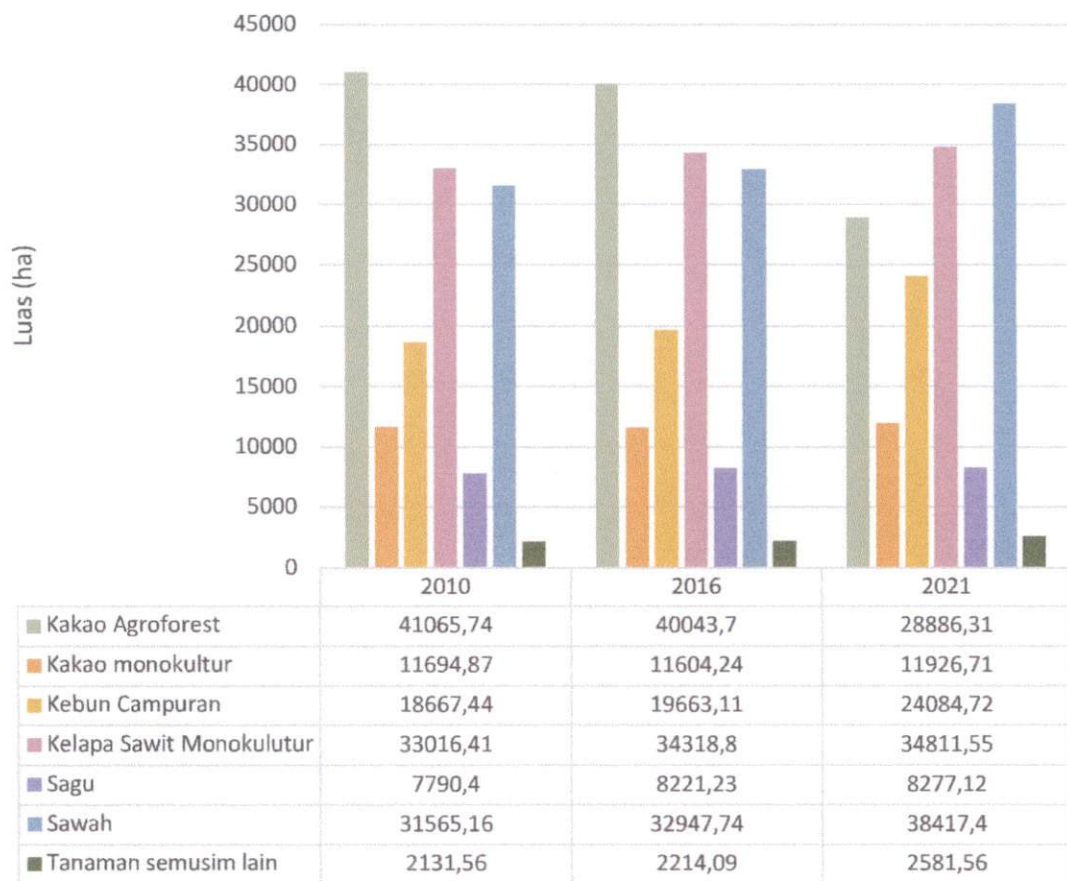


Gambar 3.3 Distribusi hutan deforestasi dan degradasi 2010-2016 (kiri) dan 2016-2021 (kanan)

Luas lahan kakao di Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan dari 46.185 ha pada tahun 2012 sampai di angka 38.435 ha pada tahun 2021 (BPS, 2021). Apabila dilakukan proyeksi tutupan lahan dari tahun 2021 ke tahun 2051, luas tutupan lahan kakao baik agroforestri maupun monokultur cenderung masih stabil. Meskipun demikian, ekspansi dari komoditas lain maupun pembangunan dapat memicu alih fungsi lahan.

Penurunan daya dukung lahan merupakan salah satu hambatan dalam pengelolaan kakao secara lestari. Beberapa faktor menjadi penyebab penurunan daya dukung dalam produksi kakao di Luwu Utara seperti ancaman bencana alam, salah satunya adalah banjir. Kebun yang berlokasi di dekat sungai juga tergenang oleh air secara berkala sehingga tidak dapat berproduksi secara optimal.

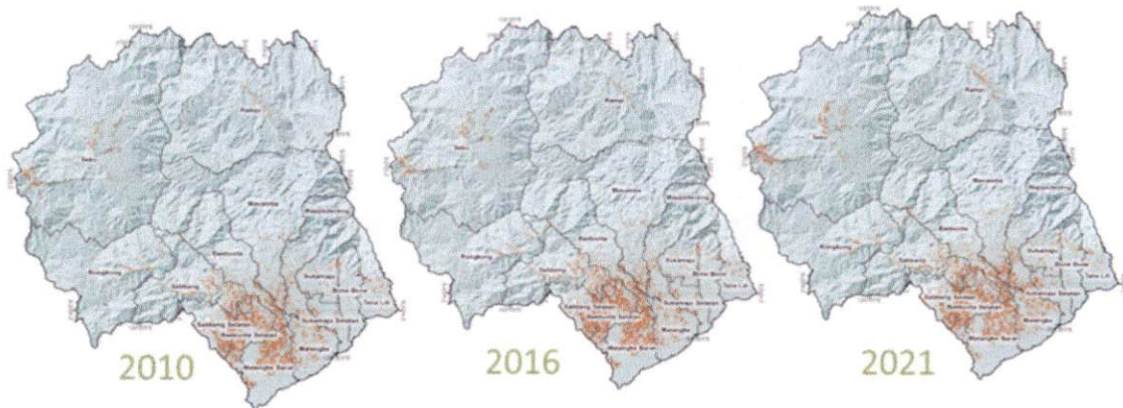
Tutupan lahan kebun campuran mengalami peningkatan 22,5 persen pada periode 2016-2021, dengan luas area menjadi 24.085 ha. Pada periode yang sama, luas tutupan lahan kelapa sawit, sagu, dan sawah juga mengalami peningkatan dengan pada tahun 2021 luas masing-masing tutupan lahan secara berurutan adalah 34.811 ha, 8277 ha, dan 38417 ha. Persebaran luas tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Tutupan/Penggunaan Lahan di Luwu Utara (ha)

Berdasarkan dinamika penggunaan lahan kakao yang diproyeksikan, tanaman kakao akan terus mengalami tekanan seperti ditunjukkan pada Gambar 3.5. Meskipun tekanan terhadap kakao sangat mengkhawatirkan, upaya semua pihak dan adanya budaya masyarakat dalam pengelolaan kebun kakao dapat menjaga eksistensi tanaman kakao.

Hal lain yang memberikan tekanan terhadap luasan pengelolaan kakao di Luwu Utara adalah adanya alih guna lahan karena penurunan produktivitas pengelolaan kakao dari setiap unit lahan. Perubahan kondisi/daya dukung tanah dan serangan hama penyakit telah mengakibatkan tidak dapat berproduksinya kebun kakao secara optimal. Banyak lahan masyarakat tidak dapat memberikan dukungan ekonomi dari perusahaan kebun kakao. Secara perlahan berbagai kebun masyarakat terkonversi menjadi berbagai penggunaan lahan lain, termasuk tidak dikelolanya lahan tersebut. Hal ini sangat disayangkan sehingga perlu dilaksanakan upaya yang sangat intensif untuk mengatasi tantangan pengelolaan kakao di masa depan.



#### Legend

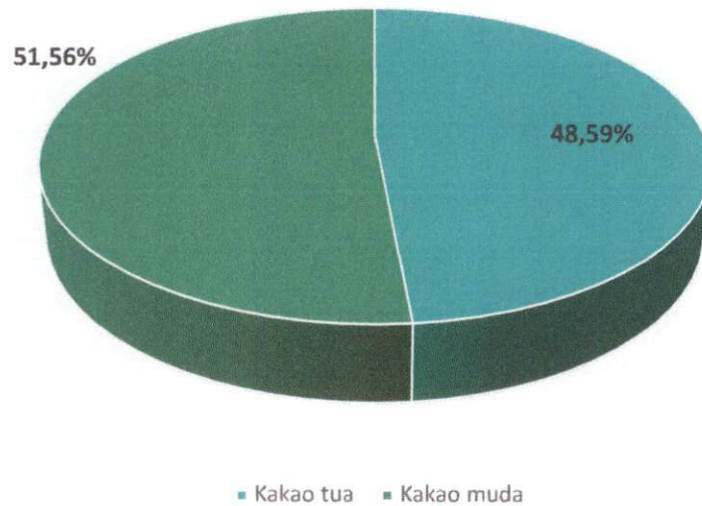
-  Batas kecamatan
-  Kakao agroforestri
-  Kakao monokultur

Gambar 3.5 Peta Sebaran Tutupan Lahan Kakao di Luwu Utara

#### Interpretasi Umur Kakao

Interpretasi peta citra tutupan lahan menunjukkan jika umur sebesar 48,59 persen termasuk ke dalam kategori kakao tua. Pohon kakao di Luwu Utara sudah memasuki usia tua yaitu melebihi usia produktifnya (7 sampai 25 tahun). Peremajaan perkebunan kakao perlu dilakukan secara terencana sesuai dengan standar pengelolaan kebun kakao secara berkelanjutan. Petani kakao masih terhambat akses permodalan dan keahlian untuk pembenihan atau pembibitan ketika memasuki fase peremajaan kebun kakao (Kelley, 2020). Pemerintah Kabupaten Luwu Utara telah mengupayakan bantuan untuk proses peremajaan dari pendanaan pemerintah seluas 2538 ha yang dilakukan sejak tahun 2017<sup>3</sup>.

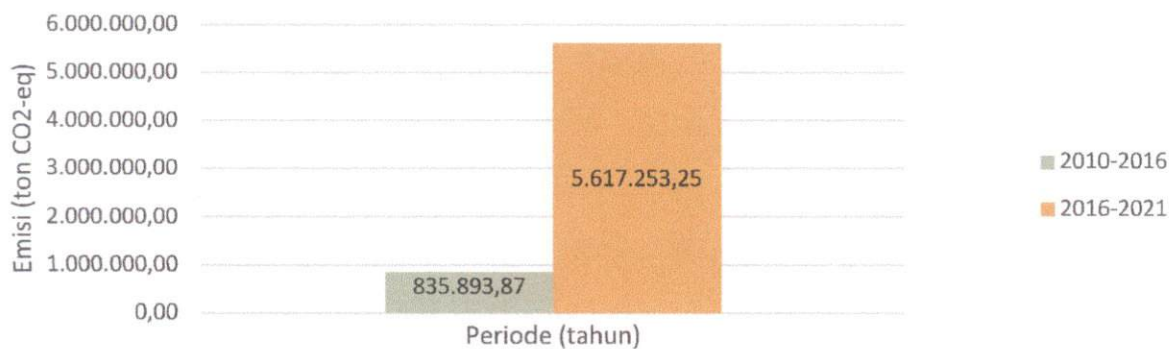
<sup>3</sup> Program pemerintah dilakukan dengan pembangunan kebun entres kakao dan kebun induk batang bawah (Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, 2021).



Gambar 3.6 Persentase usia kebun kakao berdasarkan interpretasi citra satelit

#### Emisi GRK

Dinamika perubahan tutupan lahan akan memengaruhi jumlah emisi karbon, sebagaimana pada kelas tutupan yang berbeda menyimpan jumlah simpanan karbon yang beragam. Pada periode tahun 2010-2016, jumlah emisi karbon dari total perubahan lahan yang terjadi berjumlah 835.893,87 ton CO<sub>2</sub>-eq; kemudian pada periode tahun 2016-2021 jumlah emisi karbon menjadi 5.617.253,25 ton CO<sub>2</sub>-eq. Dibutuhkan pengelolaan lahan secara berkelanjutan untuk mengurangi jumlah emisi karbon.



Gambar 3.7 Data historis emisi karbon akibat dinamika perubahan tutupan lahan

#### Kesesuaian Lahan

Kesesuaian lahan kakao di Kabupaten Luwu Utara dapat dikatakan cukup baik dengan komposisi luasan sesuai marginal (S3), sesuai (S2), dan sangat sesuai (S1) cukup besar. Sebagian besar area yang sesuai sudah berada di tutupan kakao agroforestri dan kakao monokultur.

Tabel 3.1 Kesesuaian lahan potensial untuk kakao

Kesesuaian lahan potensial	Kakao Agroforest	Kakao Monokultur	Lahan Terbuka	Padang rumput	Semak Belukar
N (Tidak sesuai)	58,95	284,49	125,28		2.035,80
S1 (Sangat sesuai)	1.779,57	887,58	125,55	2,79	87,21

Kesesuaian lahan potensial	Kakao Agroforest	Kakao Monokultur	Lahan Terbuka	Padang rumput	Semak Belukar
S2 (Sesuai)	3.285,09	2.261,79	2.603,97	3.841,38	3.143,97
S3 (Sesuai marginal)	19.782,09	10.487,07	3.369,60	10.022,58	22.167,90

### SDM dan produktivitas

Kegiatan peningkatan kapasitas petani dan masyarakat pelaku pengelolaan kakao merupakan bagian penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan kakao. Keterampilan teknis dan pengetahuan mengenai praktik pertanian yang baik (*good agricultural practices*) masih dirasakan sangat terbatas sehingga menyebabkan petani kakao sulit merespon persoalan kebun seperti hama dan penyakit (Hutchins, Tamargo, & Kim, 2015). Penggunaan pupuk kimia, pestisida, maupun herbisida sudah dilaksanakan oleh petani secara bertahun-tahun. Hal ini telah menjadi salah satu indikasi menurunnya produksi kakao yang terjadi hampir disemua wilayah Kabupaten Luwu utara.

Penyuluhan dan pelatihan sudah banyak dilakukan untuk mendampingi petani kakao baik dari pemerintah, swasta, universitas, maupun lembaga swadaya masyarakat. Namun, masih dibutuhkan pendampingan secara terencana yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani kakao sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Ketidakkampuan petani mengelola kebun secara optimal berdampak pada produktivitas yang rendah. Kerentanan tanaman kakao akan hama dan penyakit menyebabkan produksi menurun. Hama dan penyakit yang ditemui antara lain: ulat, kutu, serangan penggerek buah kakao (PBK), penyakit busuk buah, dan kanker batang. Petani belum menguasai pengendalian hama terpadu sehingga sering kali upaya yang dilakukan cenderung memperburuk kondisi tanaman dan lingkungan misalnya dengan pemupukan kimia atau penggunaan herbisida dan pestisida.

Keterbatasan saprodi seperti bibit dan pupuk masih ditemui di beberapa kecamatan sentra kakao. Pembibitan oleh petani lokal sudah mulai didorong dengan memperhatikan intensitas cahaya, durasi penyiraman, pemupukan, pengendalian hama, dan penjarangan yang berkala (Fairuzia, Krisnamurthi, & Rifin, 2020). Petani kakao yang ditemui di lapangan menyatakan bahwa salah satu persoalan bibit unggul adalah tidak adanya izin distribusi.

Penanganan pasca panen yang dilakukan petani kakao di Luwu Utara tidak melalui proses fermentasi. Peraturan Menteri Pertanian No. 67/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji Kakao telah mengatur bahwa petani kakao wajib melakukan fermentasi dengan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 2323:2008/2010. Pemerintah pernah memberikan bantuan peralatan fermentasi namun belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu alasan petani tidak melakukan fermentasi adalah dirasa tidak memberikan keuntungan peningkatan harga untuk petani. Selain itu, kualitas fermentasi standar internasional (ISO 2451-2014) membutuhkan penanganan kompleks yang sulit dicapai oleh petani skala kecil, antara lain: fermentasi sempurna, berbau khas kakao, dan tidak mengganggu kotoran fisik, serangga maupun jamur. Koperasi Masagena misalnya menyatakan bahwa apabila fermentasi dilakukan oleh petani cenderung mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan pada skala industri yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

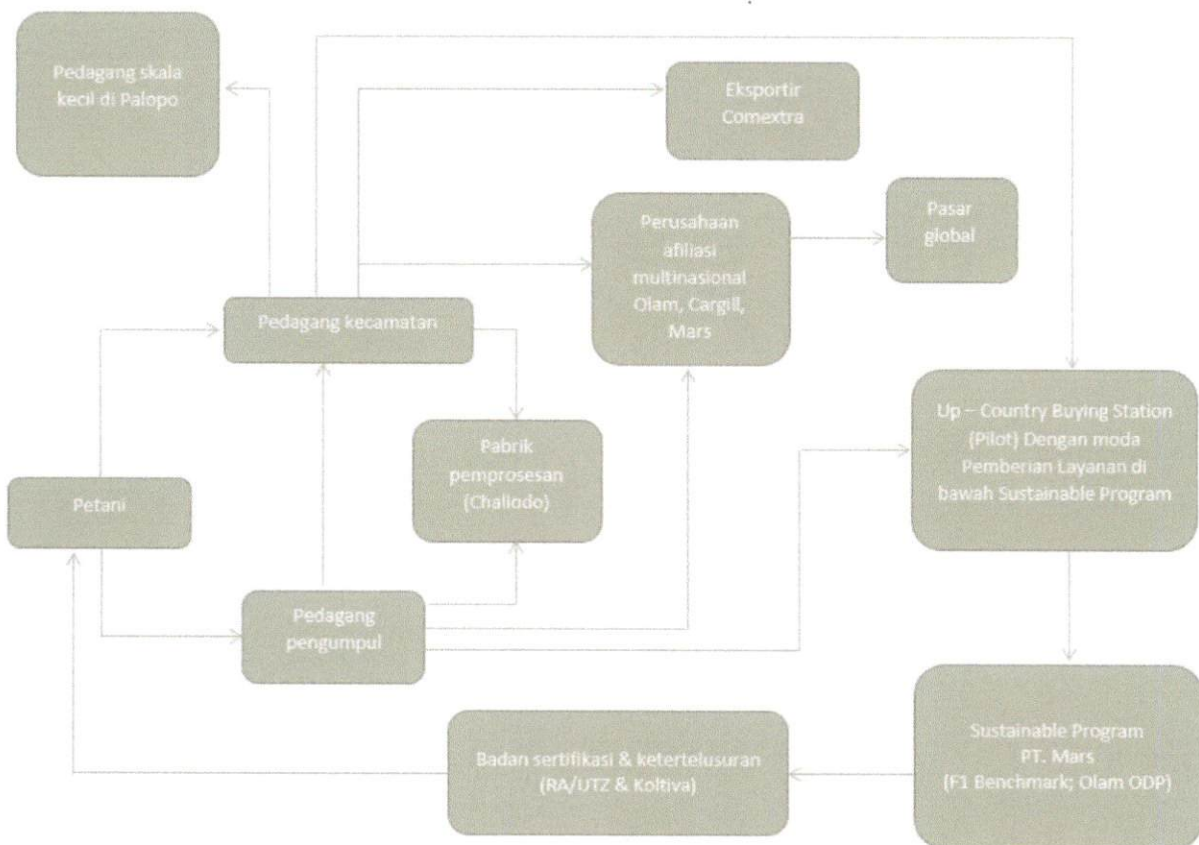
### Pasar dan rantai nilai

Pengembangan kakao sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Luwu Utara. Secara umum, petani memiliki fleksibilitas untuk melakukan penjualan ke pengumpul baik basah maupun kering. Terdapat beberapa perusahaan yang beroperasi seperti PT. Mars, Olam, Cargill, dan Comextra.

Sayangnya, praktik masih konvensional sehingga daya saing petani kecil kakao juga masih rendah. Selain itu, pembangunan mekanisme pasar perlu dipersiapkan agar dapat mengadopsi sistem yang berkelanjutan. Permintaan dari pasar global akan produk yang ramah lingkungan turut mendorong transformasi sistem pasar menuju keberlanjutan. Rantai pasok yang berkelanjutan melalui sistem keterlacakan yang terintegrasi diharapkan dapat menjamin adopsi sistem keberlanjutan yang memastikan kelestarian lingkungan.

Tabel 3.2 Tata kelola rantai pasok kakao di Kabupaten Luwu Utara

Komponen tata kelola rantai nilai	Kondisi di Kabupaten Luwu Utara
Hubungan jual beli produk dengan pembeli	Hubungan jual beli antara petani dan pengumpul cukup fleksibel. Pengumpul juga bebas menentukan menjual ke perusahaan. Biji kakao basah dijual ke PT. Mars sedangkan kakao kering ke PT. Mars, Olam, Cargill, dan Comextra. Ada juga pembeli lokal seperti Chalodo.
Penentuan harga jual beli	Ada harga yang ditentukan oleh pembeli. Ada juga penentuan harga berdasarkan kontrak sertifikasi dengan perusahaan yang memiliki jangka waktu tertentu.
Penentuan kualitas produk	Petani diminta memenuhi standar kualitas yang ditentukan oleh pembeli atau perusahaan. Standar kualitas yang sesuai dengan standar global disampaikan oleh pengumpul.
Koordinasi dengan pembeli	Koordinasi sudah terbangun melalui rasa percaya antara petani dengan pengumpul. Petani cenderung terkoneksi dengan pengumpul yang berlokasi dekat dengan kebunnya.
Transaksi	Transaksi dilakukan secara fleksibel. Pembayaran dilakukan secara tunai dan dicatat dengan nota atau kwitansi.



Gambar 3.8 Ilustrasi tata kelola rantai pasok kakao di Luwu Utara

### 3.2 Visi

Pengelolaan kakao lestari sejalan dengan tujuan pembangunan RPJMD yaitu “Luwu Utara Maju, Mandiri, dan Harmonis” tahun 2021-2026 dan visi RPJPD “Tangguh, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan tahun 2025-2045 yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing. Pengelolaan kakao secara lestari tidak hanya menyejahterakan petani tapi juga tanggap terhadap risiko bencana dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Komitmen bersama antar para pihak telah dilakukan untuk menyepakati visi “Kakao Lestari, Rakyat Sejahtera”. Visi pengelolaan kakao ini berangkat dari kesadaran para pihak bahwa pengelolaan kakao sedang mengalami penurunan dan persoalan namun memiliki potensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat sekaligus mengembalikan kejayaan kakao di Luwu Utara.

### 3.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup peta jalan kakao lestari adalah komoditas strategi kakao di Kabupaten Luwu Utara yang berfokus pada pengelolaan secara terintegrasi dari hulu-hilir berbasis bentang lahan. Berbagai inisiatif pengelolaan komoditas strategis baik di tingkat nasional maupun daerah terintegrasi dengan rumusan peta jalan. Peta jalan kakao lestari diharapkan menjadi acuan dari berbagai komitmen kegiatan pengelolaan kakao oleh semua pihak yang sedang dan akan dilaksanakan di Kabupaten Luwu Utara.



Gambar 3.9 Fokus area intervensi dalam peta jalan kakao lestari

## 4. Strategi dan Intervensi

### 4.1 Skenario Pengembangan dan Strategi Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara

Skenario Pembangunan Kakao Lestari merupakan terjemahan dari visi 'Kakao Lestari Rakyat Sejahtera' dimana skenario ini bermaksud untuk dapat mewujudkan: (1) peningkatan sumbangan peran sektor kakao pada struktur ekonomi secara berkelanjutan, (2) kekuatan ekonomi dan inovasi sumber penghidupan masyarakat, (3) daya tahan masyarakat terhadap berbagai tantangan masa depan meliputi hama, penyakit, dan berbagai kejadian bencana, (4) terjaganya ruang wilayah untuk menunjang pengembangan kakao dan terwujudnya ekosistem sehat untuk menjaga fungsinya secara berkelanjutan.

Skenario pembangunan kakao lestari ini diarahkan untuk mendukung upaya pengembangan kakao berdasarkan kesesuaian biofisik, sosial, dan ekonomi diantara berbagai fungsi penggunaan lahan dan komoditas yang lain sehingga walaupun orientasinya untuk peningkatan kakao akan tetapi berbagai pengembangan kegiatan yang lain perlu tetap dipertimbangkan terhadap potensi sinergi dan kompetisi yang dimungkinkan, termasuk juga perlunya untuk memperhatikan berbagai fungsi mempertahankan keberadaan kawasan hutan dan potensi berbagai kondisi ekosistem yang memiliki nilai konservasi tinggi. Skenario ini juga berupaya mengatur aspek hulu-hilir pengembangan kakao dimana satu dengan yang lain sangat berkaitan. Aspek peningkatan produksi diarahkan untuk menghadapi berbagai hambatan dan keterbatasan yang saat ini dihadapi oleh para petani, sementara aspek hilir merupakan upaya untuk dapat memastikan aspek pasar kakao dapat menampung produk yang dihasilkan melalui berbagai opsi yang menguntungkan petani dan dapat juga meningkatkan kemandirian petani terhadap pasar dari ketergantungan terhadap pasar konvensional. Secara lebih luas skenario ini juga berupaya memasukkan aspek keberlanjutan dalam jangka panjang yang memperhatikan pentingnya dukungan ekosistem wilayah secara berkelanjutan.

### 4.2 Strategi Kakao Lestari

Pengembangan kakao lestari Luwu Utara dikembangkan melalui implementasi lima strategi utama yang terdiri dari: (1) alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan, (2) peningkatan akses masyarakat terutama petani kakao terhadap modal penghidupan, (3) peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk kakao, (4) perbaikan rantai pasok yang berkelanjutan, (5) Insentif jasa ekosistem dari kakao berkelanjutan. Rumusan Strategi dan intervensi umum kakao lestari disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Strategi dan Intervensi

Strategi	Intervensi
1. Alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan	Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten
	Alokasi peremajaan lahan kakao
	Perluasan terbatas kebun kakao
	Alokasi lahan untuk pengembangan agroforestri kakao
2. Peningkatan akses masyarakat terutama petani kakao terhadap modal penghidupan	Kemudahan akses sertifikasi lahan
	Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao
	Penyuluhan kakao yang tepat sasaran
	Pengembangan kelembagaan keuangan petani kakao
	Korporasi petani kakao
	Bantuan peralatan pertanian
	Pelibatan dan pemberdayaan perempuan dalam usaha tani kakao

Strategi	Intervensi
	Pelibatan dan pemberdayaan perempuan Pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja Sistem pencegahan dan pengawasan pekerja anak Kebijakan kakao lestari yang mendukung modal penghidupan petani kakao Asuransi pertanian kakao
3. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk kakao	Peningkatan kapasitas budidaya kakao dengan penerapan GAP dan agroforestri kakao Akses terhadap sarana dan prasarana pendukung usaha tani kakao Diversifikasi produk kakao Agribisnis kakao
4. Perbaiki rantai pasok yang berkelanjutan	Pengembangan rantai pasok yang efektif dan integratif Perbaiki kelembagaan rantai nilai Sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen Sistem penelusuran kakao di platform daring Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan
5. Insentif jasa ekosistem dari kakao berkelanjutan	Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) antar daerah berupa Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di tingkat kabupaten untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan stok karbon Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon Label ramah lingkungan hidup Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup Penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

### Alokasi dan Tata Guna Lahan Berkelanjutan

Kepentingan kegiatan ekonomi masyarakat berkaitan erat dengan kebutuhan akan lahan (*land requirement*). Penurunan luasan kebun kakao juga dipengaruhi oleh meningkatnya ketertarikan akan komoditas lain maupun kegiatan ekonomi pembangunan lainnya. Akan tetapi tidak semua kebutuhan akan lahan bisa dipenuhi oleh ketersediaan lahan lokal (*land availability*) yang memadai pada semua area. Dibutuhkan proses penyesuaian dan prioritasasi antara kedua faktor tersebut sehingga bisa tercapai tata guna lahan yang adil, efektif, dan berkelanjutan yang didukung dengan adanya keberadaan fungsi hutan dan ekosistem penting lain untuk dapat menjadi penyangga (*buffer*) berbagai ancaman bencana alam dan dampak perubahan iklim yang terjadi di Luwu Utara.

### Peningkatan Akses Masyarakat Terutama Petani Kakao terhadap Modal Penghidupan

Modal penghidupan secara garis besar mencakup lima hal, yaitu: modal alam, fisik, finansial, sosial dan sumber daya manusia. Akses terhadap modal penghidupan melalui perbaikan prasarana-sarana diharapkan agar petani dapat merasakan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan memiliki ketahanan (*resilience*) terhadap fluktuasi harga dan musim. Para pemangku kepentingan dalam hal ini dapat

memfasilitasi masyarakat dalam mengakses modal penghidupan tersebut secara memadai sehingga masyarakat akan dapat berkembang dalam memajukan pengelolaan kakao di Luwu Utara.

#### **Peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk kakao**

Teknologi dan praktik pengelolaan lahan yang sesuai dan berkelanjutan akan meningkatkan produktivitas per unit luasan lahan produksi sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Diversifikasi akan memberikan manfaat beragam yang bisa menurunkan kerentanan petani akan ketidakpastian cuaca dan harga. Perbaikan teknologi dan praktik pengelolaan lahan dapat mendorong laju ekonomi yang tinggi bisa dicapai sehingga dampak negatif lingkungan dapat dihindari. Strategi ini juga berorientasi pada peningkatan kemandirian masyarakat/petani untuk mendapatkan peluang pasar dan mendapatkan nilai tambah dan memperbaiki peluang dan hubungan yang seimbang dengan pasar konvensional yang saat ini sudah ada.

#### **Memperbaiki rantai pasok yang berkelanjutan**

Mendorong adanya rantai pasar maupun rantai nilai yang lebih efektif dan adil dalam pembagian manfaat antara petani, perantara/pedagang/*intermediary* dan industri hilir, serta penambahan nilai di area penghasil bahan baku. Pembagian manfaat yang lebih baik dan adil sepanjang rantai nilai akan mendorong tercapainya pemerataan pertumbuhan dan juga ketahanan sosial yang lebih tinggi

#### **Insentif jasa ekosistem dari kakao berkelanjutan**

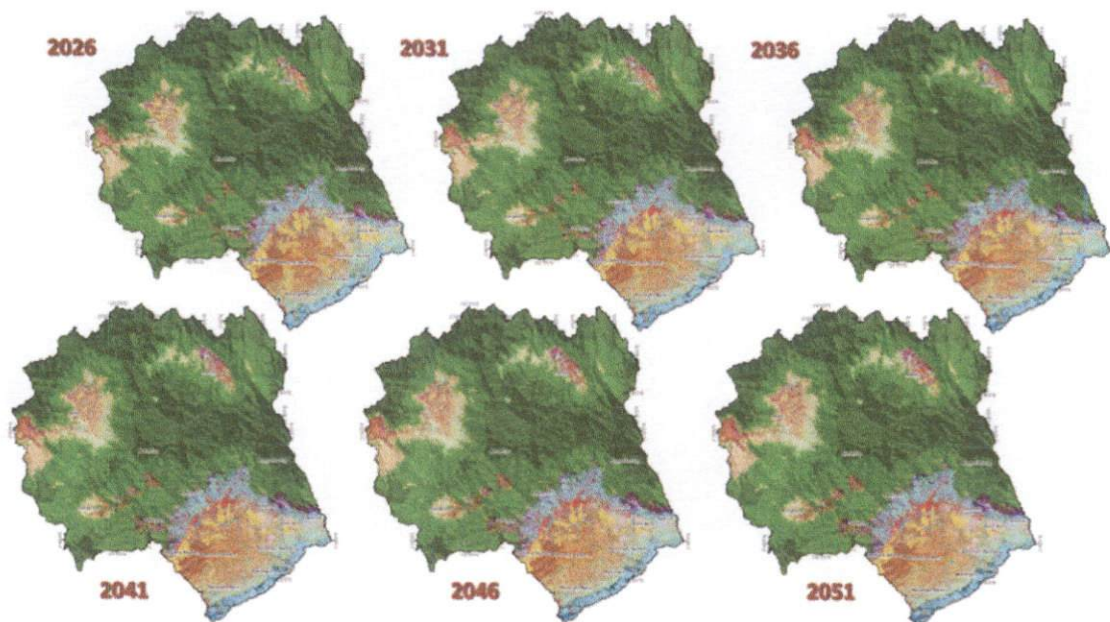
Pengelolaan komoditas strategis seperti kakao perlu diseimbangkan dengan pengelolaan ekosistem yang sehat. Mekanisme insentif jasa ekosistem untuk menurunkan emisi, meningkatkan ketahanan, dan menjaga kualitas lingkungan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

### **4.3 Proyeksi Dampak Skenario**

Tutupan/penggunaan lahan di Kabupaten Luwu Utara disimulasikan dalam 2 tipe, berdasarkan (i) kondisi masa lalu (*business as usual* - BAU) dan (ii) skenario kakao lestari. Proyeksi tutupan lahan dilakukan untuk periode 2026-2051.

#### *Skenario Business as Usual (BAU)*

Gambar 4.1 memperlihatkan 18 kelas tutupan/penggunaan lahan tahun 2026, 2031, 2036, 2041, 2046 dan 2051 berdasarkan kondisi sesuai masa lalu. Pemodelan peta citra satelit dilakukan secara semi otomatis, resolusi 30 m, menggunakan LUMENS dengan analisis berdasarkan objek (OBIA).

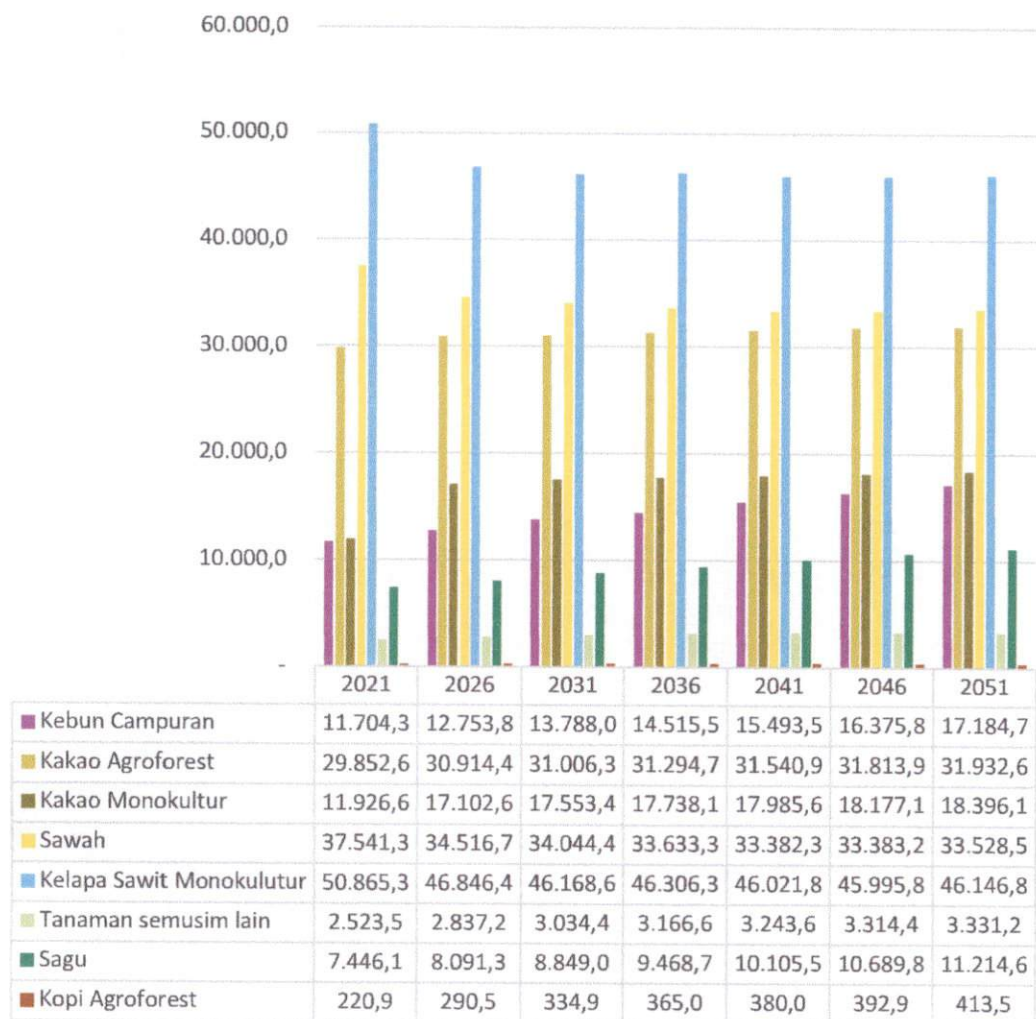


### Legend

	Batas kecamatan		Kopi agroforestri		Padi irigasi/sawah
	Hutan lahan kering primer		Kakao agroforestri		Tambak
	Hutan lahan kering sekunder kerapatan tinggi		Kakao monokultur		Pemukiman
	Hutan lahan kering sekunder kerapatan rendah		Kebun campuran/buah buahan		Lahan terbuka
	Hutan mangrove sekunder		Rerumputan/savana		Badan air
	Kelapa sawit monokultur		Tanaman semusim lain/holtikultura		
	Sagu		Semak belukar		

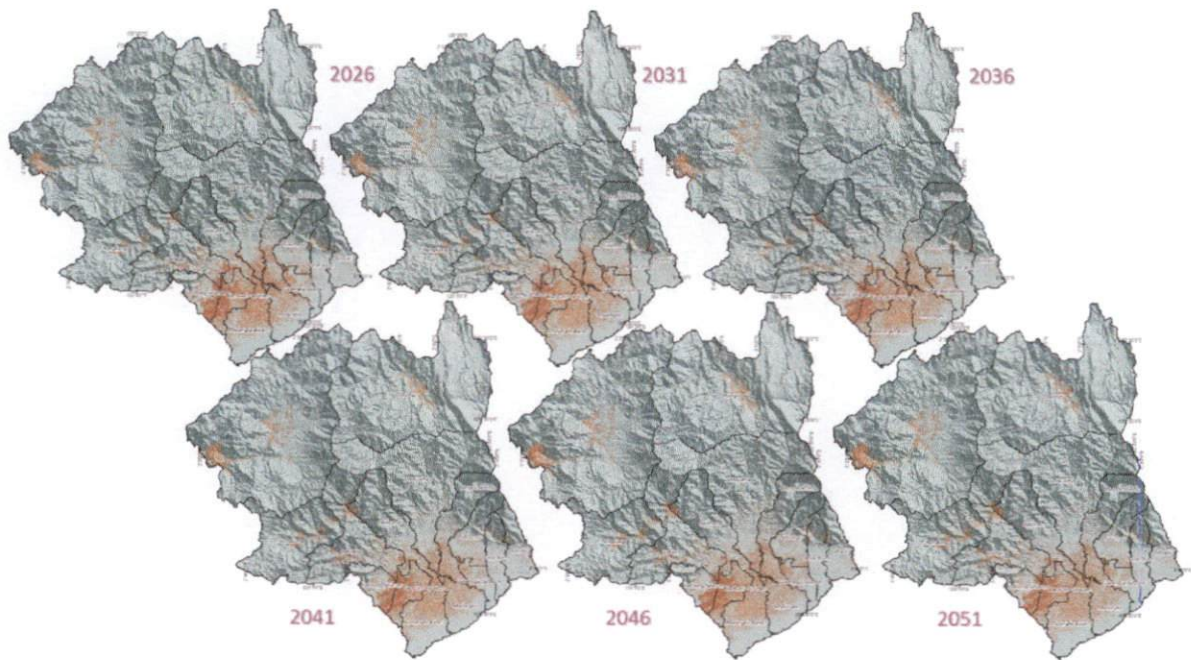
Gambar 4.1 Proyeksi Tutupan/Penggunaan Lahan Masa Depan Berdasarkan Kondisi Masa Lalu (BAU)

Hasil peta proyeksi BAU menunjukkan bahwa di masa depan masih akan terjadi deforestasi dan degradasi hutan dengan jumlah yang cukup tinggi. Dalam periode 30 tahun, kehilangan hutan lahan kering primer diprediksi akan mencapai 46.911 ha, dengan sebagian menjadi hutan lahan kering sekunder sebesar 13.992 ha dan sisanya menjadi tutupan lahan selain hutan. Pada periode yang sama, luas kakao akan mengalami kenaikan sekitar 8.549 ha dan penurunan luas tutupan kelapa sawit monokultur sebesar 4.718 ha. Beberapa penggunaan lahan lain yang berkurang seperti sawah (4.0122 ha) dan hutan mangrove (416 ha).




Gambar 4.2 Proyeksi BAU Tutupan/Penggunaan Lahan di Luwu Utara (ha)

Dalam periode 2021-2051 luas kakao secara keseluruhan mengalami peningkatan. Walaupun luas kakao agroforestri (2.080 ha) meningkat lebih sedikit dibandingkan dengan kakao monokultur (6.469 ha), tetapi kesempatan untuk meningkatkan produktivitas kakao masih terlihat positif. Sebaran kakao masa depan dapat terlihat pada Gambar 4.3.



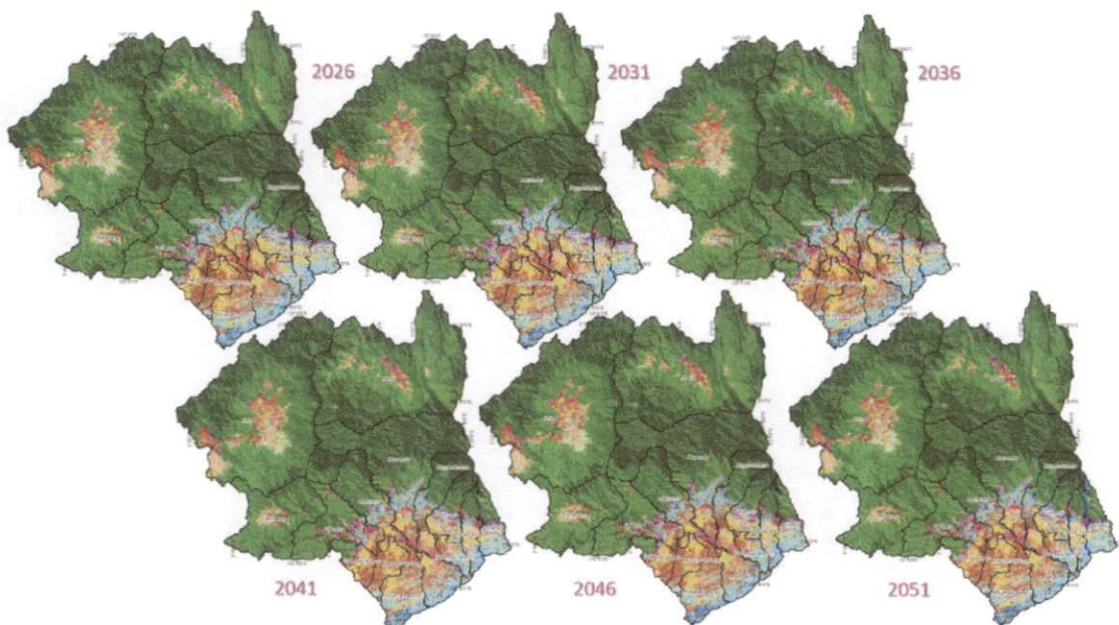
**Legend**

-  Batas kecamatan
-  Kakao agroforestri
-  Kakao monokultur

Gambar 4.3 Peta Proyeksi Sebaran Tutupan Lahan Kakao di Luwu Utara Berdasarkan Masa Lalu (BAU)

*Skenario Kakao Lestari*

Gambar 4.4 memperlihatkan tutupan lahan masa depan dengan memberikan intervensi berupa skenario kakao lestari pada tahun 2026, 2031, 2036, 2041, 2046 dan 2051. Pada dasarnya skenario rencana kakao lestari dimasa depan mengutamakan efektivitas dalam pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produktivitas kakao dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kesehatan lingkungan.

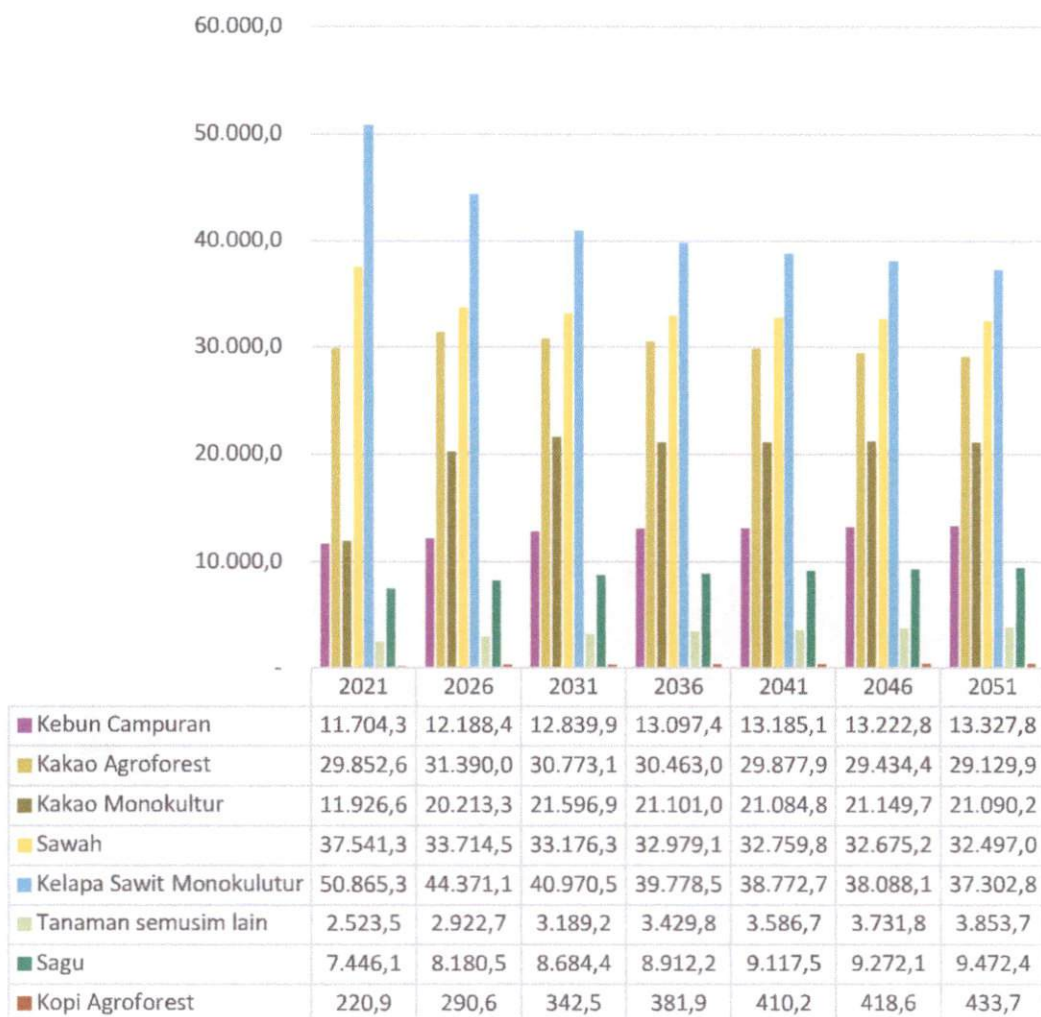


## Legend



Gambar 4.4 Proyeksi Tutupan/Penggunaan Lahan Masa Depan Berdasarkan Intervensi Skenario Kakao Lestari

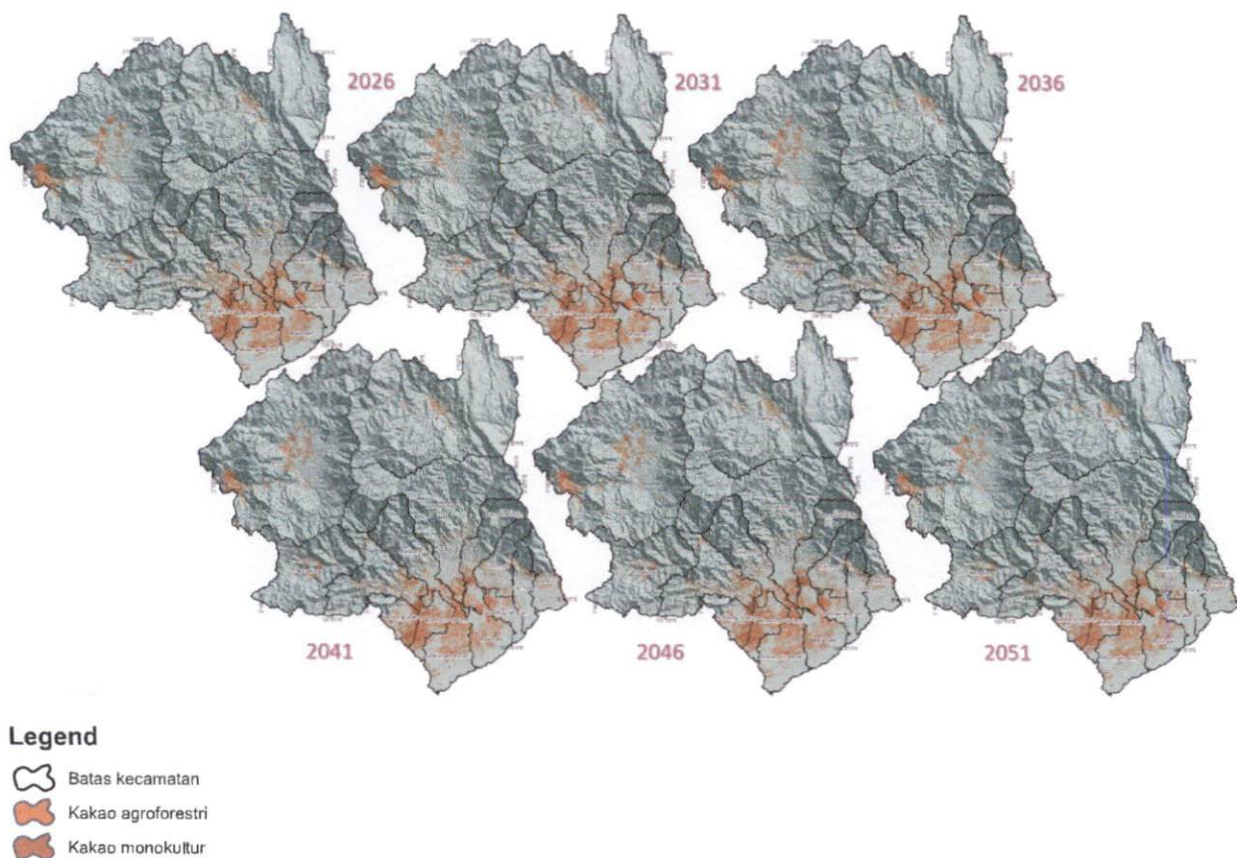
Gambar 4.5 menunjukkan kehilangan hutan dengan skenario kakao lestari dapat direduksi hingga 57% lebih baik jika dibandingkan dengan BAU. Kehilangan hutan primer pada skenario kakao lestari sebesar 26.920 ha. Kemudian beberapa area perubahan dari hutan sekunder menjadi tutupan/penggunaan lainnya juga dapat dihindari, sehingga luas hutan sekunder mengalami peningkatan sebesar 34.021 ha. Pada periode yang sama luas kelapa sawit menurun sebesar 13.562 ha. Sawah juga masih akan terus menurun hingga 2021-2051 sebesar 5.044 ha.



Gambar 4.5 Proyeksi Skenario Kakao Lestari Tutupan/Penggunaan Lahan Di Luwu Utara (ha)

Luas kakao mengalami peningkatan sebesar 8.440 ha, dimana tren kenaikan kakao monokultur masih tetap meningkat lebih besar dibandingkan kakao agroforestri. Gambar 4.6 memperlihatkan sebaran

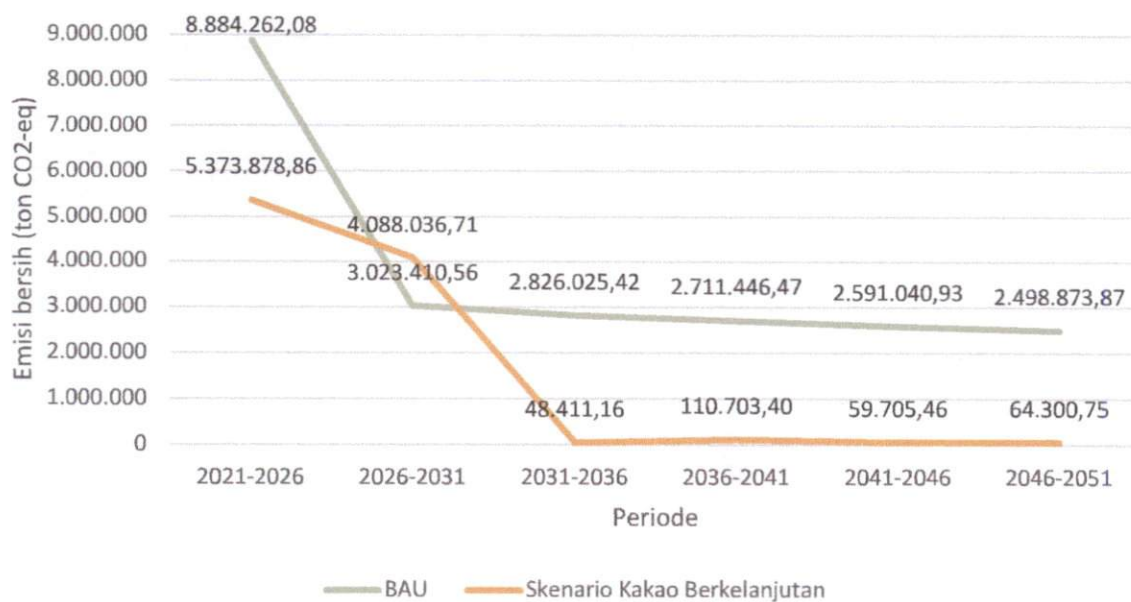
kakao dengan skenario kakao lestari. Area pengembangan kakao sudah memperhatikan kesesuaian lahan untuk kakao dengan kelas sesuai marginal sampai dengan sangat sesuai. Penggunaan parameter peta kesesuaian lahan untuk memastikan alokasi pengembangan kakao bisa dilakukan seefektif dan dengan keberhasilan tinggi. Hal yang perlu diperhatikan adalah intervensi untuk intensifikasi tata kelola dan peremajaan kakao pada masa depan.



Gambar 4.6 Peta Proyeksi Sebaran Tutupan Lahan Kakao di Luwu Utara Berdasarkan Skenario Kakao Lestari

#### Proyeksi emisi GRK berdasarkan skenario BAU dan skenario kakao lestari

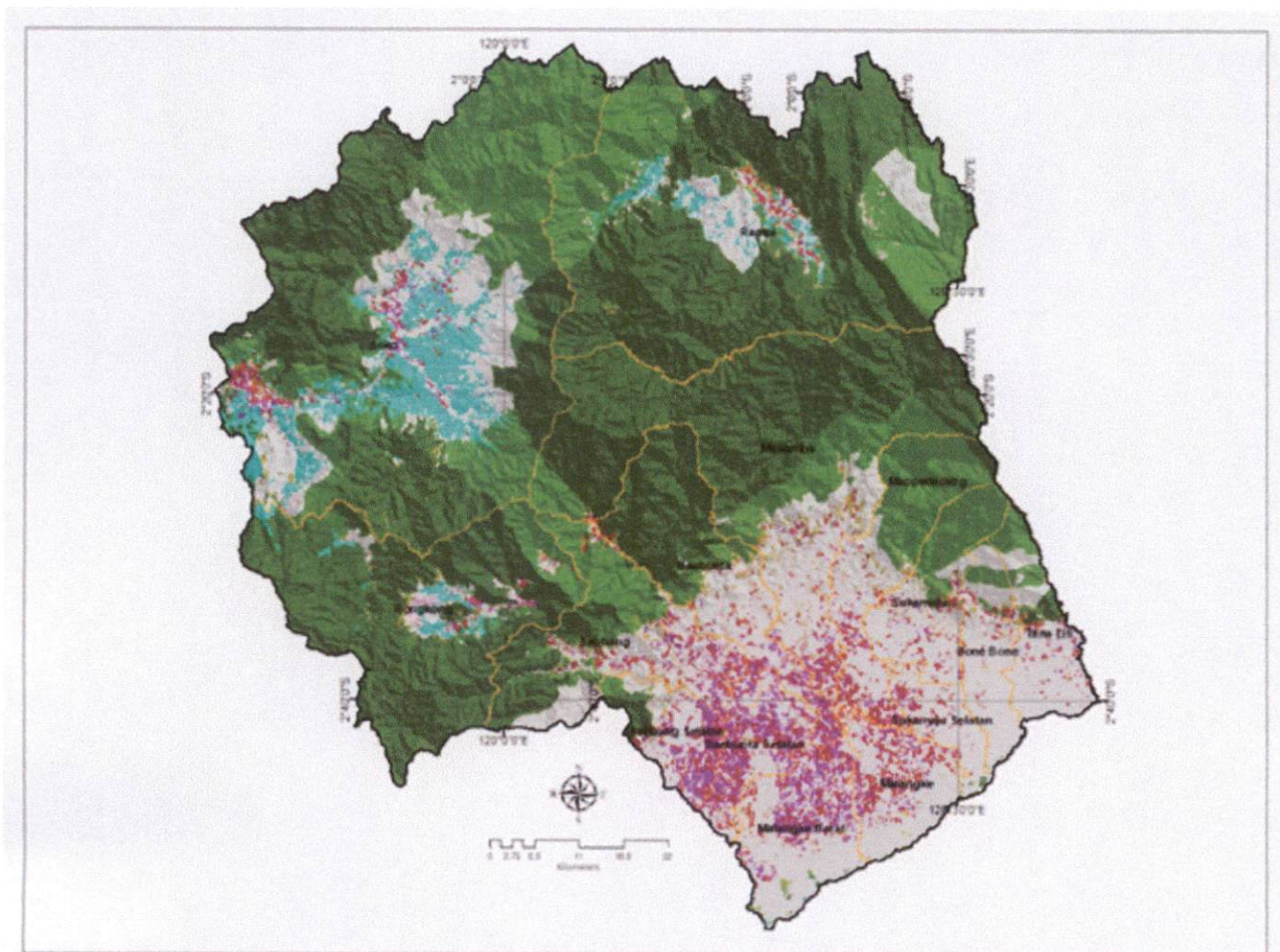
Berdasarkan analisis perkiraan dampak dari proyeksi perubahan tutupan lahan, pengaplikasian skenario kakao berkelanjutan dapat mengurangi emisi hampir berkisar 97 persen di setiap periodenya dibandingkan proyeksi perubahan tutupan lahan dengan kondisi tanpa dilakukan intervensi apa pun (disebut dengan kondisi *business as usual* atau BAU). Pengurangan emisi tersebut dapat tercapai melalui upaya untuk memanfaatkan area lahan yang tidak produktif (lahan terbuka, rerumputan) menjadi perkebunan kakao yang mampu menyimpan cadangan karbon lebih tinggi dibandingkan dengan area lahan yang tidak produktif tersebut. Penanaman kakao secara agroforestri maupun monokultur yang mempertimbangkan kesesuaian lahan juga berkontribusi pada penurunan emisi. Selain pemanfaatan area lahan yang tidak produktif, upaya lain yang dilakukan adalah dengan mempertahankan luas tutupan lahan hutan sebagai area fungsi lindung dan konservasi.



Gambar 4.7 Perbandingan Proyeksi Emisi Antara Skenario Business as Usual Dengan Skenario Kakao Berkelanjutan

#### 4.4 Intervensi

Intervensi pengelolaan kakao lestari merupakan pendetailan dari upaya yang lebih nyata dari kelima strategi yang telah dirumuskan. Setiap intervensi memiliki capaian dambaan dan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian intervensi. Proses perumusan capaian dambaan dan penentuan indikator dilakukan melalui diskusi inklusif yang melibatkan para pihak. Setiap intervensi juga dipetakan secara spasial sebagai acuan lokasi pelaksanaan intervensi (Gambar 4.8).



**Legend**

- Tidak ada intervensi
- Intervensi 1 - Mempertahankan kawasan yang dilindungi sesuai dengan fungsi dan kedudukannya
- Intervensi 2 - Pengelolaan hutan secara terbatas dengan mengedepankan nilai keanekaragaman hayati
- Intervensi 3 - Alokasi peremajaan lahan kakao
- Intervensi 4 - Intensifikasi lahan kakao untuk optimalisasi pengelolaan lahan kakao
- Intervensi 5 - Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan kawasan lindung tata ruang wilayah
- Intervensi 6 - Pengembangan agroforestri kakao
- Intervensi 7 - Perluasan terbatas kebun kakao pada area dengan kemiringan lereng dibawah 45%
- Intervensi 8 - Restorasi lahan dengan agroforestri kakao

Gambar 4.8 Peta Intervensi Peta Jalan Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara

**Strategi 1 Alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan**

Strategi ini mengarahkan adanya upaya-upaya untuk melakukan pengelolaan penggunaan lahan kakao dan konstelasinya dengan berbagai penggunaan lahan yang lain. Pengelolaan kakao tidak dapat dipisahkan dengan tata guna lahan yang lain karena adanya prinsip *land demand* dan *land supply*. Pengelolaan kakao harus berorientasi dalam jangka panjang sehingga degradasi yang saat ini sedang terjadi tidak perlu terjadi lagi dimasa yang akan datang.

Tabel 4.2 Intervensi, capaian dambaan, dan indikator Strategi 1

Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator
Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan	Keselarasan kebutuhan dan penyediaan lahan yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi	Luas kawasan hutan
		Luas tutupan hutan
		Luas HCV/HCS

Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator
mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten	tata ruang, konservasi tanah dan air, perlindungan berketahanan bencana melalui data yang sah (terbaru dan diakui).	Luas alokasi lahan untuk tanaman kakao
		Persentase luas kakao yang sesuai dengan alokasi lahan
		Persentase luas kakao yang berada pada area perhutanan sosial
Intervensi 1.2 Alokasi peremajaan lahan kakao	Peningkatan produktivitas kakao melalui identifikasi prioritas peremajaan dengan panduan pedoman peremajaan dan penyuluhan kepada KK.	Persentase luas kakao umur produktif
		Luas indikatif lahan peremajaan kakao (untuk tanaman tua dan rusak)
		Luas pendampingan yang diberikan kepada petani untuk peningkatan efektivitas peremajaan kakao
Intervensi 1.3 Perluasan terbatas kebun kakao	Peningkatan kebun kakao (agroforestri dan monokultur) dengan mengedepankan skema pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan dan memperhatikan faktor pembatas kemiringan lahan.	Persentase penanaman kakao pada area baru dengan kemiringan di atas 25% dengan tingkat kesesuaian lahan S1-S3
		Luas lahan kakao yang berasal dari lahan tidak produktif (semak belukar, lahan terbuka, dan padang rumput).
Intervensi 1.4 Pengembangan agroforestri kakao	Alokasi lahan untuk kakao agroforestri yang terimplementasi sebagai pengembangan kakao lestari.	Luas agroforestri kakao
		Luas penambahan tutupan lahan agroforestri kakao
		Luas lahan agroforestri kakao dengan tanaman pangan

#### Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten

Alokasi perkebunan kakao harus mempertimbangkan fungsi tata ruang, serta kesesuaian lahan perkebunan kakao. Selain itu, pemetaan kawasan bernilai konservasi dan karbon tinggi (*High Conservation Value/High Carbon Value*) juga perlu dipetakan untuk menentukan skema perkebunan kakao yang diterapkan. Apabila terdapat area HCV pada perkebunan kakao maka sebaiknya diterapkan sistem agroforestri dengan tetap menjaga nilai konservasi dan karbon. Tata kelola perkebunan kakao juga termasuk inventarisasi dan pemetaan tanaman kakao yang diusahakan di area perhutanan sosial.

#### Intervensi 1.2 Alokasi peremajaan lahan kakao

Salah satu permasalahan penurunan produksi dan produktivitas tanaman kakao adalah banyak tanaman kakao berusia tua, terutama perkebunan kakao milik rakyat. Pendataan luas perkebunan kakao berdasarkan kelas umur perlu dilakukan untuk menentukan prioritas peremajaan. Peremajaan kakao dapat dilakukan dengan penggantian tanaman maupun sambung pucuk. Pendanaan untuk peremajaan kakao dapat bersumber daya APBD maupun kemitraan dengan perusahaan.

#### Intervensi 1.3 Perluasan terbatas kebun kakao

Perluasan area perkebunan kakao dilakukan pada area yang tidak produktif seperti lahan terbuka maupun semak belukar. Adanya perkebunan kakao meningkatkan tutupan lahan dan stok karbon sekaligus produktivitas lahan. Perluasan area perkebunan kakao juga memperhatikan peta kesesuaian lahan. Penanaman kakao tidak dapat dilakukan di area dengan tingkat kemiringan di atas 25%.

#### Intervensi 1.4 Pengembangan agroforestri kakao

Perluasan area perkebunan kakao dapat dilakukan menggunakan skema agroforestri. Agroforestri kakao dapat diterapkan salah satunya pada area perhutanan sosial. Skema agroforestri diharapkan dapat meningkatkan ketahanan petani terhadap volatilitas harga kakao dan risiko gagal panen akibat serangan hama. Penerapan skema agroforestri harus dibarengi dengan penerapan Praktik Pertanian yang Baik atau *Good Agricultural Practice (GAP)*.

### Strategi 2 Peningkatan akses masyarakat terutama petani kakao terhadap modal penghidupan

Strategi 2 ini diarahkan kepada upaya memberikan dukungan pada perbaikan akses masyarakat terhadap berbagai sumber penghidupan. Strategi ini penting mengingat berbagai kesulitan dalam pengelolaan lahan sering kali terjadi karena kurangnya akses terhadap modal penghidupan dan sumber daya alam. Hal lain yang menjadi latar belakang pentingnya strategi ini adalah dengan menipisnya cadangan modal masyarakat akibat adanya penurunan pendapatan dari sektor kakao ini selama beberapa tahun.

Tabel 4.3 Intervensi, capaian dambaan, dan indikator pada Strategi 2

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator
Intervensi 2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan	Masyarakat, terutama petani kakao, dapat mengakses sertifikat lahan secara mudah dan murah sebagai bukti formal atas kepemilikan lahan.	Persentase jumlah petani kakao yang memiliki sertifikat lahan
		Persentase luas lahan kakao yang memperoleh sertifikat lahan
Intervensi 2.2 Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao	Pengembangan model usaha perhutanan sosial kakao dengan tanaman buah-buahan.	Jumlah perhutanan sosial berbasis kakao
		Jumlah kemitraan perhutanan sosial yang terjalin
		Jumlah kelembagaan perhutanan sosial yang aktif
		Jumlah pendampingan perhutanan sosial
Intervensi 2.3 Penyuluhan kakao yang tepat sasaran	Penyuluhan tepat sasaran yang inovatif dengan dukungan para pihak.	Jumlah penyuluh berkompetensi
		Rasio jumlah penyuluh dan petani
		Jumlah kegiatan penyuluhan dalam satu tahun
		Jumlah pelatihan bagi tenaga penyuluh
		Jumlah petani yang mengikuti kegiatan penyuluhan
Intervensi 2.4 Pengembangan kelembagaan keuangan petani kakao	Skema kelembagaan keuangan petani kakao yang menguntungkan berbasis kelompok.	Jumlah koperasi dengan unit usaha berbasis kakao
		Jumlah BUMDes dengan unit usaha berbasis kakao

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator
		Jumlah petani yang mendapat bantuan permodalan
Intervensi 2.5 Korporasi petani kakao	Korporasi petani kakao dengan sistem manajemen yang baik dan meningkatkan nilai tambah bagi petani kakao.	Jumlah korporasi petani kakao
		Persentase petani yang tergabung dalam korporasi petani
		Luas lahan yang dikelola korporasi petani
		Pendapatan petani kakao
		Jumlah pendampingan peningkatan kapasitas korporasi petani
Intervensi 2.6 Bantuan peralatan pertanian	Keberadaan peralatan pertanian kakao yang tepat guna berbasis teknologi (mesin).	Jumlah peralatan pertanian yang terdistribusi dan sesuai dengan kebutuhan petani
		Persentase kelompok tani yang pernah mendapatkan bantuan peralatan pertanian
		Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)
Intervensi 2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam usaha tani kakao	Perempuan yang terlibat dan berdaya pada setiap bagian usaha tani kakao.	Persentase petani perempuan dan pemuda yang mengikuti penyuluhan usaha tani kakao
		Jumlah petani perempuan dan pemuda yang mengikuti penyuluhan non pertanian
		Jumlah unit usaha pengolahan kakao yang dikelola oleh kelompok perempuan
Intervensi 2.8 Pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja	Seluruh petani kakao memiliki kesadaran dalam penerapan K3.	Persentase kelompok yang pernah mendapatkan pelatihan K3
		Persentase petani yang memiliki alat keselamatan kerja
Intervensi 2.9 Sistem pencegahan dan pengawasan pekerja anak	Tidak ada lagi pekerja anak (yaitu yang membahayakan dan menghambat tumbuh kembang).	Persentase keluarga petani yang mendapat edukasi perlindungan anak
		SOP pencegahan dan pengawasan di tingkat komunitas
Intervensi 2.10 Kebijakan kakao lestari	Penetapan kebijakan kakao lestari dalam peraturan di tingkat kabupaten.	Keberadaan regulasi/produk hukum yang mendukung pengembangan kakao lestari
		Rata-rata persentase pembiayaan dana desa bagi pengelolaan kakao lestari

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator
Intervensi 2.11 Asuransi pertanian kakao	Usaha kakao yang terlindungi dari ancaman kegagalan panen.	Persentase petani kakao yang menerima program asuransi pertanian
		Fasilitasi asuransi pertanian

#### Intervensi 2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan

Lahan merupakan salah satu aset sumber daya alam yang utama dalam pengembangan perkebunan. Kejelasan kepemilikan lahan dapat meningkatkan keamanan bisnis perkebunan kakao sekaligus meminimalisasi munculnya konflik lahan. Oleh karena itu, perlu didorong program sertifikasi lahan bagi petani kakao di Luwu Utara. Selain itu, dengan adanya sertifikat lahan, petani dapat lebih mudah mengakses berbagai skema bantuan, termasuk bantuan pembiayaan melalui lembaga keuangan formal.

#### Intervensi 2.2 Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Kabupaten Percontohan di Indonesia untuk Pelayanan Cepat Akses Legalitas Perhutanan Sosial. Setidaknya terdapat 25 desa yang didorong untuk mengelola hutan desa. Hingga tahun 2019, sudah terdapat 13 hutan desa di Luwu Utara yang terdapat di Kecamatan Baebunta, Masamba, Rongkong, dan Sabbang. Optimalisasi pengelolaan perhutanan sosial dapat dilakukan melalui pengusahaan produk kakao. Selain memiliki potensi pasar yang tinggi, masyarakat juga cukup akrab dengan budidaya kakao. Dalam skema perhutanan sosial, penanaman kakao dapat dilakukan dengan sistem agroforestri. Kelompok pemegang izin PS perlu difasilitasi untuk mengadopsi sistem agroforestri kakao yang berkelanjutan dan memiliki profitabilitas tinggi.

#### Intervensi 2.3 Penyuluhan kakao yang tepat sasaran

Penyuluhan yang tidak tepat sasaran dan terbatas merupakan salah satu permasalahan yang dialami semua sektor pertanian maupun perkebunan, termasuk perkebunan kakao di Luwu Utara. Keterbatasan jumlah penyuluh yang kompeten dapat diatasi dengan memberdayakan penyuluh swadaya dan para *cacao doctor* atau petani *champion*. Pemerintah perlu menggandeng mitra pembangunan, lembaga penelitian, maupun universitas untuk meningkatkan kompetensi penyuluh dan petani *champion*.

#### Intervensi 2.4 Pengembangan kelembagaan keuangan petani kakao

Kelembagaan keuangan petani kakao dapat dikembangkan melalui kelompok-kelompok yang sudah terbentuk seperti koperasi, BUMDes, maupun kelompok tani/gabungan kelompok tani. Diperlukan pendataan kelompok yang ada di tingkat desa beserta kegiatan yang dilakukan. Pembinaan terkait pengelolaan keuangan, manajerial, dan kemitraan perlu dilakukan untuk kelompok-kelompok yang ada di tingkat desa. Pemerintah juga dapat menginisiasi kemitraan dengan sektor perbankan maupun lembaga penyedia modal lainnya.

#### Intervensi 2.5 Korporasi petani kakao

Pengembangan korporasi petani diatur dalam Permentan No. 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Korporasi petani didefinisikan sebagai kelembagaan ekonomi petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Skema korporasi petani memungkinkan petani meningkatkan skala ekonomi usaha kakao untuk menjangkau pasar yang lebih besar dan memiliki

daya tawar yang lebih tinggi. Korporasi petani kakao menjadi salah satu *modus operandi* yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan keterbatasan produksi dan kapasitas petani kakao. Selain itu, korporasi petani kakao juga dapat mengembangkan unit usaha yang mendukung usaha tani kakao.

#### Intervensi 2.6 Bantuan peralatan pertanian

Bantuan peralatan pertanian perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas untuk memanfaatkan teknologi maupun peralatan yang diberikan. Selain berasal dari pendanaan APBD, bantuan peralatan pertanian juga dapat diusulkan melalui pendanaan CSR perusahaan. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan dan teknologi juga perlu diberikan untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat guna dan tepat sasaran.

#### Intervensi 2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan dan pemuda dalam usaha tani kakao

Pemberdayaan perempuan dalam usaha tani kakao perlu diarahkan pada kegiatan usaha yang memiliki profitabilitas terjamin, terutama untuk perempuan kepala keluarga. Harapannya, unit usaha tani kakao yang digarap kelompok perempuan mendatangkan keuntungan ekonomi yang signifikan, bukan sekedar sebagai pengisi waktu luang. Kelompok perempuan tani/pengelola unit usaha juga perlu dibekali dengan pelatihan dan dukungan sarana dan prasarana, tidak berbeda dengan kelompok tani yang keanggotaannya umumnya didominasi oleh laki-laki.

#### Intervensi 2.8 Pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu pilar utama dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia. Keselamatan dan kesehatan kerja diatur secara jelas dalam UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP No. 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan beberapa peraturan sektoral lainnya. Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja juga perlu diterapkan di sektor perkebunan. Edukasi dan pengadaan peralatan keselamatan kerja perlu diberikan kepada pelaku usaha perkebunan, termasuk petani kakao.

#### Intervensi 2.9 Sistem pencegahan dan pengawasan pekerja anak

Pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 menyebutkan larangan untuk mempekerjakan anak. Anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Sosialisasi terhadap perlindungan anak dan pengawasan pekerja anak perlu dilakukan hingga tingkat desa. Pengawasan perlu dilakukan melalui kerja sama Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanian, maupun lembaga non pemerintah yang fokus pada perlindungan anak.

#### Intervensi 2.10 Kebijakan kakao lestari

Pengelolaan kakao lestari perlu didukung oleh aspek kebijakan baik kebijakan di tingkat kabupaten maupun desa. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu melalui pengarusutamaan Peta Jalan Kakao Lestari dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Utara serta rencana strategis perangkat daerah terkait. Selain itu, peta jalan kakao lestari juga perlu diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, terutama untuk desa sentra komoditas kakao. Dukungan terhadap pengelolaan kakao lestari dapat dilihat dari jumlah kegiatan pengelolaan kakao lestari di tingkat kabupaten, volume pembiayaan dan penganggaran, serta alokasi dana desa untuk pengelolaan kakao.

#### Intervensi 2.11 Asuransi pertanian kakao

Usaha pertanian maupun perkebunan dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi antara lain kegagalan panen akibat perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, maupun serangan hama/OPT. Untuk menghindari risiko tersebut, pemerintah merancang program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian dengan menjamin petani mendapatkan modal kerja untuk berusaha tani dari klaim asuransi. Hal serupa juga dapat diterapkan untuk perkebunan kakao. Asuransi pertanian dapat meningkatkan ketahanan petani terutama dalam menghadapi dampak perubahan iklim dengan mengalihkan kerukiat akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan hama melalui pihak lain yaitu pertanggung jawaban asuransi.

**Strategi 3 Peningkatan produktivitas dan diversifikasi produk kakao**

Strategi 3 merupakan strategi yang sangat dekat dengan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh petani kakao di Luwu Utara. Saat ini produksi kakao sangat menurun dan tidak adanya opsi produk turunan dari kakao yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Perlu adanya kerja sama untuk membangun kembali peningkatan produksi kakao melalui berbagai peningkatan kapasitas petani dalam menghasilkan kakao dari kondisi lahannya serta pengelolaan produk turunan. Hal-hal tersebut di atas yang selama ini menjadi benang kusut permasalahan pengelolaan kakao di tingkat petani.

*Tabel 4.4 Intervensi, Capaian Dambaan, dan Indikator pada Strategi 3*

<b>Intervensi</b>	<b>Capaian Dambaan</b>	<b>Indikator</b>
Intervensi 3.1 Budidaya kakao dengan penerapan GAP	Kabupaten Luwu Utara menjadi sentra produksi kakao di Indonesia dengan produktivitas dan kualitas produk tinggi dan berkelanjutan	Jumlah kebun sumber benih dan penangkar bibit kakao bersertifikat
		Persentase luas kebun kakao multiklon
		Persentase petani yang menggunakan benih/bibit kakao unggul (bersertifikat)
		Produksi kakao
		Produktivitas kakao
		Jumlah produsen pupuk organik
		Persentase petani kakao yang menggunakan pupuk organik
		Persentase petani yang menerapkan teknik konservasi lahan
		Persentase petani kakao yang menerapkan agroforestri kakao
		Persentase petani yang mendapatkan pelatihan agroforestri kakao
Intervensi 3.2 Akses terhadap sarana dan prasarana pendukung usaha tani kakao	Sarana dan prasarana mudah diakses, tepat guna, berkualitas, tersedia dalam jumlah yang cukup, tepat sasaran, sesuai kebutuhan pasar, dan terpadu untuk mendukung terwujudnya petani mandiri	Jumlah kios pupuk bersubsidi untuk tanaman kakao

Intervensi	Capaian Dambaan	Indikator
Intervensi 3.3 Diversifikasi produk kakao	Produk dan hasil kebun kakao yang beragam, berkualitas, dan menjangkau pasar yang lebih luas (domestik maupun mancanegara) untuk mendukung ketahanan ekonomi petani	Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas petani dalam peningkatan mutu dan pasca panen
		Jumlah petani yang dilatih untuk peningkatan mutu dan pasca panen
		Persentase rata-rata nilai tambah bisnis industri hilir skala kecil
		Persentase volume kakao fermentasi yang diproduksi oleh petani/kelompok tani/ <i>smallholder</i>
		Jumlah jenis produk kakao yang dihasilkan kelompok tani/masyarakat
Intervensi 3.4 Agribisnis kakao	Petani kakao yang mampu menerapkan agribisnis yang kuat dan terintegrasi dari hulu ke hilir, adil, dan menguntungkan semua pihak, transparan, dan kolaboratif.	Jumlah unit usaha produk turunan kakao yang dikelola masyarakat

### Intervensi 3.1 Budidaya kakao dengan penerapan GAP

Produksi kakao Kabupaten Luwu Utara cenderung menurun dari tahun ke tahun. Penurunan kapasitas produksi kakao petani dapat berdampak pada hilangnya pembeli skala besar yang membutuhkan pasokan biji kakao dengan kualitas dan kuantitas yang baik dan stabil. Penerapan *Good Agricultural Practice* atau Praktik Pertanian yang Baik diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kakao Luwu Utara. Selain itu, penerapan GAP juga mendukung petani untuk memperoleh sertifikasi berkelanjutan. Penerapan GAP dilakukan mulai dari tahap persiapan lahan, pembibitan, pemupukan, pemeliharaan tanaman, hingga pemanenan. Penerapan GAP juga melibatkan penggunaan sistem agroforestri.

### Intervensi 3.2 Akses terhadap sarana dan prasarana pendukung usaha tani kakao

Rantai pasok berbagai input pertanian mempengaruhi tingkat keuntungan petani dan kualitas biji kakao yang dihasilkan. Rantai pasok yang panjang mengakibatkan munculnya margin biaya transportasi dan perdagangan yang tinggi sehingga meningkatkan biaya produksi petani. Untuk menekan biaya transportasi dan margin perdagangan, akses terhadap sarana dan prasarana pendukung usaha tani kakao perlu ditingkatkan. Pemerintah perlu memastikan adanya kios/toko pertanian terutama di daerah penghasil produk pertanian dan perkebunan, termasuk kakao. Penyaluran sarana dan prasarana pertanian juga dapat difasilitasi oleh koperasi maupun BUMDes yang ada di desa. BUMDes dapat mengembangkan unit usaha penyewaan alat pertanian maupun penjualan input pertanian seperti pupuk, bibit, dan lain sebagainya. Peningkatan kapasitas petani untuk membangun kebun bibit mandiri juga dapat menjadi langkah untuk meningkatkan akses petani terhadap saprodi.

### Intervensi 3.3 Diversifikasi produk kakao

Saat ini, sebagian besar petani menjual kakao dalam bentuk biji basah maupun biji kering kepada perusahaan pengolah kakao. Perlu dilakukan diversifikasi produk turunan kakao untuk meningkatkan akses pasar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan di tingkat petani yaitu melakukan pengolahan kakao fermentasi. Melalui pengolahan biji kakao petani diharapkan memperoleh imbalan yang lebih tinggi atas nilai tambah yang diberikan. Kemitraan dengan pelaku-pelaku usaha lain, selain perusahaan kakao, juga perlu dilakukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, misalnya untuk pengembangan produk *specialty*. Petani perlu difasilitasi dalam bentuk pelatihan, pemberian bantuan sarana dan prasarana, serta inisiasi kemitraan.

#### Intervensi 3.4 Agribisnis kakao

Pengembangan sentra agribisnis kakao ditujukan untuk mengintegrasikan pengolahan produk kakao di sektor hulu dan sektor hilir. Pengembangan sentra agribisnis memungkinkan pelaku usaha kakao menekan biaya produksi karena pengelolaan yang dilakukan secara terpusat dalam suatu area. Pengembangan agribisnis kakao harus didukung oleh berbagai inovasi produk turunan kakao. Sentra agribisnis kakao juga dapat mengadopsi skema agrowisata kakao sebagai salah satu lini bisnis. Pembangunan sentra agribisnis memerlukan kerja sama antar para pihak baik petani, perusahaan, pemerintah, pusat penelitian/studi kakao, universitas, maupun lembaga swadaya lainnya.

#### Strategi 4 Perbaikan rantai pasok yang berkelanjutan

Strategi perbaikan rantai pasok diperlukan dalam rangka untuk memperluas alternatif pemasaran yang saat ini ada. Strategi ini tidak bermaksud untuk menghilangkan rantai pasok yang saat ini sudah berkembang dan telah meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat. Strategi ini berupaya untuk memberikan keseimbangan baru sehingga seluruh produk petani akan dapat tertampung dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi petani.

Tabel 4.5 Intervensi, capaian dambaan, dan indikator pada Strategi 4

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator
Intervensi 4.1 Pengembangan rantai pasok yang efektif dan integratif	Rantai pasok dengan alternatif kelembagaan yang memiliki SDM berkualitas, mampu memenuhi kebutuhan pasar, transparan, mampu bermitra, dan berpihak pada petani.	Persentase produksi biji dengan kelas mutu I dan II (SNI 2323:2008)
		Jumlah koperasi petani kakao dan BUMDes dengan unit usaha kakao
Intervensi. 4.2 Sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen	Otomatisasi dan digitalisasi sistem pencatatan pertanian sehingga praktis, informatif, dan mudah diakses.	Persentase petani yang melakukan pengarsipan dokumen dan pencatatan usaha tani
Intervensi 4.3 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan	Petani kakao Luwu Utara tersertifikasi dan mendapat pengakuan pengelolaan berkelanjutan serta mendapat	Persentase petani yang memiliki informasi koordinat

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator
	insentif ekonomi yang signifikan.	Persentase petani yang mengikuti sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan

#### Intervensi 4.1 Pengembangan rantai pasok yang efektif dan integratif

Perbaikan rantai nilai dan pasok perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan setiap pelaku usaha kakao, baik petani maupun pelaku usaha lainnya. Sistem rantai nilai komoditas kakao di Luwu Utara diharapkan dapat memberikan petani alternatif penjualan produk kakao. Tidak adanya monopoli penjualan produk kakao diharapkan dapat meningkatkan transparansi pasar. Alternatif penjualan produk kakao dapat dilakukan dengan mendorong masuknya pelaku pasar baru maupun menciptakan produk turunan kakao yang memiliki pasar tertentu yang belum terjangkau saat ini. Pengembangan rantai nilai yang terintegrasi dari hulu ke hilir melibatkan penciptaan industri hilir yang inovatif.

#### Intervensi. 4.2 Sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen

Pencatatan dan pengarsipan dokumen merupakan salah satu bentuk peningkatan kapasitas petani maupun kelompok tani dalam hal manajerial. Sistem pencatatan dan dokumentasi yang baik memudahkan petani untuk mengakses skema bantuan dan pendanaan seperti akses kredit maupun asuransi pertanian. Pencatatan dan pengarsipan dokumen juga memudahkan petani untuk mendapatkan sertifikasi berkelanjutan maupun label ramah lingkungan. Selain itu, kapasitas ini juga memudahkan petani untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan/pembeli.

#### Intervensi 4.3 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan

Berbagai skema sertifikasi berkelanjutan telah ada di Indonesia, baik sertifikasi di tingkat tapak maupun yurisdiksi. Beberapa skema sertifikasi di tingkat yurisdiksi yang sudah dikembangkan seperti Terpercaya oleh Bappenas, SourceUp oleh IDH, Landscale, Kerangka Daya Saing Daerah (KDSD) oleh Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL), dan lain sebagainya. Sertifikasi di tingkat yurisdiksi menjamin produk kakao yang diproduksi pada yurisdiksi tersebut telah dikelola secara berkelanjutan. Skema sertifikasi ini tidak mewajibkan seluruh petani memiliki sertifikasi berkelanjutan. Seiring dengan penerapan skema sertifikasi, diharapkan terdapat insentif yang diperoleh petani/kelompok tani yang sudah mendapatkan sertifikat berkelanjutan.

### Strategi 5 Insentif jasa ekosistem dari kakao berkelanjutan

Strategi 5 berada pada dimensi yang lebih luas dari pengembangan kakao di Kabupaten Luwu Utara. Strategi ini diharapkan menjadi pelengkap dari strategi lain pengelolaan kakao lestari dimana terdapat potensi jasa lingkungan yang dapat digali dalam pengelolaan kakao ini. Upaya lestari yang dibangun dalam peta jalan ini juga perlu dibarengi dengan kolaborasi dengan pihak lain yang mendapatkan keuntungan dari pengelolaan lestari ini di Kabupaten Luwu Utara.

Tabel 4.6 Intervensi, Capaian Dambaan, dan Indikator pada Strategi 5

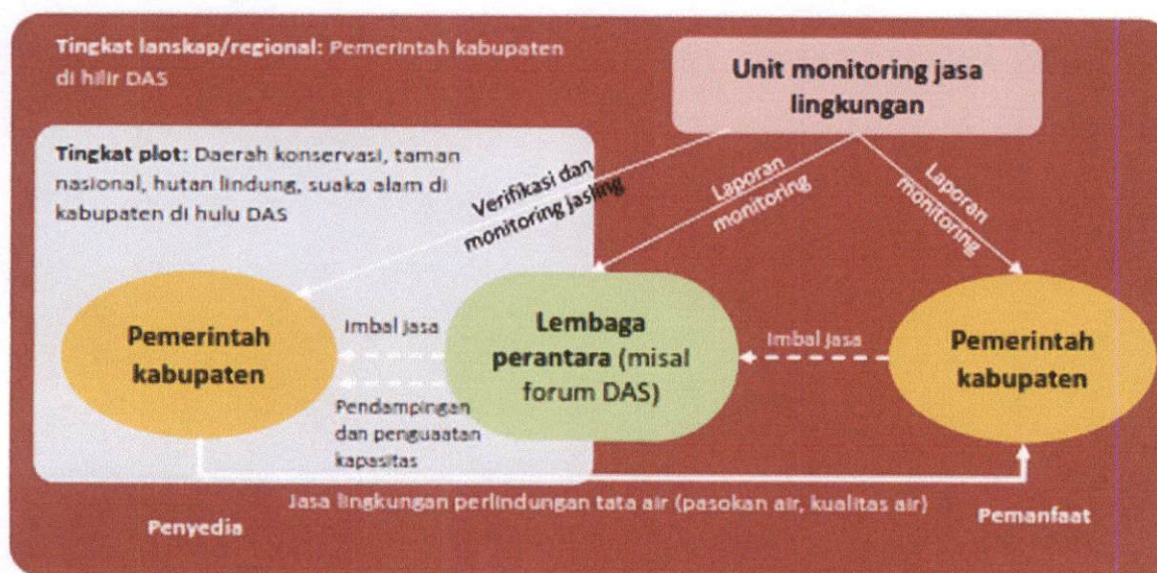
Intervensi	Capaian dambaan	Indikator
	Capaian dambaan:	Indeks Risiko Bencana

Intervensi	Capaian dambaan	Indikator
Intervensi 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) antar daerah berupa Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di tingkat kabupaten untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan stok karbon	Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup yang operasional, berkelanjutan dan terukur melalui TAKE dan kontrak jasa lingkungan hidup berbasis performa	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Debit air sungai
		Volume pembiayaan pemerintah untuk mendukung TAKE dan biaya transfer KIJLH
		Jumlah program terkait pengelolaan jasa lingkungan
Intervensi 5.2 Pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon	Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (PJLH) yang operasional, berkelanjutan, dan terukur melalui kemitraan dengan sektor swasta dan kontrak jasa lingkungan hidup berbasis performa di tingkat kelompok tani, didukung oleh kemitraan publik-perusahaan-LSM.	Jumlah petani peserta PJLH
Intervensi 5.3 Label ramah lingkungan hidup	Pelabelan ramah lingkungan berbasis yurisdiksi untuk produk kakao Luwu Utara maupun turunannya.	Jumlah produk kakao Luwu Utara yang memperoleh label ramah lingkungan hidup
Intervensi 5.4 Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup	Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan dialokasikan untuk pemulihan lahan yang terdegradasi.	Volume dana penanggulangan, pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup
Intervensi 5.5 Penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terdapat penghargaan kinerja untuk perusahaan, kelompok masyarakat, maupun perorangan yang melestarikan lingkungan maupun melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.	Jumlah perusahaan, kelompok masyarakat, maupun perorangan yang mendapatkan penghargaan kinerja di bidang perlindungan lingkungan

Intervensi 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) antar daerah berupa Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di tingkat kabupaten untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan stok karbon

Pengelolaan jasa lingkungan diatur melalui UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 46 tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Berdasarkan PP 46 tahun 2017, kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup (KIJLH) termasuk dalam instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi. Skema KIJLH menggambarkan pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antara pemanfaat dengan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Pada skema KIJLH, pemerintah terlibat didalamnya baik sebagai penyedia maupun pemanfaat jasa lingkungan. Skema KIJLH dapat dilakukan antar daerah kabupaten menggunakan skema Transfer Anggaran berbasis ekologi (TAKE). Skema TAKE dapat dirancang oleh kabupaten penyedia jasa lingkungan seperti DAS, keanekaragaman hayati, maupun stok karbon dengan

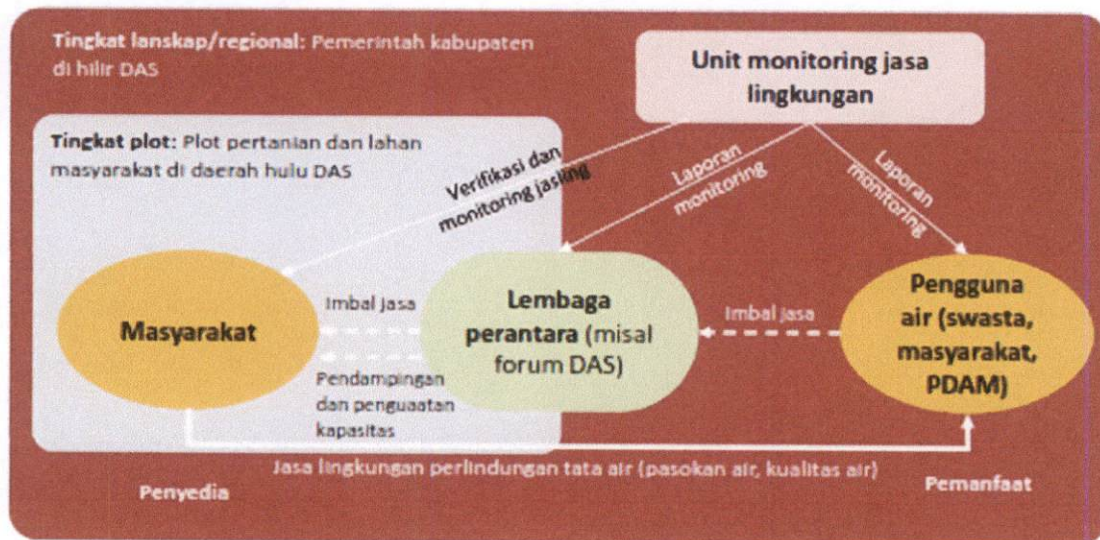
kabupaten pemanfaat jasa lingkungan. Gambar memperlihatkan ilustrasi skema KIHL untuk jasa lingkungan air. Terdapat beberapa daerah yang telah mengadopsi skema TAKE seperti Kab. Jayapura, Nunukan, Bener Meriah, Kubu Raya, Trenggalek, Sigi, dan Siak. Namun, umumnya skema TAKE yang diterapkan yaitu transfer anggaran dari kabupaten ke kecamatan maupun desa.



Gambar 4.9 Ilustrasi Skema TAKE Untuk KIHL Sumber Daya Air (Amaruzaman, S., et al, 2018)

Intervensi 5.2 Pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon

Berdasarkan PP 46 tahun 2017, pembayaran jasa lingkungan hidup (PIJH) merupakan salah satu instrumen ekonomi lingkungan hidup yang menggunakan skema insentif/disinsentif. Skema PJLH melibatkan pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dinilai dengan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup dan penyedia jasa lingkungan hidup melalui perjanjian terkait berbasis kinerja untuk meningkatkan jasa lingkungan hidup. Pada skema ini, tidak ada keterlibatan pemerintah sebagai penyedia maupun pemanfaat jasa lingkungan, namun lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat. Gambar memperlihatkan ilustrasi skema PJLH untuk jasa lingkungan air. Pada skema ini kelompok masyarakat penyedia jasa lingkungan berperan melaksanakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang berkontribusi terhadap penyediaan jasa lingkungan baik tata kelola air, keanekaragaman hayati, maupun peningkatan stok karbon. Adapun masyarakat yang bertindak sebagai pemanfaat berperan dalam pemberian kompensasi atau imbalan bagi penyedia sesuai kinerja penyedia dalam pengelolaan sumber daya alam. Penetapan indikator penilaian yang tepat sangat krusial untuk skema berbasis kinerja seperti KIHL maupun PJLH.



Gambar 4.10 Ilustrasi Pembayaran Jasa Lingkungan Tata Kelola Air (Amaruzaman, S., et al, 2018)

### Intervensi 5.3 Label ramah lingkungan hidup

Sama seperti dua instrumen ekonomi lingkungan hidup sebelumnya, pemberian label ramah lingkungan hidup dimuat dalam PP 46 tahun 2017. Label ramah lingkungan hidup diberikan pemerintah terhadap produk yang diproduksi menggunakan metode yang ramah lingkungan. Adapun kriteria persyaratan perolehan label ramah lingkungan yaitu:

1. Kriteria ramah lingkungan hidup meliputi seluruh aspek lingkungan hidup sepanjang daur hidup produk
2. Kriteria keberlanjutan proses produksi
3. Kriteria keberlanjutan sumber daya alam
4. Kriteria legalitas

Pemberian label ramah lingkungan juga dapat dilakukan dalam skala yurisdiksi, tidak dalam skala produk atau tapak. Beberapa skema penilaian di tingkat nasional maupun internasional telah memfasilitasi penilaian tingkat yurisdiksi seperti Terpercaya oleh Bappenas, Ekolabel, SourceUp oleh IDH, Landscale, dan lain sebagainya.

### Intervensi 5.4 Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup

Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dana penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup digunakan untuk:

- Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada lokasi yang tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya.
- Pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/kerusakan lingkungan yang tidak diketahui sumber dan/atau pelakunya.

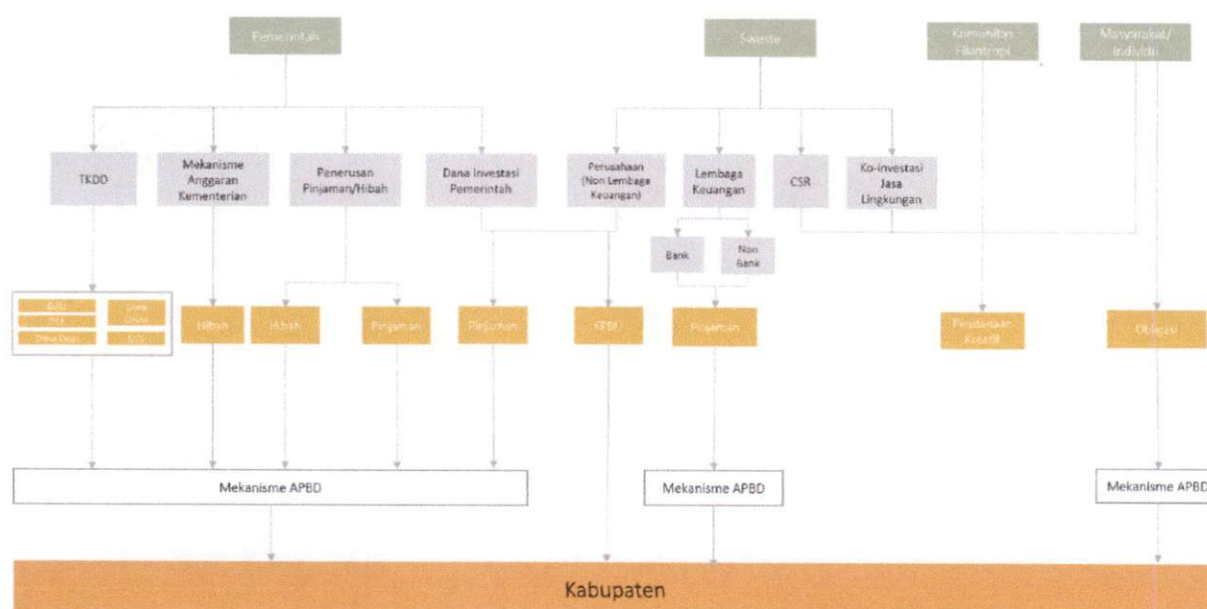
### Intervensi 5.5 Penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu bentuk instrumen ekonomi lingkungan yang menggunakan skema insentif. Penghargaan kinerja dapat

diberikan oleh pemerintah kabupaten terhadap kelompok tani, salah satunya petani kakao, yang telah melakukan pengelolaan lahan/kebun secara berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk organik, penerapan GAP, penggunaan bibit bersertifikat, penggunaan sistem agroforestri, serta tidak melakukan pembukaan lahan di kawasan hutan. Pemerintah kabupaten juga dapat memberikan penghargaan kinerja bagi perusahaan pengelola sumber daya alam yang telah melakukan pengelolaan yang ramah lingkungan dan memberdayakan masyarakat.

#### 4.5 Alternatif Sumber Pendanaan

Pengelolaan kakao lestari membutuhkan interaksi multi pihak dalam implementasi strategi, intervensi, dan aktivitas. Interaksi antar pihak dan sektor menjadi dasar bahwa pendanaan pengelolaan kakao lestari perlu bersumber dari berbagai kanal baik dana pemerintah, swasta, maupun donor. Skema pembiayaan yang dapat diadopsi diilustrasikan pada Gambar 4.11. Kebutuhan pendanaan untuk lima strategi dapat dilihat pada tabel 5.1 sampai 5.5 yang secara keseluruhan mencapai sekitar 210 miliar rupiah.



Gambar 4.11 Opsi Pendanaan Peta Jalan Kakao Lestari

#### 1. APBD Provinsi/Kabupaten/Kota

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

#### 2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

##### a. Dana Transfer Khusus (DTK)

DTK bersumber dari APBN untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DTK terdiri dari DAK fisik dan DAK non fisik. DAK yang terkait dengan kegiatan Pertumbuhan Ekonomi Hijau antara lain: DAK Lingkungan Hidup dan Kehutanan; DAK Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; DAK Industri Kecil dan Menengah (IKM); DAK Pasar; DAK Pertanian; dan DAK Pariwisata.

- b. Dana Insentif Daerah (DID)  
DID dialokasikan kepada daerah tertentu sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat.
  - c. Dana Desa  
Dana Desa dialokasikan secara langsung ke desa melalui perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan. Peraturan mengenai dana desa diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Hibah daerah
- Hibah daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah yang ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian (PP Nomor 2 Tahun 2012). Hibah kepada pemerintah daerah dapat bersumber dari pemerintah (termasuk penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri, dan pinjaman luar negeri); badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
4. Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)
- KPBU berdasarkan Perpres Nomor 38 Tahun 2015 adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak. Penyusunan skema KPBU difokuskan pada kerja sama pengembangan infrastruktur baik infrastruktur ekonomi maupun sosial. Tata cara pelaksanaan KPBU diatur lebih lanjut di Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015.
5. Pinjaman daerah
- Pinjaman daerah adalah seluruh transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (PP Nomor 30 Tahun 2011).
6. Pendanaan Inovatif
- Skema pendanaan inovatif adalah skema yang menitikberatkan pada upaya mencari sumber pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada APBN.
7. Pinjaman Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)
- PINA adalah skema fasilitasi untuk mempercepat investasi swasta dalam membangun proyek strategis nasional dengan sumber pembiayaan dari anggaran non-pemerintah dan didukung sepenuhnya melalui kebijakan pemerintah. Beberapa peraturan yang terkait dengan model pembiayaan ini adalah Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres Nomor 20 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015.
8. Obligasi
- Obligasi daerah dapat menjadi instrumen alternatif bagi kepala daerah dalam pembiayaan pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Permenkeu Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Obligasi Daerah secara lebih rinci dijelaskan dalam

Peraturan OJK (POJK). Selain Obligasi Daerah, POJK yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi hijau adalah POJK mengenai *green bonds* atau Obligasi Hijau yaitu efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan.

#### 9. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2017, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai pendanaan lingkungan hidup yang terdiri dari dana jaminan pemulihan lingkungan hidup, dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, dan dana amanah/bantuan konservasi.

#### 10. Kerja sama dengan swasta

Kerja sama dengan swasta dapat dilakukan melalui KPBU, pinjaman, maupun pendanaan kreatif. Skema kerjasama dapat berupa: (a) *public private partnership* dengan skenario *Build Operate Transfer (BOT)* atau skenario *project financing*; (b) skema investasi swasta yang difasilitasi oleh pemerintah daerah; (c) *Corporate Social Responsibility (CSR)*; dan (d) pembayaran dan ko-investasi jasa lingkungan. Skema pembayaran dan ko-investasi jasa lingkungan dapat diinternalisasikan sebagai bagian dari biaya operasional perusahaan yang dilakukan secara sukarela untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan.

## 5. Rencana Kerja Pelaksanaan

### 5.1 Kelembagaan dan tata kelola

Peta Jalan Kakao Lestari sebagai sebuah rencana pembangunan kakao Kabupaten Luwu Utara yang pelaksanaannya perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak yang terlibat dalam proses pengembangan komoditas kakao. Pemerintah juga perlu mengelola implementasi peta jalan ini secara lebih baik melalui kelembagaan yang memadai dan tata kelola yang terintegrasi. Kelembagaan pengelolaan kakao lestari perlu dirumuskan dan ditegaskan sehingga terdapat unit atau institusi yang secara terus menerus melakukan upaya agar seluruh intervensi dapat diacu dan diimplementasikan. Sejak tahun 2021 Pemerintah Daerah membentuk Kelembagaan untuk mendorong kolaborasi dalam mendorong kebangkitan sektor kakao melalui kelompok kerja yang kemudian disebut sebagai Pokja Kakao Berkelanjutan yang ditetapkan melalui keputusan Bupati. Dalam 2 tahun terakhir, Pokja Kakao telah merumuskan perencanaan kakao secara terpadu dalam bentuk Roadmap atau Peta Jalan Kakao Lestari.

Kelompok Kerja Program Kakao Berkelanjutan untuk tahun 2024 telah dibentuk berdasarkan keputusan Bupati. Kelompok ini bertujuan untuk menumbuhkan komitmen di antara para pemangku kepentingan dan mendistribusikan peran dalam pengembangan kakao berkelanjutan. Tujuan-tujuan kelompok ini meliputi:

Pertama, kelompok ini berupaya membangun komitmen di antara para pemangku kepentingan dan berbagi peran dalam pengembangan kakao berkelanjutan. Dengan berkolaborasi dengan mitra pembangunan dan pelaku industri kakao, mereka bertujuan untuk menyusun peta jalan pengembangan kakao berkelanjutan. Hal ini akan memastikan bahwa berbagai pihak sejajar dan berkontribusi secara efektif menuju tujuan bersama keberlanjutan

Kedua, kelompok ini akan memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten, menyelaraskan program kakao dengan rencana pembangunan daerah. Mereka akan memfasilitasi peningkatan kapasitas petani kakao agar memenuhi standar keberlanjutan, memberikan mereka akses ke pasar global. Selain itu, mereka bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen pengetahuan terkait pengembangan kakao berkelanjutan. Ini mencakup pembuatan portal edukasi, basis data, dan publikasi yang menampilkan kisah sukses dari Luwu Utara.

Mengacu Surat Keputusan Bupati terkait penetapan Kelompok Kerja Kakao Berkelanjutan, tugas kelompok kerja antara lain:

- a. menyusun rencana kerja dalam menyusun peta jalan pembangunan kakao berkelanjutan;
- b. memfasilitasi dialog dan komunikasi multipihak untuk membangun strategi intervensi yang disesuaikan dengan tujuan program dan program pemerintah daerah, termasuk terlibat dalam seleksi penerima manfaat;
- c. menyampaikan dokumen peta jalan pembangunan kakao berkelanjutan kepada Pemerintah Kabupaten untuk diarusutamakan ke dalam perencanaan pembangunan formal;
- d. memberi masukan terhadap laporan kegiatan setiap 4 bulan;
- e. mewakili Kabupaten Luwu Utara untuk berdialog dengan para pihak lintas kabupaten/provinsi dan juga di tingkat nasional;
- f. menyinergikan serta mengintegrasikan peta jalan Pembangunan kakao berkelanjutan dengan program yang berjalan dengan program lainnya yang sedang berlangsung;
- g. melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan penguatan kapasitas petani;
- h. melakukan koordinasi pelaksanaan program ditingkat kabupaten; dan
- i. bersama-sama membangun portal dan aplikasi pengelola pengetahuan berbasis kekayaan pengetahuan lokal tentang kakao berkelanjutan

Kelompok Kerja Kakao Berkelanjutan memiliki struktur yang terdiri dari:

- a. Pembina
- b. Ketua
- c. Wakil Ketua
- d. Bidang:
  - i. Kelembagaan dan Pemberdayaan
  - ii. Budidaya, Konservasi, Riset dan Inovasi
  - iii. Tata Niaga dan Hilirisasi

Setiap bidang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yaitu:

Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan

- a. memfasilitasi Badan Usaha Milik Desa/Bumdesma Bersama dalam Tata Niaga Kakao di Luwu Utara;
- b. memfasilitasi Kerjasama Desa dan Kerjasama Antar Desa terkait tata Niaga Kakao;
- c. memfasilitasi dan mendukung Pemerintahan Desa dalam Pelestarian Kakao;
- d. memastikan pelaksanaan Penerapan K3 di Sektor Kakao;
- e. memastikan Adanya Dukungan Pemenuhan Jaminan Sosial Sektor Kakao;
- f. mendorong Penguatan Kelembagaan Terkait Transfer Pengetahuan dan Praktek Baik Sektor Kakao;
- g. menyusun Rencana Aksi, Penyediaan Perumusan Kebijakan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di sektor Kakao;

- h. mengintegrasikan Persepektif Gender dan Hak Anak Dalam Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Sektor Kakao;
- i. mendorong penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak di sektor kakao;
- j. mendorong Kelompok Usaha Perempuan Kepala Keluarga di sektor Kakao;
- k. memfasilitasi Asosiasi Petani Kakao kabupaten Luwu Utara dalam pelestarian dan tata niaga kakao;
- l. mengoordinasikan Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kelembagaan Petani Kakao;
- m. memfasilitasi Usaha Agribisnis bagi Pemuda Milenial kakao sebagai Profesional;
- n. mendorong pengembangan potensi kakao berbasis desa dengan intergrasi program yang ada; dan
- o. mendorong gemar makan dan minum kakao.

#### Bidang Budidaya, Konservasi, Riset dan Inovasi

- a. memfasilitasi pelaku utama dalam pengadaan saprodi, memfasilitasi Kerjasama Desa dan Kerjasama Antar Desa terkait tata Niaga Kakao;
- b. memfasilitasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditi kakao;
- c. mewujudkan pendampingan aktivitas pemanfaatan kawasan Perhutanan Sosial, Jasa lingkungan dan Tanaman HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)/MPTS;
- d. melakukan monitoring aktivitas pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, dan tanaman HHBK;
- e. mendukung praktek pertanian berkelanjutan (GAP dan GHP);
- f. mendukung peningkatan mutu, quality, dan pengolahan kakao;
- g. mendukung upaya pengelolaan landscape dan praktek konservasi;
- h. mendorong *circular economy* dan biodiversity dalam menunjang peningkatan pendapatan dan lingkungan;
- i. memfasilitasi prasarana dan sarana (infrastruktur) untuk mendukung sentra kakao;
- j. memfasilitasi peningkatan kemampuan teknis pelaku utama dalam pelaksanaan budidaya;
- k. riset dan Inovasi Bidang Budidaya Soil Management serta Hama & Penyakit;
- l. tersedianya Sistem Informasi dan database Kakao Luwu Utara;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi indikator dan program peta jalan/roadmap kakao lestari; dan
- n. mengintegrasikan kegiatan dan program strategi intervensi instansi dan sektor lain dengan peta jalan kakao lestari.

#### Bidang Tata Niaga dan Hilirisasi

- a. mengoordinasikan kepada setiap lembaga terkait untuk terciptanya sistem tata niaga yang transparan, sehat dan berkeadilan;
- b. mendorong terbentuknya industri-industri rumahan, kecil dan menengah untuk mendapatkan nilai tambah produk kakao;
- c. memfasilitasi terbentuknya produk turunan kakao untuk peningkatan nilai tambah produk kakao;
- d. pengembangan pasar: mencari peluang pasar baru dan mengembangkan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produk-produk kakao;
- e. manajemen rantai pasokan : Mengawasi rantai pasokan kakao dari petani ke konsumen akhir, memastikan kualitas dan keberlanjutan produksi;

- f. pengolahan dan pengemasan : Memproses biji kakao menjadi produk-produk seperti bubuk kakao, cokelat, dan produk olahan kakao lainnya. Selain itu, mengemas produk dengan baik untuk mempertahankan kualitas dan daya tariknya;
- g. pemantauan kualitas : Memastikan kualitas biji kakao dan produk-produk yang dihasilkan sesuai dengan standar internasional;
- h. inovasi produk : Berusaha untuk mengembangkan produk-produk baru berbasis kakao atau meningkatkan produk yang sudah ada;
- i. pelatihan dan dukungan petani : Memberikan pelatihan dan dukungan kepada petani kakao untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman mereka;
- j. keberlanjutan : Memastikan praktik pertanian yang berkelanjutan dan etis dalam produksi kakao, serta memperhatikan isu-isu sosial dan lingkungan terkait dengan industri ini;
- k. kebijakan dan regulasi : Memahami dan mematuhi regulasi dan kebijakan terkait perdagangan internasional dan produksi kakao;
- l. riset dan pengembangan : Melakukan penelitian untuk meningkatkan teknologi dan metode dalam industri hilirisasi kakao;
- m. analisis pasar : Mengumpulkan dan menganalisis data pasar untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat; dan
- n. tugas dan tanggung jawab ini penting untuk menjaga keberlanjutan industri kakao dan memastikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi semua pemangku kepentingan, termasuk petani, produsen, dan konsumen.

Untuk memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional dibentuk Sekretariat Kelompok Kerja Program Kakao Berkelanjutan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja;
- b. mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan;
- c. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pokja; dan
- e. mendokumentasikan proses kegiatan Kelompok Kerja Program Kakao Berkelanjutan.

## 5.2 Rencana Kegiatan

Salah satu strategi implementasi Peta Jalan Kakao Lestari yaitu melalui pengarusutamaan kegiatan yang dirumuskan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah merupakan sistematisasi perumusan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan berbasis anggaran, sehingga melalui ini diharapkan berbagai intervensi-program-dan kegiatan dapat dilaksanakan. RTRW, RPJPD, RPJMD, Renstra OPD merupakan beberapa media yang perlu diperhatikan oleh pemerintah menjadi alat bantu menuju kakao lestari di Luwu Utara.

Untuk melengkapi wahana di atas berbagai rencana-rencana pembangunan instansi vertikal juga perlu dikolaborasikan lebih lanjut. Tentu saja prosesnya agak berbeda karena adanya jalur koordinasi yang dilakukan dengan tingkat nasional, akan tetapi masih sangat mungkin adanya kolaborasi secara lebih lanjut. Hal lain yang perlu dilakukan adalah *mainstreaming* ke dalam berbagai rencana usaha dan rencana kegiatan sektor swasta yang juga terlibat secara aktif dan masih dalam pengelolaan kakao di Luwu Utara. Hal ini sangat potensial dilakukan karena berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh

sektor swasta, sehingga upaya koordinasi dan kesepakatan perlu dibangun secara lebih tersistematisasi untuk mendukung peta jalan kakao lestari.

Untuk memudahkan proses pengarusutamaan kegiatan Peta Jalan Kakao Lestari dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan perlu dilakukan pemetaan kegiatan peta jalan berdasarkan nomenklatur program yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900.1.15.5-1317 tahun 2023. Pemetaan kegiatan juga dilakukan terhadap pemangku kepentingan untuk memudahkan identifikasi pelaksana kegiatan. Berikut merupakan penjabaran hasil pemetaan kegiatan Peta Jalan Kakao Lestari untuk kelima strategi.

Tabel 5.1 Rencana kegiatan Strategi 1 Alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Intervensi 1.1 Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten																	
Membuat kajian penetapan kawasan tanaman kakao lestari	Bapperida	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	v					1 dokumen	Rp 300,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
Memetakan tutupan lahan	BPHL	Memetakan tutupan lahan	v					1 laporan	Rp 500,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	
Membangun payung hukum untuk peta jalan kakao lestari	Bapperida	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	v					1 PerBup/ Dokumen	Rp 5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
Membuat regulasi untuk menambah luas lahan kakao lestari sebagai bagian dari LP2B	Distan	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	v					1 PerBup/ Dokumen	Rp 5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	
Menyusun sistem informasi database terkait dengan pengembangan kakao di Luwu Utara	Diskominfo, mitra pembangunan, perguruan tinggi, NGO, perusahaan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	v	v	v	v	v	1 Unit	Rp 45,000,000	1 Unit	Rp 45,000,000	1 Unit	Rp 40,000,000	1 Unit	Rp 35,000,000	1 Unit	Rp 30,000,000
Mengembangkan Sistem Informasi Geografis kakao	Diskominfo, mitra pembangun	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	v	v	v	v	v	1 Unit	Rp 45,000,000	1 Unit	Rp 45,000,000	1 Unit	Rp 40,000,000	1 Unit	Rp 35,000,000	1 Unit	Rp 30,000,000
Pelatihan satu data kakao berbasis desa	Distan/Diskomif o	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		v	v	v	v	0	0	1 dokumen	Rp 300,000,000.00	1 dokumen	Rp 375,000,000.00	1 dokumen	450,000,000.00	1 dokumen	525,000,000.00
Melakukan validasi luas data existing kakao	Distan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	0	5 dokumen	Rp 250,000,000.00	5 dokumen	Rp 300,000,000.00	5 dokumen	Rp 350,000,000.00	5 dokumen	Rp 400,000,000.00
Memetakan kondisi eksisting lahan kakao luwu utara	Distan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	0	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 75,000,000.00	1 dokumen	Rp 100,000,000.00	1 dokumen	Rp 125,000,000.00
Memetakan potensi pengembangan lahan kakao sesuai	DPUTRKP2	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang		v		v				1 dokumen	Rp250,000,000			1 dokumen	350000000		

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
peruntukan ruang dan kesesuaian lahan																	
Menyusun turunan peta jalan kakao untuk lima tahun (jangka menengah) dan satu tahun (jangka pendek)	Bappelitbangda /Distan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		v	v	v	v	0	Rp -	6 dokumen	Rp 25,000,000.00	6 dokumen	Rp 30,000,000.00	6 dokumen	Rp 35,000,000.00	4 dokumen	Rp 30,000,000.00
Melakukan studi potensi kakao di Perhutanan sosial	KPH, perguruan tinggi, mitra pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	v	v				3 PS	Rp 300,000,000	4 PS	Rp 400,000,000.00	0	0	0	0	0	0
Membangun kakao agroforestri sebagai alternatif pendapatan berganda	Distan-KPH	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	v	v				150 ha	Rp 3,900,000,000	600 ha	Rp 15,600,000,000.00	0	0	0	0	0	0
	Distan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	50 ha	Rp 1,000,000,000.00	50 ha	Rp 1,250,000,000.00	50 ha	Rp 1,500,000,000.00	40 ha	Rp 1,750,000,000.00
Membangun panduan GAP kakao pada area perhutanan sosial	KPH	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	v	v				3 PS	Rp 75,000,000	4 PS	Rp 100,000,000.00	0	0	0	0	0	0
	Distan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v				0	Rp -	1 dokumen	Rp 10,000,000.00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
<b>Intervensi 1.2 Alokasi peremajaan lahan kakao</b>																	
Memetakan kelas umur kakao	Distan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	v	v	v	v	v	1 dokumen	Rp 5,000,000.00	5 dokumen	Rp 25,000,000.00	5 dokumen	Rp 25,000,000.00	5 dokumen	Rp 25,000,000.00	4 dokumen	Rp 20,000,000.00
Identifikasi tanaman tua dan tanaman rusak	Distan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	v	v	v	v	v	1 dokumen	Rp 5,000,000.00	5 dokumen	Rp 25,000,000.00	5 dokumen	Rp 25,000,000.00	5 dokumen	Rp 25,000,000.00	4 dokumen	Rp 20,000,000.00
Identifikasi sambung pucuk atau samping kakao	Distan	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang		v	v	v	v	0	Rp -	5 dokumen	Rp 25,000,000.00	5 dokumen	Rp 25,000,000.00	5 dokumen	Rp 25,000,000.00	4 dokumen	Rp 20,000,000.00
Memetakan lahan peremajaan kakao	Distan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00
Membangun konsep agroforestri di sekitar kawasan terbatas	Distan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	10 ha	Rp 200,000,000.00	10 ha	Rp 250,000,000.00	10 ha	Rp 300,000,000.00	10 ha	Rp 350,000,000.00
Pembuatan demoplot percobaan	Distan, mitra pembangunan,	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan	v	v	v	v	v	3	Rp 600,000,000	15 unit	Rp 2,550,000,000.00	15 unit	Rp 375,000,000.00	15 unit	Rp 450,000,000.00	15 UNIT	Rp 525,000,000.00

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
	NGO, perguruan tinggi, perusahaan	Prasarana Penyuluhan Pertanian															
Perluasan memperhatikan kemiringan dan upaya intervensinya	Distan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	15 ha	Rp 300,000,000.00	10 ha	Rp 250,000,000.00	5 ha	Rp 125,000,000.00	0	Rp -
Peningkatan alokasi anggaran kakao	Bapperida	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	v	v	v	v	v	1 dokumen	Rp 5,000,000.00	1 dokumen	Rp 5,000,000.00	1 dokumen	Rp 5,000,000.00	1 dokumen	Rp 5,000,000.00	1 dokumen	Rp 5,000,000.00
Penyusunan pedoman peremajaan lahan	Distan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	1 dokumen	Rp 10,000,000.00	1 dokumen	Rp 20,000,000.00	1 dokumen	Rp 30,000,000.00	1 dokumen	Rp 40,000,000.00
Penyuluhan petani terkait peremajaan	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, perguruan tinggi, perusahaan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	300 unit	Rp 2,250,000,000.00	300 unit	Rp 2,550,000,000.00	300 unit	Rp 2,850,000,000.00	300 unit	Rp 3,150,000,000.00
Penyuluhan/pemberdayaan masyarakat	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, perguruan tinggi, perusahaan, NGO, mitra pembangunan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	300 unit	Rp 1,125,000,000.00	300 unit	Rp 1,275,000,000.00	300 unit	Rp 1,425,000,000.00	300 unit	Rp 1,575,000,000.00
<b>Intervensi 1.3 Perluasan terbatas kebun kakao</b>																	
Perluasan memperhatikan kemiringan dan upaya intervensinya	Distan	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	100 ha	Rp 2,000,000,000.00	50 ha	Rp 1,000,000,000.00	25 ha	Rp 500,000,000.00	10 ha	Rp 200,000,000.00
Membangun konsep agroforestri di sekitar kawasan terbatas	Distan, mitra pembangunan, perguruan tinggi	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	100 ha	Rp 2,000,000,000.00	50 ha	Rp 1,000,000,000.00	25 ha	Rp 500,000,000.00	10 ha	Rp 200,000,000.00
Mengidentifikasi kelompok tani kakao	Distan, perusahaan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	1 dokumen	Rp 75,000,000.00	1 dokumen	Rp 90,000,000.00	1 dokumen	Rp 105,000,000.00	1 dokumen	Rp 120,000,000.00
Pembuatan demoplot percontohan	Distan, perusahaan, mitra pembangunan, perguruan tinggi, NGO	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	4 unit	Rp 100,000,000.00	4 unit	Rp 120,000,000.00	4 unit	Rp 140,000,000.00	4 unit	Rp 160,000,000.00
Memberikan bantuan bibit kakao pada area hutan adat	DLH/KPH	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait	v	v				200 unit	Rp 150,000,000.00	200 unit	Rp 150,000,000.00	0	0	0	0	0	0

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
		dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota															
Memberikan insentif bibit kakao pada area hutan adat	Bappelitbangda/D LH	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	v	v	v	v	v	200 unit	Rp 150,000,000.00	200 unit	Rp 150,000,000.00	200 unit	Rp 150,000,000.00	200 unit	Rp 150,000,000.00	200 unit	Rp 150,000,000.00
Penyuluhan/pemberdayaan Masyarakat	Distan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	200 unit	Rp 150,000,000.00	300 unit	Rp 262,500,000.00	400 unit	Rp 400,000,000.00	500 unit	Rp 562,500,000.00
Mengintervensi bantuan bibit dan sarpras kakao	Distan, perusahaan, mitra pembangunan, perguruan tinggi, NGO	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		v	v	v	v	0	Rp -	1 laporan	Rp 47,000,000.00	1 laporan	Rp 50,000,000.00	1 laporan	Rp 47,000,000.00	1 laporan	Rp 47,000,000.00
<b>Intervensi 1.4 Pengembangan agroforestri kakao</b>																	
Memetakan luas kebun agroforestri kakao	Distan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		v	v	v	v	1 dokumen	Rp 50,000,000	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00
Penyuluhan kesesuaian lahan untuk budidaya kakao	Distan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	200 unit	Rp 150,000,000.00	300 unit	Rp 262,500,000.00	400 unit	Rp 400,000,000.00	500 unit	Rp 562,500,000.00
Memperbarui peraturan daerah tentang penetapan kawasan untuk kakao lestari	Bapperida	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		v						1 dokumen	Rp 50,000,000	0	0	0	0	0	0
Menyusun regulasi/kebijakan terkait perlindungan kakao berkelanjutan	Bapperida	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	v	v				1 dokumen	Rp 50,000,000	1 dokumen	Rp 50,000,000	0	0	0	0	0	0
Melakukan GAP untuk meningkatkan produktivitas kakao	Distan, perusahaan, NGO, mitra pembangunan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v			200 unit	Rp 150,000,000.00	300 unit	Rp 225,000,000.00	400 unit	Rp 300,000,000.00	500 unit	Rp 375,000,000.00
Menyusun kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi data kakao lestari	Diskominfo	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	v	v	v	v	v	1 unit	Rp 35,000,000	1 unit	Rp 35,000,000	1 unit	Rp 35,000,000	1 unit	Rp 30,000,000	1 unit	Rp 30,000,000
Membangun lokasi percontohan/demplot agroforestri kakao	Distan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	v	v	v			0	Rp -	4 unit	Rp 80,000,000.00	4 unit	Rp 100,000,000.00	4 unit	Rp 120,000,000.00	4 unit	Rp 140,000,000.00

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Melakukan penelitian komoditas yang cocok dengan kakao	Bapperida, perguruan tinggi, lembaga penelitian	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	v	v				1 dokumen	Rp 300,000,000	1 dokumen	Rp 300,000,000	0	0	0	0	0	0
Memberikan bantuan bibit tanaman non kakao	Distan, perusahaan, mitra pembanguan, NGO	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	v	v	v	v	v	0	Rp -	1 laporan	Rp 3,000,000,00 0.00	1 laporan	Rp 3,000,000,000. 00	1 laporan	Rp 3,000,000,000.0 0	1 laporan	Rp 3,000,000,000. .00
Melakukan kunjungan belajar ke lokasi yang berhasil mengembangkan kakao agroforestri	Distan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	v	v	v	v	v	0	Rp -	50 unit	Rp 400,000,000. 00	50 unit	Rp 400,000,000.0 0	50 unit	Rp 400,000,000.00	50 unit	Rp 400,000,000.0 0
Penyebaran informasi agroforestri (mempublikasi seluruh intervensi)	Distan, mitra pembangunan, NGO, perguruan tinggi	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	5 dokumen	Rp 50,000,000.0 0	5 dokumen	Rp 60,000,000.00	5 dokumen	Rp 75,000,000.00	5 dokumen	Rp 85,000,000.00
Pengembangan HHBK di Agroforestri kakao sebagai pendidikan dan wisata	KPH, perguruan tinggi	Laporan Riset Dasar Bidang Fokus Pangan-Pertanian		v						1 dokumen	Rp 300,000,000	0	0	0	0	0	0
Identifikasi penentuan sistem tanam pada lahan kakao	Distan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	1 dokumen	Rp 100,000,000. 00	1 dokumen	Rp 150,000,000.0 0	1 dokumen	Rp 200,000,000.00	1 dokumen	Rp 250,000,000.0 0
Penentuan lokasi sistem pengembangan sistem agroforestri	DPUTRKP2	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		v	v	v	v			1 dokumen	Rp 300,000,000	1 dokumen	Rp 400,000,000	1 dokumen	Rp 300,000,000	1 dokumen	Rp 250,000,000
Memetakan petani agroforestri kakao	Distan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	1 dokumen	Rp 50,000,000.0 0	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00
Pemberian insentif bagi pemilik lahan kakao dalam kawasan kakao lestari	Distan, perusahaan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	v	v	v	v	v	1 unit	Rp 35,000,000	1 unit	Rp 35,000,000	1 unit	Rp 35,000,000	1 unit	Rp 30,000,000	1 unit	Rp 30,000,000

Tabel 5.2 Rencana kegiatan Strategi 2 Meningkatkan akses masyarakat terutama petani kakao terhadap modal penghidupan

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Intervensi 2.1 Kemudahan akses sertifikasi lahan																	
Mengidentifikasi petani yang belum memiliki sertifikat lahan	BPN	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	v	v	v	v	v	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00
Melakukan studi atau kajian tentang peraturan kepemilikan dan penggunaan lahan	BPN, perguruan tinggi, mitra pembangunan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		v				0		1 laporan	Rp 300,000,000.00	0	0	0	0	0	
Melakukan studi atau kajian kepemilikan lahan oleh petani kakao perempuan	Distan/DP3A	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		v	v	v	v	0		1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00
	Distan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 60,000,000.00	1 dokumen	Rp 70,000,000.00	1 dokumen	Rp 80,000,000.00
Menyusun program sertifikasi yang terintegrasi ke dalam program peremajaan lahan kakao	BPN	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v				0	Rp -	1 dokumen	Rp 25,000,000.00	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
Melakukan sosialisasi proses sertifikasi kepemilikan lahan/kebun	BPN	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	v	v	v	v	v	100 orang	Rp 250,000,000.00	100 orang	Rp 250,000,000.00	100 orang	Rp 250,000,000.00	100 orang	Rp 250,000,000.00	100 orang	Rp 250,000,000.00
Menyusun kebijakan yang mendorong proses sertifikasi lahan kakao	Bapperida	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan			v		v	0		0	0	1 dokumen	Rp 70,000,000.00	0	0	1 dokumen	Rp 70,000,000.00
Edukasi dan pendampingan dalam mengurus sertifikasi lahan	BPN	Layanan Sosialisasi Berskala Sedang			v		v	1 unit	Rp 400,000,000.00	0	0	1 unit	Rp 400,000,000.00	0	0	1 unit	Rp 400,000,000.00
Intervensi 2.2 Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao																	
Melakukan studi atau kajian tentang perhutanan sosial untuk agroforestri kakao	KPH, perguruan tinggi, lembaga penelitian, NGO	Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan Pangan	v	v				1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	0	0	0	0	0	0
Pengembangan opsi model bisnis perhutanan sosial	KPH, perusahaan, mitra	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			v	v		0	0	0	0	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	1 dokumen	Rp 50,000,000.00	0	0

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
	pembangunan, NGO																
Membangun sistem informasi perhutanan sosial dengan melibatkan perempuan dan laki-laki	Bapperida	Pengelolaan pusat data pemerintah daerah		v		v		0	0	1 unit	Rp 250,000,000.00	0	0	1 unit	Rp 350,000,000.00	0	0
Membentuk kelompok perempuan untuk melestarikan perhutanan sosial	KPH, NGO, mitra pembangunan, perusahaan	Pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat		v		v		0	0	100 orang	Rp 250,000,000.00	0	0	100 orang	Rp 350,000,000.00	0	0
Pendampingan untuk pelestarian lokasi perhutanan sosial	KPH, NGO, mitra pembangunan, perusahaan	Pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat		v		v		0	0	100 orang	Rp 250,000,000.00	0	0	100 orang	Rp 350,000,000.00	0	0
Intervensi 2.3 Penyuluhan kakao yang tepat sasaran																	
Pengembangan modul penyuluhan untuk praktik pertanian kakao yang baik	Distan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, mitra pembangunan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	1 dokumen	Rp 100,000,000.00	1 dokumen	Rp 125,000,000.00	1 dokumen	Rp 150,000,000.00	1 dokumen	Rp 175,000,000.00
Penyuluhan berbasis kelompok tani	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, perguruan tinggi, mitra pembangunan, NGO	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	300 unit	Rp 1,125,000,000.00	300 unit	Rp 13,125,000,000.00	400 unit	Rp 2,000,000,000.00	500 unit	Rp 375,000,000.00
Pemantauan kegiatan penyuluhan untuk komoditas kakao	Distan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	15 unit per tahun	Rp 375,000,000.00	15 unit per tahun	Rp 562,500,000.00	15 unit per tahun	Rp 750,000,000.00	15 unit per tahun	Rp 937,500,000.00
Program magang untuk penyuluh swadaya	Distan, perguruan tinggi	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	30 orang	Rp 300,000,000.00	30 orang	Rp 450,000,000.00	30 orang	Rp 600,000,000.00	30 orang	Rp 750,000,000.00
Intervensi 2.4 Pengembangan kelembagaan keuangan petani kakao																	

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Kajian skema microfinance yang sesuai dengan karakteristik masyarakat	DP2KUKM, perguruan tinggi, koperasi, mitra pembedugnan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		v				0	0	1 dokumen	Rp 100.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembentukan kelompok untuk pembiayaan (dengan sistem tanggung renteng)	DP2KUKM, mitra pembedugnan	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani		v		v		0	0	10 unit per tahun	Rp 300.000.000,00			10 unit per tahun	Rp 300.000.000,00		
Harmonisasi kebijakan yang terkait dengan kelembagaan keuangan petani kakao	DP2KUKM	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		v	v	v	v	0	0	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 50.000.000,00
Pembentukan Kelompok Usaha/Bisnis VSLA/ Arisan kelompok tani	DP2KUKM, mitra pembedugnan, koperasi, NGO	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani		v	v	v	v	0	0	100 orang	Rp 100.000.000,00	100 orang	Rp 100.000.000,00	100 orang	Rp 100.000.000,00	100 orang	Rp 100.000.000,00
Intervensi 2.5 Bantuan peralatan pertanian																	
Kerjasama dengan universitas terkait pengembangan teknologi usaha tani kakao	Distan, perguruan tinggi	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	5 dokumen	Rp 25.000.000,00	5 dokumen	Rp 30.000.000,00	5 dokumen	Rp 37.500.000,00	3 dokumen	Rp 30.000.000,00
Kerjasama dengan perusahaan untuk program magang di perusahaan kakao	Distan, perusahaan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v	v	v		0	0	5 dokumen	Rp 25.000.000,00	5 dokumen	Rp 30.000.000,00	5 dokumen	Rp 37.500.000,00	3 dokumen	Rp 30.000.000,00
Studi atau kajian teknologi tepat guna untuk usaha tani kakao	Distan, perguruan tinggi, NGO, kelompok tani, asosiasi	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		v	v	v	v	0	0	1 dokumen	Rp 200.000.000,00	1 dokumen	Rp 200.000.000,00	1 dokumen	Rp 200.000.000,00	1 dokumen	Rp 200.000.000,00
Penyusunan kurikulum untuk SMK dan politeknik dengan tema kakao	Disdik, perguruan tinggi, NGO, asosiasi	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		v				0	0	1 dokumen	Rp 200.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Intervensi 2.6 Korporasi petani kakao																	
Perencanaan pembentukan korporasi petani kakao	DP2KUKM, asosiasi, kelompok tani, NGO, koperasi	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani		v	v	v		0	0	5 unit	Rp 37.500.000,00	5 unit	Rp 43.750.000,00	5 unit	Rp 50.000.000,00	0	Rp -
Studi atau kajian rencana usaha dan pemasaran	DP2KUKM, perguruan tinggi, mitra pembanguana	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		v		v		0	0	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	0	0	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	0	0

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
	n, perusahaan																
Pembagian peran untuk mengembangkan korporasi petani kakao	DP2KUKM asosiasi, kelompok tani, NGO, koperasi	Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok		v	v	v		0	0	5 unit	Rp 37,500,000.00	5 unit	Rp 43,750,000.00	5 unit	Rp 50,000,000.00	0	Rp -
Kemitraan dan integrasi dengan BUMDesma	DPMD	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		v				150 dokumen	Rp 40,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelatihan dan pendampingan bisnis	DP2KUKM, asosiasi, perusahaan, mitra pembangunan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	v	v	v	v	v	20 UMKM	Rp 150,000,000	30 orang	Rp 300,000,000.00	30 orang	Rp 300,000,000.00	30 orang	Rp 300,000,000.00	30 orang	Rp 300,000,000.00
Memfasilitasi keterhubungan dengan pasar ekspor	DP2KUKM, perusahaan, mitra pembangunan	Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	v		v		v	5 UMKM	Rp 100,000,000			30 orang	Rp 300,000,000.00			30 orang	Rp 300,000,000.00
Membangun sistem pemasaran kolektif	DP2KUKM, perusahaan, mitra pembangunan, koperasi	Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	v	v	v	v	v	20 UMKM	Rp 150,000,000	5 unit	Rp 50,000,000.00	5 unit	Rp 50,000,000.00	5 unit	Rp 50,000,000.00	5 unit	Rp 50,000,000.00
Pendampingan untuk mengakses modal usaha	DPMD, perusahaan, mitra pembangunan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		v	v	v	v	0	0	60 dokumen	Rp 40,000,000.00	60 dokumen	Rp 40,000,000.00	60 dokumen	Rp 40,000,000.00	60 dokumen	Rp 40,000,000.00
Intervensi 2.7 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan																	
Peningkatan peilibatan perempuan dalam kegiatan desa	DPMD, mitra pembangunan, NGO	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	v	v	v	v	v	1 dokumen	Rp 70.000.000,00	1 dokumen	Rp 70.000.000,00	1 dokumen	Rp 70.000.000,00	1 dokumen	Rp 70.000.000,00	1 dokumen	Rp 70.000.000,00

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Pemberdayaan perempuan kepala keluarga	DPMD, mitra pembangun, NGO	Fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	v	v	v	v	v	1 paket	Rp 131.250.000,00	1 paket	Rp 131.250.000,00	1 paket	Rp 131.250.000,00	1 paket	Rp 131.250.000,00	1 paket	Rp 131.250.000,00
Kajian analisis gap gender di komunitas kakao	DP3A, perguruan tinggi, lembaga penelitian, mitra pembangunan, NGO	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	v	v	v			1 dokumen	Rp 100.000.000,00	1 dokumen	Rp 100.000.000,00	1 dokumen	Rp 100.000.000,00	0	0	0	0
Penyusunan panduan pelibatan dan pemberdayaan perempuan dalam usaha tani kakao	Distan, DP3A, perguruan tinggi, lembaga penelitian, mitra pembangunan, NGO, asosiasi	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			v	v		0	0	0	0	1 dokumen	Rp 100.000.000,00	1 dokumen	Rp 100.000.000,00	0	0
Pelibatan perempuan dalam setiap bagian usaha tani kakao	Distan, mitra pembangunan, NGO, perusahaan, koperasi, asosiasi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	100 unit	Rp 100.000.000,00	100 unit	Rp 500.000.000,00	100 unit	Rp 500.000.000,00	100 unit	Rp 850.000.000,00
Penyuluhan usaha tani kakao untuk perempuan	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, perusahaan, NGO, asosiasi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	100 unit	Rp 375.000.000,00	100 unit	Rp 500.000.000,00	100 unit	Rp 500.000.000,00	100 unit	Rp 850.000.000,00
Pembentukan kelompok wanita tani (KWT) kakao	Distan, mitra pembangunan, perusahaan, NGO, asosiasi	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	100 unit	Rp 100.000.000,00	100 unit	Rp 150.000.000,00	100 unit	Rp 200.000.000,00	100 unit	Rp 250.000.000,00
Optimalisasi peran perempuan dalam manajemen dan hillirisasi usaha kakao	DPMD, mitra pembangunan, NGO, perusahaan, koperasi, asosiasi	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	v	v	v	v	v	15 laporan	Rp 20.000.000,00	15 laporan	Rp 40.000.000,00	15 laporan	Rp 80.000.000,00	15 laporan	Rp 120.000.000,00	15 laporan	Rp 150.000.000,00
Intervensi 2.8 Pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja																	

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP) K3 untuk pertanian kakao	Disnakertrans	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	v	v	v	v	v	4 Dokumen	Rp 51,000,000	4 Dokumen	Rp 51,000,000.00	4 Dokumen	Rp 51,000,000.00	4 Dokumen	Rp 51,000,000.00	4 Dokumen	Rp 51,000,000.00
Sosialisasi K3 untuk petani kakao	Disnakertrans	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	v	v	v	v	v	7 Kecamatan	Rp 80,500,000	7 Kecamatan	Rp 80,500,000.00	7 Kecamatan	Rp 161,000,000.00	7 Kecamatan	Rp 161,000,000.00	7 Kecamatan	Rp 161,000,000.00
Pemberian bantuan peralatan keselamatan kerja	Disnakertrans, perusahaan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	v	v	v	v	v	100 unit	Rp 500,000,000.00	14 Paket	Rp 113,050,000.00	14 Paket	Rp 113,050,000.00	28 Paket	Rp 226,100,000.00	28 Paket	Rp 226,100,000.00
Pelatihan K3 bagi petani kakao	Disnakertrans, perusahaan, mitra pembangunan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	v	v	v	v	v	100 Petani	Rp 234,500,000	100 Petani	Rp 234,500,000.00	100 Petani	Rp 234,500,000.00	200 Petani	Rp 469,000,000.00	200 Petani	Rp 469,000,000.00
Intervensi 2.9 Sistem pencegahan dan pengawasan pekerja anak																	
Pembentukan model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) pada tingkat desa	DP3A, mitra pambanugnan	Penyedia layanan pengaduan masyarakat bagi anak yg memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	v	v	v	v	v	25 desa	Rp 108.000.000,00	25 desa	Rp 108.000.000,00	25 desa	Rp 108.000.000,00	25 desa	Rp 108.000.000,00	25 desa	Rp 108.000.000,00
Pelatihan bagi kader atau pemangku kepentingan tentang pekerja anak	DP3A, mitra pambanugnan	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa dari kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), lembaga adat, desa/kelurahan, dan masyarakat hukum adat.	v	v	v	v	v	50 lembaga	Rp 50.000.000,00	50 lembaga	Rp 70.000.000,00	50 lembaga	Rp 100.000.000,00	50 lembaga	Rp 150.000.000,00	50 lembaga	Rp 200.000.000,00
Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota Sub kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota	DP3A, mitra pambanugnan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/kota Sub kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota		v				0	0	70 orang	Rp 330.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Seminar peningkatan peran ibu/keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak	DP3A, mitra pmbanugnan	Seminar peningkatan peran ibu/keluarga dalam pendidikan dan pengasuhan anak	v	v	v	v	v	250 orang	Rp 250.000.000,00	250 orang	Rp 250.000.000,00	250 orang	Rp 250.000.000,00	250 orang	Rp 250.000.000,00	250 orang	Rp 250.000.000,00
Edukasi layanan PUSPAGA	DP3A, mitra pmbanugnan	Edukasi layanan PUSPAGA	v	v	v	v	v	50 orang	Rp 50.000.000,00	50 orang	Rp 50.000.000,00	50 orang	Rp 50.000.000,00	50 orang	Rp 50.000.000,00	50 orang	Rp 50.000.000,00
Sosialisasi tentang pekerja anak untuk petani kakao	DP3A, mitra pmbanugnan, perusahaan	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	v	v	v	v	v	1 kegiatan	Rp 75.000.000,00	1 kegiatan	Rp 75.000.000,00	1 kegiatan	Rp 75.000.000,00	1 kegiatan	Rp 75.000.000,00	1 kegiatan	Rp 75.000.000,00
Penyuluhan pekerja anak	Disnakertrans, mitra pmbanugnan, NGO, asosiasi	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak	v	v	v	v	v	7 Kec.	Rp 124,600,000	7 Kec.	Rp 124,600,000	7 Kec.	Rp 124,600,000	7 Kec.	Rp 124,600,000	7 Kec.	Rp 124,600,000
Pengembangan sistem yang PATBM dengan dukungan anggaran daerah dan desa	DPMD, mitra pmbanguunan	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LP M dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	v	v	v	v	v	40 Dokumen	Rp 40,000,000	40 Dokumen	Rp 40,000,000	40 Dokumen	Rp 40,000,000	40 Dokumen	Rp 40,000,000	40 Dokumen	Rp 40,000,000
Pengawasan dan remediasi pekerja anak di lokal desa sampai ke kabupaten	Disnakertrans, mitra pmbanugnan, NGO, perusahaan, asosiasi	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				v	v	0	0	0	0	0	0	1 laporan	Rp 75.000.000,00	1 sistem	Rp 300.000.000,00
Memantau dan mengevaluasi sistem pencegahan pekerja anak	Disnakertrans	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	v	v	v	v	v	1 laporan	Rp 200,000,000,00	1 laporan	Rp 200,000,000,00	1 laporan	Rp 200,000,000,00	1 laporan	Rp 200,000,000,00	1 laporan	Rp 200,000,000,00
Intervensi 2.10 Kebijakan kakao lestari																	
Melakukan studi atau kajian tentang kebijakan kakao lestari	Bapperida, perguruan tinggi	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	v	v				1 dokumen	Rp 200,000,000	1 dokumen	Rp 200,000,000	0	0	0	0	0	0

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Penguatan kelompok kerja kakao lestari untuk penyusunan kebijakan	Bapperida	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		v										1 dokumen	Rp 320.000.000,00		
Integrasi dengan peta jalan kakao lestari	Bapperida	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	v					1 Produk Hukum	Rp 75,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Integrasi dengan kebijakan replanting dan sertifikasi	Distan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian			v			0	0	0	0	1 dokumen	Rp 10,000,000.00	0	0	0	0
Alokasi pembiayaan untuk program kakao lestari	Bapperida	Sub kegiatan koordiansi penyusunan dokumen perencanaan bidang utnuk penyusunan dokumen RPJMD, RPJPD, RKPDP.	v	v				1 laporan	Rp 85,910,000	1 laporan	Rp 85,910,000	0	0	0	0	0	0
Sub kegiatan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang.	Bapperida	Sub kegiatan Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang.	v					1 laporan	Rp 26,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang	Bapperida	Sub kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang	v	v	v	v	v	1 laporan	Rp 49,000,000	1 laporan	Rp 59,000,000	1 laporan	Rp 70,000,000	1 laporan	Rp 75,000,000	1 laporan	Rp 100,000,000
Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	Bapperida	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang (RPJPD, RPJMD, RKPDP)	v	v	v	v	v	1 laporan	Rp 133,100,000	1 laporan	Rp 153,100,000	1 laporan	Rp 173,100,000	1 laporan	Rp 183,100,000	1 laporan	Rp 233,100,000
Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Bapperida	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	v	v	v	v	v	1 laporan	Rp 70,180,000	1 laporan	Rp 90,180,000	1 laporan	Rp 150,180,000	1 laporan	Rp 170,180,000	1 laporan	Rp 200,180,000
Intervensi 2.11 Asuransi pertanian kakao																	
Studi banding implementasi asuransi pertanian	Distan, mitra pembangunan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	v	v				tiap tahun	Rp 25,000,000.00	1 laporan	Rp 50,000,000.00	0	0	0	0	0	0

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Studi atau kajian peraturan pemberian asuransi petani kakao	Distan, mitra pembangunan, perguruan tinggi, lembaga penelitian	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	v	v				2 selama 5 tahun	Rp 30,000,000.00	1 laporan	Rp 50,000,000.00	0	0	0	0	0	0
Menginisiasi pertemuan bisnis dengan lembaga asuransi	DP2KUKM	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	v		v			2x setahun (2 lembaga asuransi)	Rp 30,000,000.00	0	0	1 laporan	Rp 50,000,000.00	0	0	0	0
Pendataan petani calon penerima program asuransi	Distan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		v	v			0	0	2x setahun	Rp 20,000,000.00	1 laporan	Rp 100,000,000.00	0	0	0	0
Sosialisasi program asuransi pertanian bekerja sama dengan lembaga asuransi	Distan, mitra pembangunan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	v	v	v	v	v	1x setahun 12 BPP	Rp 600,000,000.00	1 laporan	Rp 300,000,000.00	1 laporan	Rp 300,000,000.00	1 laporan	Rp 300,000,000.00	1 laporan	Rp 300,000,000.00
Pendampingan petani untuk dapat mengakses asuransi pertanian	DPMD, mitra pembangunan	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	v	v	v	v	v	2X setahun 12 BPP	Rp 80,000,000.00	1 laporan	Rp 1,000,000,000.00	1 laporan	Rp 1,000,000,000.00	1 laporan	Rp 1,000,000,000.00	1 laporan	Rp 1,000,000,000.00

Tabel 5.3 Pemetaan kegiatan Strategi 3 Meningkatkan produktivitas dan diversifikasi produk kakao

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
<b>Intervensi 3.1 Budidaya kakao dengan penerapan GAP</b>																	
Pembangunan kebun induk bersertifikat	Distan, mitra pembangunan, asosiasi, perusahaan, kelompok tani	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang		√	√	√	√	kebuduk 1h, kw; 1h/ kebun entris; 1h ( S01,S02,MCCD 2)	Rp -	10000 bahan tanam	Rp 150.000.000	10000 bahan tanam	Rp 200.000.000	10000 bahan tanam	Rp 250.000.000	10000 bahan tanam	Rp 300.000.000
Pendampingan penangkaran benih mandiri	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, asosiasi, perusahaan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	√	√	√	√	√	3 penangkar	Rp 50.000.000	3 laporan	Rp 60.000.000	3 laporan	Rp 60.000.000	3 laporan	Rp 60.000.000	3 laporan	Rp 60.000.000
Memperbaharui database petani kakao Luwu Utara secara berkala	Distan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	√	√	√	√	√	1 dokumen	Rp 25.000.000	1 dokumen	Rp 55.000.000	1 dokumen	Rp 75.000.000	1 dokumen	Rp 85.000.000	1 dokumen	Rp 95.000.000
Pembangunan demplot kakao agroforestri	Distan mitra pembangunan, perusahaan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	√	√	√			5 Unit	Rp 100.000.000	15 unit	Rp 300.000.000,00	15	Rp 375.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -
Pembangunan sistem informasi pojok belajar kakao di desa	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, asosiasi	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	10 unit	Rp 1.000.000.000,00	5 unit	Rp 625.000.000,00	5 unit	Rp 625.000.000,00	5 unit	Rp 625.000.000,00
Pengadaan dan pelatihan teknologi pemeliharaan tanaman kakao	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, asosiasi, perusahaan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 laporan	Rp 500.000.000,00	1 laporan	Rp 500.000.000,00	1 laporan	Rp 500.000.000,00	1 laporan	Rp 500.000.000,00
Memantau dan mengevaluasi penerapan teknologi pemeliharaan tanaman kakao oleh petani	Distan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 laporan	Rp 125.000.000,00	1 laporan	Rp 125.000.000,00	1 laporan	Rp 125.000.000,00	1 laporan	Rp 125.000.000,00
Pengadaan bibit multi-klon	Distan, Balai Benih, perusahaan, mitra pembangunan	Peningkatan Kualitas SDG Hewar/Tanaman		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 900.000.000,00	1 dokumen	Rp 900.000.000,00	1 dokumen	Rp 900.000.000,00	1 dokumen	Rp 900.000.000,00
Peningkatan kesadaran masyarakat tentang penanaman multi-klon	Distan, Balai Benih, perusahaan, mitra pembangunan, asosiasi	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 62.500.000,00	1 dokumen	Rp 75.000.000,00	1 dokumen	Rp 75.000.000,00
Peningkatan kesadaran terkait penanaman multi-spesies (agroforestri)	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, asosiasi, perusahaan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 62.500.000,00	1 dokumen	Rp 75.000.000,00	1 dokumen	Rp 75.000.000,00

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Melakukan studi/kajian tentang bahan tanam yang tahan PBK, adaptif terhadap perubahan iklim, produksi tinggi	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, asosiasi, perguruan tinggi	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		√				0	Rp -	1 dokumen	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
Pengadaan bahan tanam resisten OPT	Distan, Balai Benih, perusahaan, mitra pembanguan, asosiasi	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 900.000.000,00	1 dokumen	Rp 900.000.000,00	1 dokumen	Rp 900.000.000,00	1 dokumen	Rp 900.000.000,00
Sosialisasi penggunaan bahan tanam resisten OPT	Distan, Balai Benih, perusahaan, mitra pembanguan, asosiasi	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 62.500.000,00	1 dokumen	Rp 75.000.000,00	1 dokumen	Rp 75.000.000,00
Pelatihan kelembagaan dan manajerial untuk kelompok tani	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembanguan, asosiasi, perusahaan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		√	√	√	√	0	Rp -	10 unit	Rp 100.000.000,00	14 unit	Rp 210.000.000,00	10 unit	Rp 175.000.000,00	10 unit	Rp 175.000.000,00
Fasilitasi kemitraan kelompok tani dengan penyedia bibit bersertifikat	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota		√	√	√	√	0	Rp -	10 unit	Rp 20.000.000,00	14 unit	Rp 28.000.000,00	10 unit	Rp 20.000.000,00	10 unit	Rp 20.000.000,00
Fasilitasi kemitraan kelompok tani dengan sektor industri	DP2KUKM, perusahaan	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa		√						1 laporan	Rp 85.000.000						
Menginisiasi keterlibatan sektor swasta dalam penyuluhan GAP	Distan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		√	√	√	√	0	Rp -	15 unit	Rp 112.500.000,00	15 unit	Rp 131.250.000,00	15 unit	Rp 150.000.000,00	15 unit	Rp 168.750.000,00
Memantau dan mengevaluasi adopsi Praktik Pertanian yang Baik (GAP) di tingkat petani	Distan, perguruan tinggi	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 laporan	Rp 150.000.000,00	1 laporan	Rp 150.000.000,00	1 laporan	Rp 150.000.000,00	1 laporan	Rp 150.000.000,00
Pendampingan pelaksanaan Praktik Pertanian yang Baik (GAP) secara berkelanjutan	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, asosiasi, perusahaan, perusahaan	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 laporan	Rp 150.000.000,00	1 laporan	Rp 200.000.000,00	1 laporan	Rp 250.000.000,00	1 laporan	Rp 300.000.000,00
Peningkatan kapasitas penyuluh, penyuluh swadaya, dan petani champion	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, asosiasi, perusahaan	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota		√	√	√	√	0	Rp -	45 orang	Rp 101.250.000	45 orang	Rp 135.000.000	45 orang	Rp 168.750.000	45 orang	Rp 185.625.000

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Peningkatan jejaring penyuluhan oleh petani champion	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, asosiasi, perusahaan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√			0	Rp -	3 unit	Rp 75.000.000	3 unit	Rp 75.000.000	0	Rp -	0	Rp -
Penyusunan panduan penerapan GAP untuk petani	Distan, perguruan tinggi, lembaga pemelitian, asosiasi, mitra pembangunana	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	√	√		√		5 dokumen	Rp 50.000.000	5 dokumen	Rp 75.000.000	0	Rp -	5 dokumen	Rp 100.000.000		Rp -
Peremajaan tanaman kakao yang tidak produktif	Distan, perusahaan	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	√	√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 900.000.000	1 dokumen	Rp 900.000.000	1 dokumen	Rp 900.000.000	1 dokumen	Rp 900.000.000
Pembangunan/pengaktifan forum kajian ahli kakao	Distan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan		√				0	Rp -	1 unit	Rp 50.000.000	0	Rp -	0	Rp -	0	Rp -
Pertemuan rutin pokja kakao berkelanjutan sebagai wadah kolaborasi antar sektor	Bapperida	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	√	√	√	√	√	3 kegiatan pokja	Rp 150.000.000	3 kegiatan pokja	Rp 150.000.000	3 kegiatan pokja	Rp 150.000.000	3 kegiatan pokja	Rp 150.000.000	3 kegiatan pokja	Rp 150.000.000
Studi/kajian tentang penerapan GAP untuk peningkatan produktivitas kaako	Distan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, mitra pembangunan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	3 dokumen	Rp 450.000.000	3 dokumen	Rp 500.000.000	3 dokumen	Rp 550.000.000	3 dokumen	Rp 600.000.000
Pelatihan sistem pertanian tahan perubahan iklim	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, asosiasi, perusahaan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	√	√	√	√	√	0	Rp -	5 dokumen	Rp 112.500.000	5 dokumen	Rp 150.000.000	5 dokumen	Rp 187.500.000	5 dokumen	Rp 225.000.000
Sosialisasi terkait penggunaan pupuk organik	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, asosiasi, perusahaan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	15 unit	Rp 112.500.000	15 unit	Rp 150.000.000	15 unit	Rp 187.500.000	15 unit	Rp 225.000.000
Pelatihan pembuatan pupuk organik	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, asosiasi, perusahaan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	15 unit	Rp 168.750.000	15 unit	Rp 225.000.000	15 unit	Rp 281.250.000	15 unit	Rp 337.500.000
Pengadaan sarana-prasarana pembuatan pupuk organik	Distan, perusahaan, mitra pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		√	√	√	√	0	Rp -	15 unit	Rp 1.125.000.000	15 unit	Rp 1.200.000.000	15 unit	Rp 1.275.000.000	5 unit	Rp 450.000.000
Pembangunan sistem informasi iklim melalui kerjasama dengan BMKG	DLH, BMKG	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	√					10 dokumen	Rp 100.000.000								

Intervensi 3.2 Akses terhadap sarana dan prasarana pendukung usaha tani kakao

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Bantuan pengembangan kebun induk di tingkat desa	DPMD, mitra pembangunan, perusahaan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	10000 batang	Rp 150.000.000	10000 batang	Rp 150.000.000	10000 batang	Rp 150.000.000	10000 batang	Rp 150.000.000
Pendampingan pembangunan kebun induk kakao di tingkat desa	DPMD, mitra pembangunan, perusahaan, asosiasi, perguruan tinggi, Balai Penyuluhan, penyuluh swadaya	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang		v	v	v	v	0	Rp -	5 laporan	Rp 50.000.000	5 laporan	Rp 50.000.000	5 laporan	Rp 50.000.000	5 laporan	Rp 50.000.000
Intervensi 3.3 Diversifikasi produk kakao																	
Identifikasi produk turunan kakao potensial dan penyusunan model bisnis	DP2KUKM, koperasi	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	v			v				15 unit	Rp 112.500.000			15 unit	Rp 112.500.000		
Bantuan sarana dan prasarana pengolahan produk turunan kakao	DP2KUKM, mitra pembangunan, perusahaan	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	1 laporan	Rp 300.000.000	1 laporan	Rp 300.000.000	1 laporan	Rp 300.000.000	1 laporan	Rp 300.000.000
Bantuan sarana dan prasarana penanaman tanaman pelindung dan tanaman sela	Distan, mitra pembangunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	v		v			45 orang	Rp 135.000.000			45 orang	Rp 135.000.000				
Pendampingan inkubasi industri rumah tangga produk turunan kakao	DP2KUKM, mitra pembangunan, perusahaan	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang		v	v	v	v			45 orang	Rp 135.000.000	45 orang	Rp 135.000.000	45 orang	Rp 135.000.000	45 orang	Rp 135.000.000
Pendampingan peningkatan kualitas produk kakao petani	DP2KUKM, mitra pembangunan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	45 orang	Rp 101.250.000	45 orang	Rp 135.000.000	45 orang	Rp 168.750.000	45 orang	Rp 185.625.000
Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	DPMD, mitra pembangunan, perusahaan	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna		v	v	v	v	0	Rp -	1 unit	Rp 300.000.000	1 unit	Rp 100.000.000	1 unit	Rp 150.000.000	1 unit	Rp 200.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	DPMD, mitra pembangunan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		v	v	v	v	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000
Peningkatan kapasitas penyuluh, penyuluh swadaya, dan petani champion	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, perguruan tinggi, asosiasi, perusahaan, mitra pembangunan	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	v					10 industri	Rp 100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pembangunan dan peningkatan sistem konsultasi oleh penyuluh	Distan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	v	v	v	v	v	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Sosialisasi/penyadartahuan petani tentang penggunaan bibit multi-klon, media tanam, dan bahan tanam	Distan, asosiasi, perusahaan, mitra pembangunan, perguruan tinggi	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 laporan	Rp 50.000.000	1 laporan	Rp 50.000.000	1 laporan	Rp 50.000.000	1 laporan	Rp 50.000.000
Pemantauan dan evaluasi penggunaan bahan tanam	Distan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		√	√	√	√	0	Rp -	1 laporan	Rp 50.000.000	1 laporan	Rp 50.000.000	1 laporan	Rp 50.000.000	1 laporan	Rp 50.000.000
Konsultasi dengan pihak distributor sesuai kebutuhan pengguna dan lokasi	Distan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000
Memetakan dan memperbaharui data kebutuhan petani pengguna	Distan	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 laporan	Rp 450.000.000	1 laporan	Rp 450.000.000	1 laporan	Rp 450.000.000	1 laporan	Rp 450.000.000
Bantuan bibit kakao yang berkualitas	Distan, perusahaan, mitra pembangunan, Balai Benih	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		√	√	√	√	0	Rp -	1 laporan	Rp 50.000.000	1 laporan	Rp 50.000.000	1 laporan	Rp 50.000.000	1 laporan	Rp 50.000.000
Membangun sistem quality control pengadaan barang dan jasa kepada petani	Distan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		√	√	√	√	0	Rp -	1 laporan	Rp 100.000.000	1 laporan	Rp 100.000.000	1 laporan	Rp 100.000.000	1 laporan	Rp 100.000.000
Pelatihan quality control	Distan, asosiasi, perusahaan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 laporan	Rp 100.000.000	1 laporan	Rp 100.000.000	1 laporan	Rp 100.000.000	1 laporan	Rp 100.000.000
Pembangunan mekanisme insentif untuk bisnis saprodi pertanian di tingkat desa	DPMD, mitra pembangunan	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	√					15 unit	Rp 112.500.000								
Penyusunan kebijakan dan perbaikan mekanisme distribusi pupuk subsidi	Bapperida	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	5 laporan	Rp 250.000.000	5 laporan	Rp 250.000.000	5 laporan	Rp 250.000.000	5 laporan	Rp 250.000.000
Pembentukan pusat kajian kakao daerah	Bapperida, perguruan tinggi	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		√				1 dokumen	Rp 50.000.000								
Melakukan studi/kajian tentang bibit unggul dan metode pembibitan	Distan, mitra pembangunan, perusahaan, asosiasi, perguruan tinggi	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 150.000.000	1 dokumen	Rp 200.000.000	1 dokumen	Rp 250.000.000	1 dokumen	Rp 275.000.000

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
swadaya dan petani champion																	
Kampanye konsumsi produk IRT kakao	DP2KUKM, NGO	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		v	v			0	0	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000	0	0	0	0
Pendampingan inisiasi kemitraan dengan industri dan pembeli potensial	DP2KUKM, NGO, mitra pembangunan	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	v	v	v	v	v	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000
Pelatihan penyusunan proposal	DP2KUKM, asosiasi, perusahaan, mitra pembangunan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	v	v	v	v	v	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000
Pelatihan penyusunan rencana bisnis	DP2KUKM, asosiasi, mitra pembangunan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	v	v	v	v	v	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	DPMD, mitra pembangunan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		v	v			0	0	10 orang	Rp 250.000.000	10 orang	Rp 250.000.000	0	0	0	0
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	DPMD	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota		v				0	0	10 orang	Rp 250.000.000	0	0	0	0	0	0
Pelatihan pengelolaan pasca panen kakao	DP2KUKM, asosiasi, koperasi, mitra pembangunan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	v	v	v	v	v	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000
Pembentukan kelompok/unit usaha pengolahan kakao	DP2KUKM, asosiasi, koperasi, mitra pembangunan	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani		v				0	0	15 unit	Rp 150.000.000	0	0	0	0	0	0
Pendampingan penguatan kelembagaan dan manajemen keuangan	DP2KUKM, asosiasi, koperasi, mitra pembangunan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		v	v	v	v	0	0	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000
Pelatihan diversifikasi produk turunan kakao	DP2KUKM, asosiasi, koperasi, mitra pembangunan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		v				0	0	20 kelompok	Rp 200.000.000	0	0	0	0	0	0

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	DPMD, mitra pembangunan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah		v	v	v	v	0	Rp -	1 dokumen	Rp 112.500.000,00	1 dokumen	Rp 150.000.000,00	1 dokumen	Rp 187.500.000,00	1 dokumen	Rp 225.000.000,00
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	DPMD	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		v		v		0	0	20 kelompok	Rp 200.000.000	0	0	20 kelompok	Rp 200.000.000	0	0
Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	DPMD	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota		v		v		0	0	20 kelompok	Rp 200.000.000	0	0	20 kelompok	Rp 200.000.000	0	0
Intervensi 3.4 Agribisnis kakao																	
Membangun sistem informasi pasar untuk produk kakao	Diskominfo, mitra pembangunan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		v	v	v	v	0	Rp -	5 dokumen	Rp 75.000.000	5 dokumen	Rp 85.000.000	5 dokumen	Rp 90.000.000	5 dokumen	Rp 100.000.000
Pelatihan pengolahan produk turunan kakao bagi KWT dan petani perempuan	DP2KUKM, perusahaan, asosiasi, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, koperasi, mitra pembangunan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	v	v	v	v	v	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000	1 unit	Rp 50.000.000
Pendampingan pengembangan produk turunan kakao	DP2KUKM, asosiasi, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, koperasi, mitra pembangunan	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	v		v			2 laporan	Rp 100.000.000	0	0	2 laporan	Rp 200.000.000	0	0	0	0
Akses modal bagi UKM	DP2KUKM, perusahaan, lembaga keuangan	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		v		v		0	0	5 dokumen	Rp 75.000.000	0	0	5 dokumen	Rp 75.000.000	0	0
Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	DPMD, mitra pembangunan, asosiasi, perguruan tinggi	Fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna	v	v	v	v	v	20 kelompok	Rp 200.000.000	20 kelompok	Rp 200.000.000	20 kelompok	Rp 200.000.000	20 kelompok	Rp 200.000.000	20 kelompok	Rp 200.000.000

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	DPMD, mitra pembangunan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	√	√	√	√	√	20 kelompok	Rp 200.000.000	20 kelompok	Rp 200.000.000	20 kelompok	Rp 200.000.000	20 kelompok	Rp 200.000.000	20 kelompok	Rp 200.000.000
Pelatihan perbaikan manajemen kebun	Distan, perusahaan, asosiasi, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 112.500.000,00	1 dokumen	Rp 150.000.000,00	1 dokumen	Rp 187.500.000,00	1 dokumen	Rp 225.000.000,00
Pelibatan anak muda/kelompok pemuda dalam agribisnis kakao	DP2KUKM, asosiasi, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, koperasi, mitra pembangunan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	√	√	√			1 dokumen	Rp 25.000.000	1 dokumen	Rp 50.000.000	1 dokumen	Rp 75.000.000	0	Rp -	0	Rp -
Inkubator bisnis jasa sektor kakao guna mengatasi kelangkaan tenaga kerja terampil	DP2KUKM, mitra pembangunan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro		√	√			0	0	15 unit	Rp 300.000.000,00	15	Rp 375.000.000,00	0	Rp -	0	Rp -
Membangun pasar diversifikasi kakao	Distan, perusahaan, mitra pembangunan, koperasi	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		√		√				5 laporan	Rp 250.000.000			5 dokumen	Rp 100.000.000		
Perbaikan dan pembaharuan data produksi kakao	Distan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	√	√	√	√	√	0	Rp -	5 dokumen	Rp 75.000.000	5 dokumen	Rp 85.000.000	5 dokumen	Rp 90.000.000	5 dokumen	Rp 100.000.000
Fasilitasi kemitraan produsen dengan industri oleh pemerintah dan perguruan tinggi	DP2KUKM, perguruan tinggi	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	√	√	√	√	√	0	Rp -	1 laporan	Rp 125.000.000,00	1 laporan	Rp 125.000.000,00	1 laporan	Rp 125.000.000,00	1 laporan	Rp 125.000.000,00
Pembangunan regulasi dan sistem insentif untuk pelaku agribisnis kakao	Bapperida	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan		√				0	Rp -	2 laporan	Rp 100.000.000	0	0	0	0	0	0
Pembangunan mekanisme penjaminan dari produsen dan konsumen	DP2KUKM	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 62.500.000,00	1 dokumen	Rp 75.000.000,00	1 dokumen	Rp 75.000.000,00
Pembentukan kelompok usaha tani yang mendapat pembinaan khusus untuk meningkatkan kualitas produksi	Distan, asosiasi, mitra pembangunan, perusahaan	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang		√				0	Rp -	1 kelompok	20 kelompok	Rp 200.000.000	0	0	0	0	0

Tabel 5.4 Pemetaan kegiatan Strategi 4 Memperbaiki rantai pasok yang berkelanjutan

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023-2024	II 2025-2029	III 2030-2034	IV 2035-2039	V 2040-2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Intervensi 4.1 Pengembangan rantai pasok yang efektif dan integratif																	
Pemantauan rantai pasok dan rantai nilai	DP2KUKM	Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	v		v		v	10 unit	Rp 250.000.000,00	0	0	10 unit	Rp 250.000.000,00	0	0	10 unit	Rp 250.000.000,00
Pembentukan korporasi petani sebagai bagian dari rantai nilai	Distan, mitra pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		v						5 dokumen	Rp 500.000.000	0	0	15	125.000.000		0
	Distan	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani		v	v	v	v	0	Rp -	5 unit	Rp 250.000.000,00	5 unit	Rp 300.000.000,00	5 unit	Rp 500.000.000,00	5 unit	Rp 500.000.000,00
Pendampingan kelembagaan dan kapasitas teknis bagi korporasi petani	DP2KUKM, mitra pembangunan, perusahaan, perguruan tinggi, asosiasi	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		v				0	0	1 unit	Rp 250.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	Distan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	5 unit	Rp 50.000.000,00	5 unit	Rp 75.000.000,00	5 unit	Rp 100.000.000,00	5 unit	Rp 100.000.000,00
Penyusunan kebijakan sistem informasi harga untuk meningkatkan transparansi	Bapperida	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan				v		0	0	0	0	0	0	1 unit	Rp 50.000.000,00	0	0
Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi	DP2KUKM, mitra pembangunan, perusahaan, perguruan tinggi, asosiasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	v	v	v	v	v	12	Rp 100.000.000,00	12	Rp 100.000.000,00	12	Rp 100.000.000,00	12	Rp 100.000.000,00	12	Rp 100.000.000,00
Pelatihan manajemen keuangan untuk petani dan kelompok tani	DP2KUKM, lembaga keuangan, perusahaan, mitra pembangunan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	v	v	v	v	v	22	Rp 175.000.000,00	22	Rp 175.000.000,00	22	Rp 175.000.000,00	22	Rp 175.000.000,00	22	Rp 175.000.000,00

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
	Distan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	25 unit	Rp 250.000.000,00	25 unit	Rp 300.000.000,00	25 unit	Rp 300.000.000,00	25 unit	Rp 300.000.000,00
Pelatihan enterprenuership untuk petani dan keluarga petani	Disnakertrans, lembaga keuangan, perusahaan, mitra pembangunan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan		v			v	0	0	30 unit	Rp 300.000.000,00	0	0	0	0	40	420.000.000
Pendampingan kemitraan untuk koperasi dan kelompok tani	DP2KUKM, perusahaan, mitra pembangunan	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota			v			0	0	0	0	14 unit	Rp 140.000.000,00	0	0	0	0
	Distan	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		v	v	v	v	0	Rp -	25 unit	Rp 250.000.000,00	25 unit	Rp 300.000.000,00	25 unit	Rp 300.000.000,00	25 unit	Rp 300.000.000,00
Intervensi 4.2 Sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen																	
Pengembangan sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen berbasis digital	Diskominfo, perusahaan, mitra pembangunan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		v				0	0	12	Rp 120.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Bantuan sarana dan prasarana untuk mengakses internet	DPUTRPKP2	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		v				0	0	25 unit	Rp 250.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Pembangunan infrastruktur jaringan internet	DPUTRPKP2	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		v				0	0	5	Rp 85.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Peningkatan kapasitas penguasaan sistem digital di tingkat kelompok tani dan pelaku rantai nilai	DPUTRPKP2, NGO, perusahaan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v				0	0	45	Rp 475.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Intervensi 4.3 Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan																	

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Pembangunan sistem traceability (penelusuran) open source yang profesional	Diskominfo, perusahaan, mitra pembangunan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		√				0	0		Rp 525.000.000,00		0	0	0	0	
Penyediaan jasa/layanan traceability komoditas oleh koperasi dengan fasilitasi dari pemerintah	Diskominfo	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		√	√			0	Rp -	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 60.000.000,00	0	0	0	
Organisasi petani sebagai penyedia layanan sistem database	Distan, mitra pembangunan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 60.000.000,00	1 dokumen	Rp 70.000.000,00	1 dokumen	Rp 80.000.000,00
Peningkatan kapasitas petani untuk pengelolaan sistem digital	Diskominfo, mitra pembangunan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 50.000.000,00	1 dokumen	Rp 60.000.000,00	1 dokumen	Rp 70.000.000,00	1 dokumen	Rp 80.000.000,00
Pendampingan sertifikasi secara berkelanjutan	Distan, mitra pembangunan, perusahaan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√	0	Rp -	1 dokumen	Rp 100.000.000,00	1 dokumen	Rp 125.000.000,00	1 dokumen	Rp 150.000.000,00	1 dokumen	Rp 200.000.000,00
Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi oleh pemerintah	Distan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√			1 dokumen	Rp 100.000.000,00	1 dokumen	Rp 100.000.000,00	1 dokumen	Rp 100.000.000,00	1 dokumen	Rp 100.000.000,00
Pembangunan sistem kontrol terhadap penerapan sertifikasi oleh pemerintah	Distan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		√	√	√	√	0	0	1 dokumen	Rp300.000.000,00	1 dokumen	Rp100.000.000,00	1 dokumen	Rp100.000.000,00	1 dokumen	Rp100.000.000,00
Mengintegrasikan indikator sertifikasi kakao dengan indikator kinerja daerah	Bapperida	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			√	√		0	0	0	0	1 dokumen	Rp300.000.000,00	1 dokumen	Rp100.000.000,00	0	0

Tabel 5.5 Pemetaan kegiatan Strategi 5 Insentif jasa ekosistem dari kakao berkelanjutan

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Intervensi 5.1 Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) antar daerah berupa Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di tingkat kabupaten untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan stok karbon																	
Membangun skema penjaminan perminjanaan modal bagi petani dengan pola budidaya ramah lingkungan	Distan, mitra pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				v		0	0	0	0	0	0	5 dokumen	Rp 800.000.000,00	0	0
Intervensi 5.2 Pembayaran jasa lingkungan hidup (PIJLH) untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon																	
Pendampingan kepada kelompok kebun organik	Distan, Balai Penyuluhan Pertanian, penyuluh swadaya, mitra pembangunan, NGO, perguruan tinggi	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		v	v	v	v	0	Rp -	1 laporan	Rp 500.000.000,00	1 laporan	Rp 500.000.000,00	1 laporan	Rp 500.000.000,00	1 laporan	Rp 500.000.000,00
Memberikan insentif kepada petani dengan pola budidaya ramah lingkungan	DLH	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian		v	v			0	Rp -	15 unit	Rp 150.000.000,00	15 unit	Rp 150.000.000,00	0	0	0	0
Memberikan insentif bantuan alat pertanian kakao	Distan mitra pembangunan, perusahaan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		v	v	v	v	0	Rp -	1 laporan	Rp 500.000.000,00	1 laporan	Rp 500.000.000,00	1 laporan	Rp 500.000.000,00	1 laporan	Rp 500.000.000,00
Memfasilitasi kapasitas kebun organik	Distan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		v	v	v	v	0	Rp -	1 laporan	Rp 150.000.000,00	1 laporan	Rp 150.000.000,00	1 laporan	Rp 150.000.000,00	1 laporan	Rp 150.000.000,00
Membangun skema penjaminan modal bagi petani dengan pola budidaya ramah lingkungan	Distan, mitra pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		v		v		0	0	1 dokumen	Rp 80.000.000,00	0	0	1 dokumen	Rp 80.000.000,00	0	0

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
Sosialisasi jenis instrumen ekonomi jasa lingkungan hidup	DLH	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v			v	0	0	15 kegiatan	Rp 150.000.000,00	0	0	0	0	15 kegiatan	Rp 150.000.000,00
Memfasilitasi sertifikasi dan aspek prioritas untuk insentif	DLH, mitra pembangunan, perusahaan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v	v			0	0	10 kegiatan	Rp 200.000.000,00	10 kegiatan	Rp 200.000.000,00	0	0	0	0
<b>Intervensi 5.3 Label ramah lingkungan hidup</b>																	
Sosialisasi label ramah lingkungan hidup	DLH, NGO	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v	v		v	0	0	1 kebijakan	Rp 300.000.000,00	1 kebijakan	Rp 300.000.000,00	0	0	10 kegiatan	Rp 200.000.000,00
Pendampingan label ramah lingkungan hidup untuk unit usaha kakao	Distan, mitra pembangunan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		v	v			0	0	15 kegiatan	Rp 150.000.000,00	15 kegiatan	Rp 150.000.000,00	0	0	0	0
<b>Intervensi 5.4 Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup</b>																	
Penyusunan kebijakan daerah terkait dana pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Bapperida	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		v				0	0	1 kebijakan	Rp 300.000.000,00	0	0	0	0	0	0
Monitoring dan evaluasi	Bapperida	Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	v	v	v	v	v	10 kegiatan	Rp 200.000.000,00	10 kegiatan	Rp 200.000.000,00	10 kegiatan	Rp 200.000.000,00	10 kegiatan	Rp 200.000.000,00	10 kegiatan	Rp 200.000.000,00
<b>Intervensi 5.5 Penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</b>																	
Penyusunan kebijakan daerah terkait penghargaan kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Bapperida	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				v		0	0	0	0	0	0	1 laporan	Rp 300.000.000,00	0	0
Sosialisasi kebijakan	Bapperida	Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan,		v				0	0	15 unit	Rp 150.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Kegiatan	Lembaga	Nomenklatur Kegiatan	Lini Masa					Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V	
			I 2023- 2024	II 2025- 2029	III 2030- 2034	IV 2035- 2039	V 2040- 2044	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)	Target Volume	Target anggaran (rupiah)
		Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan															
Monitoring dan evaluasi kinerja perusahaan, komunitas, dan perorangan	Bapperida	Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan		v	v	v	v	10 kegiatan	Rp 200.000.000,0 0	10 kegiatan	Rp 200.000.000,00	10 kegiatan	Rp 200.000.000,00	10 kegiatan	Rp 200.000.000,00	10 kegiatan	Rp 200.000.000,0 0

### 5.3 Penjabaran indikator Peta Jalan Kakao Lestari

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan intervensi dan strategi telah ditetapkan indikator dan target yang ingin dicapai dalam 20 tahun kedepan. Penetapan target dilakukan melalui proses partisipatif dengan melibatkan anggota Kelompok Kerja Kakao Berkelanjutan. Selain penetapan indikator dan target, juga disepakati instansi/lembaga penanggung jawab untuk masing-masing indikator. Hal ini dilakukan untuk memungkinkan adanya proses monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Peta Jalan Kakao Lestari. Setiap indikator akan dimonitor tingkat capaiannya setiap tahun oleh masing-masing instansi yang bertanggung jawab.

Tabel 5.6 Penjabaran indikator intervensi Peta Jalan Kakao Lestari

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
1	Alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan	1.1	Alokasi kebun kakao dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan dan tata ruang kabupaten	1.1.1	Luas kawasan hutan	Peta penunjukkan/ penetapan kawasan	KPH	KLHK, BPKH, DLHK Provinsi	542,716	ha
				1.1.2	Luas tutupan hutan	Peta tutupan/penggunaan lahan	KPH	KLHK, BPKH	526,722	ha
				1.1.3	Luas HCV/HCS	Peta HCV/HCS	DLH	KLHK, BPKH		ha
				1.1.4	Luas alokasi lahan untuk tanaman kakao	Peta tutupan/penggunaan lahan dengan kelas lahan kakao	Distan	KLHK, BPKH, DLH	13.694,48	ha
				1.1.5	Persentase luas kakao yang sesuai dengan alokasi lahan	Peta tutupan/penggunaan lahan dengan kelas lahan kakao	DPUTRPKP2	DLH, DPUTRPKP2	100	%

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
				1.1.6	Persentase luas kakao yang berada pada area perhutanan sosial	Peta tutupan/penggunaan lahan di area perhutanan sosial	KPH	KLHK, BPKH		%
		1.2	Alokasi peremajaan lahan kakao	1.2.1	Persentase luas kakao umur produktif	Data tabular umur kebun kakao	Distan	KLHK, BPKH, DLH	80	%
				1.2.2	Luas indikatif lahan peremajaan kakao (untuk tanaman tua dan rusak)	Data tabular luas dan lokasi target dan realisasi lahan peremajaan kakao	Distan	KLHK, BPKH, DLH, Distan	10,989	ha
		1.3	Perluasan terbatas kebun kakao	1.3.1	Persentase penanaman kakao pada area baru dengan kemiringan di atas 25% dengan tingkat kesesuaian lahan S1-S3	Peta tutupan/penggunaan lahan dengan kelas lahan agroforestri kakao	Distan	KLHK, BPKH, DLH, Distan	100	%
				1.3.2	Luas lahan kakao yang berasal dari lahan tidak produktif (semak belukar, lahan terbuka, padang rumput)	Data tabular luas dan lokasi lahan kakao yang berasal dari lahan tidak produktif	Distan	KLHK, BPKH, DLH, Distan	11.673	ha
		1.4	Pengembangan agroforestri kakao	1.4.1	Luas agroforestri kakao	Peta tutupan/penggunaan lahan dengan kelas lahan agroforestri kakao	Distan	KLHK, BPKH, DLH, Distan	30.577	ha

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
				1.4.2	Luas pertambahan tutupan lahan agroforestri kakao	Data tabular luas dan lokasi agroforestri kakao	Distan	KLHK, BPKH, DLH, Distan	1.691	ha
				1.4.3	Luas lahan agroforestri kakao dengan tanaman pangan	Peta tutupan/penggunaan lahan dengan kelas lahan agroforestri kakao	DPUTRPKP2	KLHK, BPKH, DLH, Distan	22.932	ha
2	Meningkatkan akses masyarakat terutama petani kakao terhadap modal penghidupan	2.1	Kemudahan akses sertifikasi lahan	2.1.1	Persentase jumlah petani kakao yang memiliki sertifikat lahan	Data tabular status dan luas lahan petani kakao	Distan	BPN	100	%
				2.1.2	Persentase luas lahan kakao yang memperoleh sertifikat	Data tabular status dan luas lahan petani kakao	Distan	BPN	100	%
		2.2	Optimalisasi perhutanan sosial berbasis kakao	2.2.1	Jumlah perhutanan sosial berbasis kakao	RKPS/RKT kelompok perhutanan sosial yang mengelola kakao	KPH	KPH	4	unit
				2.2.2	Jumlah kemitraan perhutanan sosial yang terjalin	Data tabular kemitraan KPS/KUPS dengan pihak lain	KPH	KPH	4	unit
				2.2.3	Jumlah kelembagaan perhutanan sosial yang aktif	Data tabular KPS dan KUPS perhutanan sosial berbasis kakao beserta unit usaha dan status KUPS	KPH	KPH	4	unit

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
				2.2.4	Jumlah pendampingan perhutanan sosial	Data tabular jumlah kegiatan pendampingan kelompok perhutanan sosial disertai dokumentasi	KPH	KPH	40	kegiatan
		2.3	Penyuluhan kakao yang tepat sasaran	2.3.1	Jumlah penyuluh berkompentensi	Data tabular jumlah penyuluh kakao, jumlah petani kakao, dan rasio penyuluh terhadap petani	Distan	Distan	240	orang
				2.3.2	Rasio jumlah penyuluh dan petani	Data tabular jumlah penyuluh, jumlah petani, dan rasio penyuluh terhadap petani	Distan	Distan	0.004	tanpa satuan
				2.3.3	Jumlah kegiatan penyuluhan dalam satu tahun	Data tabular kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan beserta dokumentasi	Distan	Distan	40	kegiatan
				2.3.4	Jumlah pelatihan bagi tenaga penyuluh	Data tabular kegiatan pelatihan yang dilaksanakan beserta dokumentasi	Distan	Distan	20	kegiatan
				2.3.5	Jumlah petani yang mengikuti kegiatan penyuluhan	Data tabular kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan beserta dokumentasi	Distan	Distan	100	%
				2.3.6	Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Data tabular nilai tukar petani (NTP)	Bapperida	BPS	105	tanpa satuan
		2.4	Pengembangan kelembagaan	2.4.1	Jumlah koperasi dengan unit usaha berbasis kakao	Data tabular jumlah koperasi dengan unit usaha berbasis kakao	DP2KUKM	DP2KUKM	9	unit

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
			keuangan petani kakao							
				2.4.2	Jumlah BUMDes dengan unit usaha berbasis kakao	Data tabular unit usaha BUMDES	DPMD	DPMD	9	unit
				2.4.3	Jumlah petani yang mendapat bantuan permodalan	Data tabular petani kakao yang memperoleh KUR Pertanian/Kredit Mikro lainnya	DP2KUKM	DP2KUKM, TA Readsi	100	%
		2.5	Korporasi petani kakao	2.5.1	Jumlah korporasi petani kakao	Rencana kelola Korporasi Petani	Distan	Distan	1	unit
				2.5.2	Persentase petani yang tergabung dalam korporasi petani	Data tabular anggota korporasi petani	Distan	Mars, Asosiasi Kakao Doktor, Distan, Asosiasi Kakao Luwu Utara	70	%
				2.5.3	Luas lahan yang dikelola korporasi petani	Rencana kelola Korporasi Petani	Distan	Distan	9.036	ha
				2.5.4	Pendapatan petani kakao	Data tabular hasil survei/sampling pendapatan petani kakao	Distan	Distan		rupiah
				2.5.5	Jumlah pendampingan peningkatan kapasitas korporasi petani	Data tabular kegiatan pendampingan korporasi petani disertai dokumentasi	Bapperida	Distan, Mars, SFITAL, Reads, NGO, Lascar Kakao	10	kegiatan

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
		2.6	Bantuan peralatan pertanian	2.6.1	Jumlah peralatan pertanian yang terdistribusi dan sesuai dengan kebutuhan petani	Laporan penyaluran bantuan peralatan pertanian untuk petani kakao disertai dokumentasi	Distan	Distan	20	unit
				2.6.2	Persentase kelompok tani yang pernah mendapatkan bantuan peralatan pertanian	Laporan penyaluran bantuan peralatan pertanian untuk petani kakao disertai dokumentasi	Distan	Distan	100	%
				2.6.3	Indeks Nilai Tukar Petani (NTP)	Data nilai tukar petani (NTP)	Bapperida	BPS	105	tanpa satuan
		2.7	Pelibatan dan pemberdayaan perempuan dan pemuda	2.7.1	Persentase petani perempuan dan pemuda yang mengikuti penyuluhan usaha tani kakao	Data peserta penyuluhan terpilah gender	Bapperida	Distan, Mars, Olam, SFITAL, TA Reads, NGO, Save the Children, Active, Koperasi Simultan, Asosiasi Kakao Doctor, Asosiasi Kakao Luwu Utara, Lascar Kakao, Univ Andi Djemma, UNCP, Unhas	30	%

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
				2.7.2	Jumlah petani perempuan kakao dan pemuda yang mengikuti penyuluhan non pertanian	Data peserta penyuluhan terpilah gender	Bapperida	Distan, Mars, Olam, SFITAL, TA Reads, NGO, DP3A, Save the Children, Active, Koperasi Simultan, Asosiasi Kakao Doctor, Asosiasi Kakao Luwu Utara, Lascar Kakao, Univ Andi Djemma, UNCP, Unhas	100	%
				2.7.3	Jumlah unit usaha pengolahan kakao yang dikelola oleh kelompok perempuan	Data wirausaha kakao terpilah gender	DP2KUKM	DP2KUKM	9	unit
		2.8	Pelatihan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja	2.8.1	Persentase kelompok yang pernah mendapatkan pelatihan K3	Data kegiatan pelatihan K3 untuk petani kakao	Sekretariat	Mars, Olam, perusahaan, Distan, Disnakertrans, Dinkes	100	%
				2.8.2	Persentase petani yang memiliki alat keselamatan kerja	Data jumlah petani yang memiliki alat keselamatan kerja	Sekretariat	Mars, Olam, perusahaan, Distan, Disnakertrans, Dinkes	100	%

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
		2.9	Sistem pencegahan dan pengawasan pekerja anak	2.9.1	Persentase keluarga petani yang mendapat edukasi perlindungan anak	Data keluarga petani yang memperoleh edukasi perlindungan anak	DP3AP2KB	Disnakertrans, Save the Children, DP3A, Mars, Olam	100	%
				2.9.2	SOP pencegahan dan pengawasan di tingkat komunitas	Dokumen SOP	DP3AP2KB	Disnakertrans, Save the Children, DP3A, Mars, Olam	1	unit
		2.10	Kebijakan kakao lestari	2.10.1	Keberadaan regulasi/produk hukum yang mendukung pengembangan kakao lestari	Dokumen kebijakan	Sekretariat	-	1	unit
				2.10.2	Rata-rata persentase pembiayaan dana desa bagi pengelolaan kakao lestari	Data alokasi dana desa	DPMD	DPMD	10	%
		2.11	Asuransi pertanian kakao	2.11.1	Persentase petani kakao yang menerima program asuransi pertanian	Data asuransi pertanian untuk usaha tani kakao	Sekretariat	Active, Olam, TA Reads	100	%
				2.11.2	Fasilitasi asuransi pertanian	Data fasilitasi asuransi pertanian yang dilakukan terhadap petani kakao	Sekretariat	Active, Olam, TA Reads	1	Kegiatan/tahun

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
3	Meningkatkan produktivitas dan diversifikasi produk kakao	3.1	Budidaya kakao dengan penerapan GAP	3.1.1	Jumlah kebun sumber benih dan penangkar bibit kakao bersertifikat	Data kebun sumber benih bersertifikat mencakup lokasi, pemilik/pengelola, produksi, jenis benih, jenis kebun, luas, pemasaran, dll.	Distan	Distan	9	unit
				3.1.2	Persentase luas kebun kakao multiklon	Luas kebun kakao secara keseluruhan (ha), luas kebun kakao multiklon (ha), dan luas kebun kakao monoklon (ha).	Distan	Distan, Koperasi Simultan	70	%
				3.1.3	Persentase petani yang menggunakan benih/bibit kakao unggul (bersertifikat)	Daftar bibit yang digunakan petani kakao di Kabupaten Luwu Utara.	Distan	Distan	100	%
				3.1.4	Produksi kakao	Data produksi kakao Kabupaten Luwu Utara setiap tahun	Distan	Distan, BPS	34,173	ton
				3.1.5	Produktivitas kakao	Data produksi kakao Kabupaten Luwu Utara setiap tahun; Data luas panen kakao Kabupaten Luwu Utara setiap tahun	Distan	Distan, BPS	1	ton per ha

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
				3.1.6	Jumlah produsen pupuk organik	Data produsen pupuk organik yang sudah memiliki nomor pendaftaran. Data diperbaharui setiap tahun.	Distan	Distan, BPS	9	unit
				3.1.7	Persentase petani kakao yang menggunakan pupuk organik	Data penggunaan pupuk petani kakao yang diperbaharui setiap tahun.	Distan	Distan	100	%
				3.1.8	Persentase petani kakao yang menerapkan teknik konservasi lahan	Data penerapan teknik konservasi tanah pada kebun petani kakao yang diperbaharui setiap tahun.	Sekretariat	Olam, SFITAL, TA Reads, Lascar Kakao	100	%
				3.1.9	Persentase petani kakao yang menerapkan agroforestri kakao	Data jumlah petani kakao dan luasan kebun agroforestri kakao.	Sekretariat	Distan, SFITAL, Olam, Mars, Active, Lascar Kakao, Masagena, Koperasi Simultan Univ Andi Djemma, UNCP, Unhas, Asosiasi Kakao Doctor, Asosiasi Kakao Luwu Utara, TA Reads	60	%
				3.1.10	Persentase petani yang mendapatkan	Data kegiatan penyuluhan, pelatihan, pendampingan untuk	Sekretariat	Distan, SFITAL, Olam, Mars, Active, Lascar Kakao,	100	%

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
					pelatihan agroforestri kakao	petani kakao di Kabupaten Luwu Utara.		Masagena, Univ Andi Djemma, UNCP, Unhas, Masagena, Koperasi Simultan		
		3.2	Akses terhadap sarana dan prasarana pendukung usaha tani kakao	3.2.1	Jumlah kios pupuk bersubsidi untuk tanaman kakao	Data jumlah dan lokasi pengecer resmi pupuk bersubsidi serta kapasitasnya. Data diperbaharui setiap tahun.	DP2KUKM	DP2KUKM, Distan	9	unit
		3.3	Diversifikasi produk kakao	ç	Jumlah pelatihan dan peningkatan kapasitas petani dalam peningkatan mutu dan pasca panen	Data kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas petani untuk peningkatan mutu panen dan pasca panen yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, maupun lembaga lain. Data diperbaharui setiap tahun.	Sekretariat	Distan, Mars, Olam, Univ Andi Djemma, UNCP, Unhas, DPKP, DP2KUKM, Asosiasi Kakao Doctor, Masagena, Koperasi Simultan, Lascar Kakao, TA Readsi	20	kegiatan
				3.3.2	Jumlah petani yang dilatih untuk peningkatan mutu dan pasca panen	Pendataan petani yang mengikuti pelatihan dan peningkatan kapasitas dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan topik	Sekretariat	Distan, Mars, Olam, Univ Andi Djemma, UNCP, Unhas, DPKP, DP2KUKM, Asosiasi Kakao	100	%

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
						pelatihan yang diikuti. Data diperbaharui setiap tahun.		Doctor, Asosiasi Kakao Luwu Utara, Masagena, Koperasi Simultan, Lascar Kakao, TA Reads		
				3.3.3	Persentase rata-rata nilai tambah bisnis industri hilir skala kecil	Data produk turunan kakao yang dikelola oleh masyarakat (bukan perusahaan) di Kabupaten Luwu Utara, termasuk produsen, harga produk, harga bahan baku, harga input lainnya. Data diperbaharui setiap tahun.	DP2KUKM	DP2KUKM	25	%
				3.3.4	Persentase volume kakao fermentasi yang diproduksi oleh petani/kelompok tani/smallholder	Produksi biji kakao fermentasi dan biji basah di tingkat petani/kelompok tani	Distan	Distan, Mars, Olam, Koperasi Simultan, Koperasi Masagena	60	%
				3.3.5	Jumlah jenis produk kakao yang dihasilkan kelompok petani/masyarakat	Data produk turunan kakao yang dikelola oleh masyarakat beserta jenis produk yang dihasilkan. Data diperbaharui setiap tahun.	DP2KUKM	DP2KUKM		unit

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
		3.4	Agribisnis kakao	3.4.1	Jumlah unit usaha produk turunan kakao yang dikelola masyarakat	Dapat diperoleh dari Data Sensus Pertanian BPS. Maupun pendataan usaha produk turunan kakao di Kabupaten Luwu Utara.	DP2KUKM	DP2KUKM		unit
4	Memperbaiki rantai pasok yang berkelanjutan	4.1	Pengembangan rantai pasok yang efektif dan integratif	4.1.1	Persentase produksi biji dengan kelas mutu I dan II (SNI 2323:2008)	Data produksi biji kakao beserta kualitas mutunya berdasarkan SNI.	Sekretariat	Mars, Olam, perusahaan	70	%
				4.1.2	Jumlah koperasi petani kakao dan BUMDes dengan unit usaha kakao	Data koperasi di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan unit usaha BUMDes.	DP2KUKM	DP2KUKM, DPMD	9	unit
		4.2	Sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen	4.2.1	Persentase petani yang melakukan pengarsipan dokumen dan pencatatan usaha tani	Data petani kakao	Sekretariat	Mars, Olam, perusahaan	100	%
		4.3	Sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan	4.3.1	Persentase petani kakao yang memiliki informasi koordinat	Data koordinat petani kakao.	Distan	Mars, Olam, perusahaan	100	%
				4.3.2	Persentase petani mengikuti sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan	Data petani yang mengikuti program dan memperoleh sertifikasi berkelanjutan	Sekretariat	Olam, perusahaan, Masagena, Koperasi Simultan	100	%

No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
5	Insentif jasa ekosistem dari kakao berkelanjutan	5.1	Kompensasi Imbal Jasa Lingkungan Hidup (KIJLH) antar daerah berupa Transfer Anggaran berbasis Ekologi (TAKE) di tingkat kabupaten untuk peningkatan fungsi daerah aliran sungai (DAS), keanekaragaman hayati, dan stok karbon	5.1.1	Indeks Risiko Bencana		BPBD	BPBD	140	tanpa satuan
				5.1.2	IKLH (Tupla, udara dan air)		DLH	DLH	90	tanpa satuan
				5.1.3	Debit air sungai	Data pengukuran debit aliran air sungai.	DPUTRPKP2	DPUTRPKP2		m3 per detik
				5.1.4	Volume pembiayaan pemerintah untuk mendukung biaya TAKE dan biaya transfer KIJLH	Data volume pembiayaan untuk TAKE dan KIJLH	Bapperida	Bapperida	0.3	%/tahun
				5.1.5	Jumlah program terkait pengelolaan jasa lingkungan	Data program pengelolaan JLH	Bapperida	Bapperida	1	Kegiatan/ tahun
		5.2	Pembayaran jasa lingkungan hidup (PJLH) untuk peningkatan fungsi DAS,	5.2.1	Jumlah petani peserta PJLH	Data jumlah petani peserta PJLH	DLH	DLH	10	%

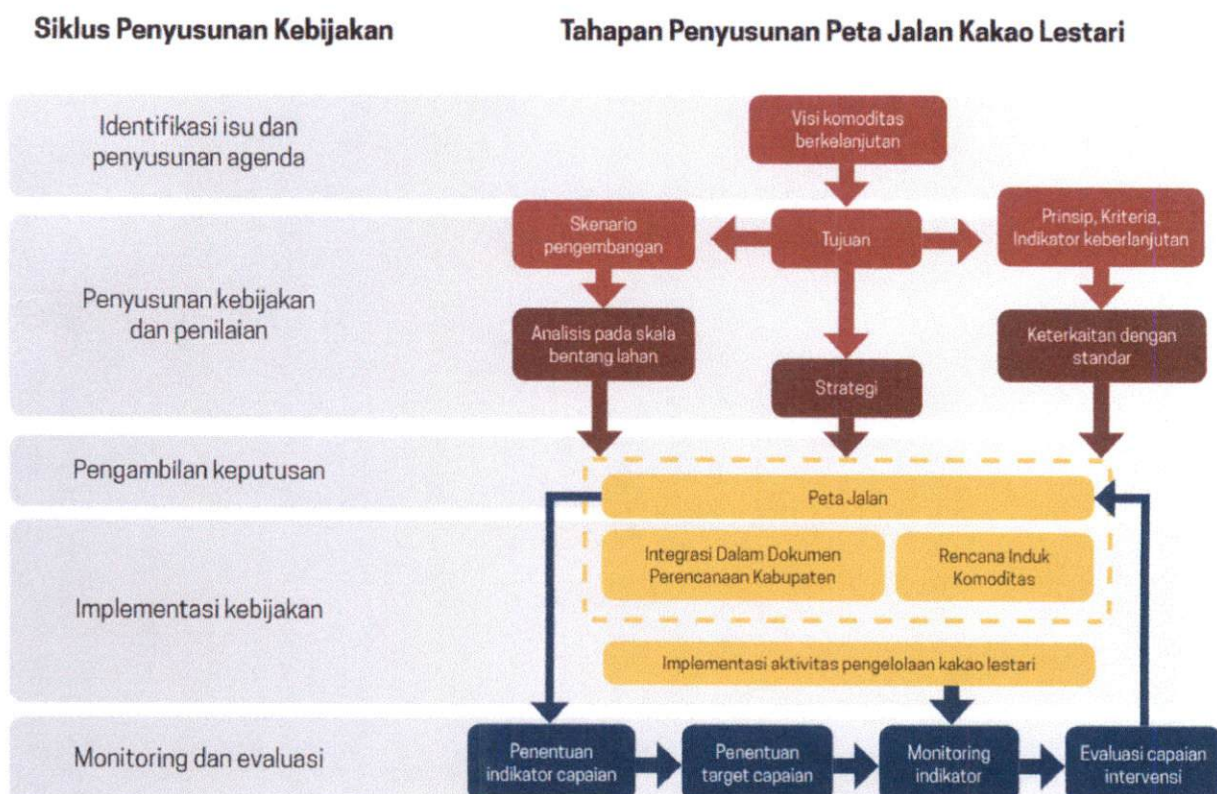
No	Strategi	No	Intervensi	No	Indikator	Dokumen pendukung	Instansi PJ	Walidata	Target	Satuan
			keanekaragaman hayati dan kontrak berbasis performa untuk peningkatan stok karbon							
		5.3	Label ramah lingkungan hidup	5.3.1	Jumlah produk kakao Luwu Utara yang memperoleh label ramah lingkungan hidup	Data produk kakao berlabel ramah lingkungan	DP2KUKM	DP2KUKM	100	%
		5.4	Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup	5.4.1	Volume dana penanggulangan, pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup	Data volume pembiayaan untuk penanggulangan, pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup	DLH	DLH	10	%
		5.5	Penghargaan kinerja di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	5.5.1	Jumlah perusahaan, kelompok masyarakat, maupun perorangan yang mendapat penghargaan kinerja di bidang perlindungan lingkungan	Data perusahaan, kelompok masyarakat, maupun perorangan yang mendapat penghargaan kinerja di bidang perlindungan lingkungan	DLH	DLH	1	Kelompok/tahun

#### 5.4 Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi memegang peranan penting dalam menilai implementasi kebijakan dan strategi peta jalan kakao lestari. Monitoring dan evaluasi juga dapat menghasilkan rekomendasi bagi pencapaian tujuan. Monitoring menggambarkan aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan atau program yang sedang dilaksanakan. Tujuan monitoring yaitu (1) menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran; (2) menemukan kesalahan pelaksanaan kebijakan sedini mungkin sehingga mengurangi risiko yang lebih besar; (3) melakukan tindakan modifikasi terhadap kebijakan atau program apabila hasil monitoring mengharuskan demikian.

Adapun proses evaluasi menggambarkan kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan ataupun program dan ketercapaian tujuan/target yang dicita-citakan bersama. Tujuan evaluasi meliputi (1) menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan; (2) mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan; (3) mengukur tingkat keluaran; (4) mengukur dampak suatu kebijakan/program; (5) sebagai instrumen untuk mengetahui apabila terdapat penyimpangan; dan (6) untuk menghasilkan rekomendasi bagi perencanaan dan perbaikan di masa depan.

Monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari menggunakan pendekatan yurisdiksi yang merupakan perpaduan antara pendekatan perencanaan wilayah (dimana pemerintah menentukan area lindungan dan budidaya (*go or no-go area*) dan pendekatan sertifikasi komoditas berkelanjutan. Pendekatan yurisdiksi memungkinkan penilaian tingkat keberlanjutan dilakukan terhadap indikator di tingkat lanskap sekaligus indikator yang spesifik terhadap komoditas kakao.



Gambar 5.1 Proses monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari penyusunan peta jalan kakao lestari

Adapun tahapan monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari yaitu:

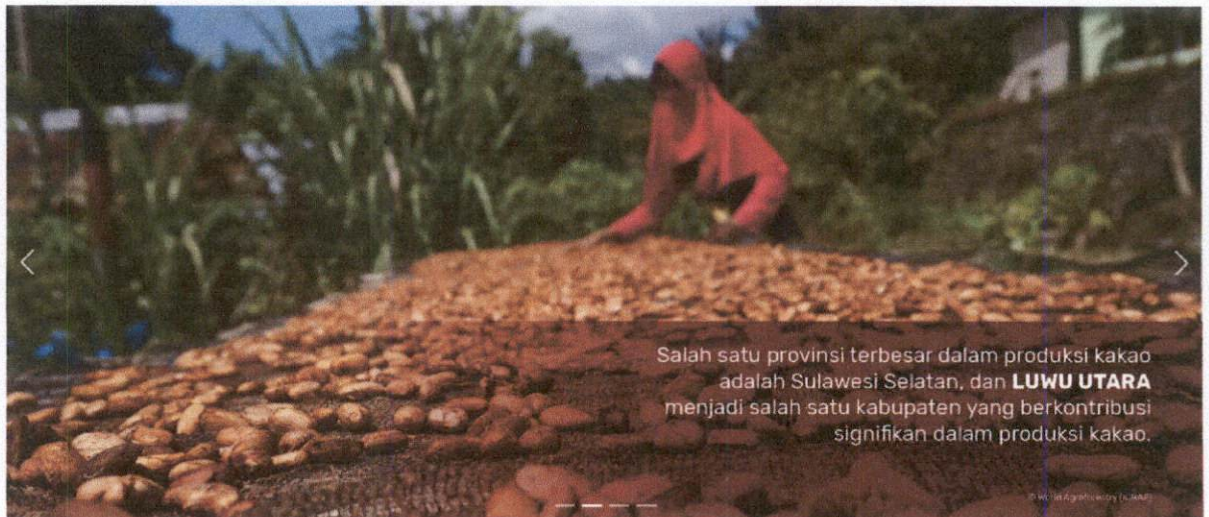
1. Penentuan indikator penilaian dan target capaian

Indikator penilaian ditentukan untuk setiap intervensi. Penetapan indikator disertai dengan perumusan target yang ingin dicapai. Proses penentuan indikator dan target capaian dilakukan secara inklusif melalui diskusi para pemangku kepentingan terkait. Terdapat 79 indikator yang digunakan untuk menilai tingkat ketercapaian intervensi Peta Jalan Kakao Lestari. Selain itu, dirumuskan 19 indikator kunci yang dinilai sebagai parameter keberhasilan pelaksanaan strategi (Tabel 5.7).

Tabel 5.7 Indikator kunci Peta Jalan Kakao Lestari

Strategi	Indikatif indikator kunci strategi	Satuan	Target indikator makro
1. Alokasi dan tata guna lahan berkelanjutan	Luas alokasi lahan untuk tanaman kakao	ha	13.694,48 ha
	Luas agroforestri kakao	ha	30.577 ha
	Persentase luas kakao umur produktif	%	80%
2. Meningkatkan akses masyarakat terutama petani kakao terhadap modal penghidupan	Rasio penyuluh dan jumlah petani	Tanpa satuan	0,004 (1 penyuluh menangani 250 petani)
	Indeks Nilai Tukar Petani	Tanpa satuan	105
	Persentase keluarga petani yang mendapat edukasi perlindungan anak	%	100%
	Keberadaan regulasi/produk hukum yang mendukung pengembangan kakao lestari	dokumen	1 perda tentang pelestarian dan perlindungan komoditas kakao
3. Meningkatkan produktivitas dan diversifikasi produk kakao	Persentase petani yang menggunakan benih/bibit kakao unggul (bersertifikat)	%	100%
	Produktivitas kakao	Ton/ha	1 ton/ha
	Persentase petani kakao yang menggunakan pupuk organik	%	100%
	Persentase petani kakao yang menerapkan agroforestri kakao	%	60%
	Persentase petani yang dilatih untuk peningkatan mutu dan pasca panen	%	100%
	Persentase volume kakao fermentasi yang diproduksi oleh petani/keompok tani/smallholder	%	60%
4. Memperbaiki rantai pasok yang berkelanjutan	Jumlah koperasi petani kakao dan BUMDes dengan unit usaha kakao	unit	9 unit (1 kecamatan 1 koperasi dan BUMDes dengan unit usaha kakao untuk kecamatan produsen kakao)
	Persentase petani yang melakukan pengarsipan dokumen dan pencatatan usaha tani (lengkap)	%	100%
	Persentase petani kakao yang memiliki informasi koordinat	%	100%
	Persentase petani mengikuti sertifikasi komoditas kakao berkelanjutan	%	60%
5. Insentif jasa ekosistem dari kakao berkelanjutan	IKLH (Tupla, udara dan air)	Tanpa satuan	90
	Volume dana penanggulangan, pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup	Juta rupiah	

## Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kakao Luwu Utara



Gambar 5.2 Antarmuka halaman monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari

Platform monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari memiliki beberapa menu antara lain:

- **Menu Beranda**  
Halaman muka dari suatu situs web di mana pengguna dapat melihat dan mengakses informasi mengenai gambaran pengelolaan kakao di Luwu Utara, penjabaran terkait monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari, dan Peta Intervensi Kakao Lestari.
- **Menu Peta Jalan**  
Menu ini memberikan gambaran umum tentang muatan Peta Jalan Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara yaitu Isu strategis pengelolaan kakao di Luwu Utara dan Visi, strategi, dan intervensi pengelolaan kakao lestari
- **Menu Indikator**  
Halaman yang menampilkan informasi mengenai tabel komparasi antara Indikator Peta Jalan Kakao Lestari dengan empat instrumen lainnya yang digunakan di tingkat nasional maupun global yaitu: Terpercaya, LandScale, SourceUp, dan KDSO yang dapat difilter berdasarkan strategi.
- **Menu Profil Yurisdiksi**  
Halaman yang menampilkan visualisasi tabel, grafik, dan peta mengenai capaian indikator setiap tahun. Capaian indikator peta jalan kakao lestari dapat dilihat secara keseluruhan maupun berdasarkan strategi dan intervensi yang telah direncanakan.
- **Menu Unduh**  
Halaman untuk pengguna mengunduh beberapa dokumen yaitu Peta Jalan Kakao Lestari, Metadata Indikator Monitoring Peta Jalan Kakao Lestari, dan Panduan Pengguna Peta Jalan Kakao Lestari.
- **Menu Admin**  
Halaman khusus untuk Admin mengubah beberapa bagian yang spesifik yang sudah ditentukan di awal dan masuk ke dalam database. Selain itu, pada halaman ini Admin dapat memverifikasi hal-hal yang telah diinput oleh Kontributor.

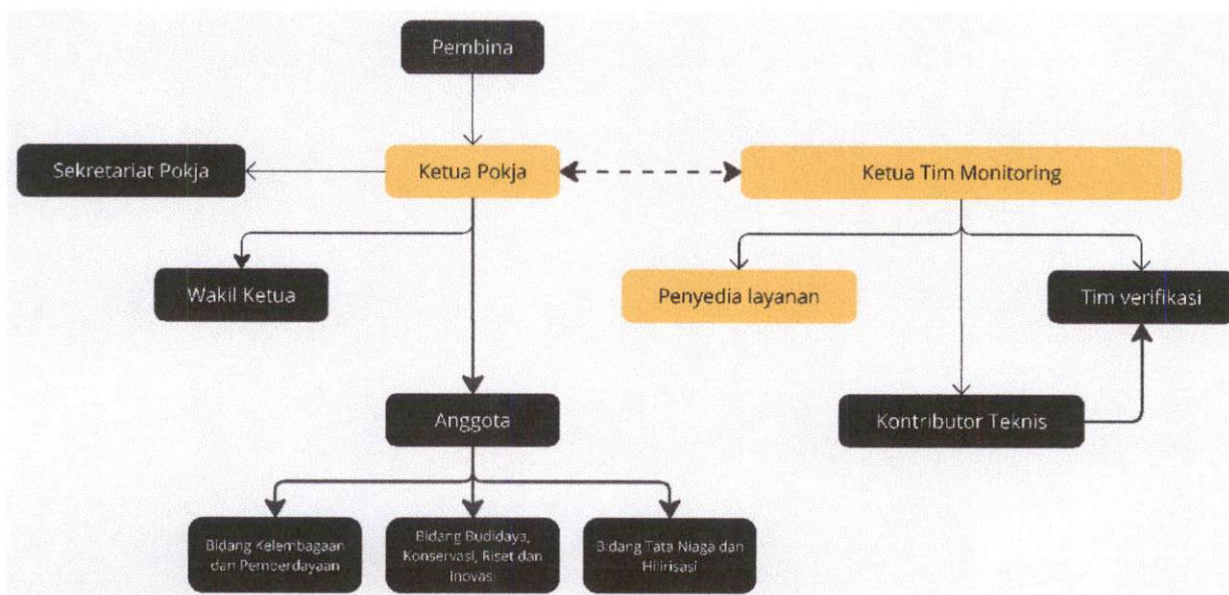
2. Pemetaan indikator peta jalan kakao lestari dengan berbagai standar keberlanjutan di tingkat nasional dan internasional  
Pemetaan indikator peta jalan kakao lestari dilakukan setidaknya terhadap 6 standar penilaian yaitu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Daerah, standar keberlanjutan Terpercaya, SourceUp, Landscale, dan KDSD (Kerangka Daya Saing Daerah). Pemetaan dilakukan untuk memudahkan daerah apabila ingin memenuhi standar keberlanjutan yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional.
3. Identifikasi pemangku kepentingan bertanggung jawab terhadap penilaian setiap indikator  
Untuk menjamin keberjalanan sistem monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari perlu disepakati pemangku kepentingan kunci yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan pengolahan data indikator. Selain itu, dapat ditentukan juga pemangku kepentingan terkait yang memiliki relevansi dengan kebutuhan data untuk penilaian indikator.
4. Merancang perangkat pemungkin monitoring dan evaluasi  
Penyusunan perangkat pemungkin untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi penting untuk memastikan kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan. Setidaknya terdapat empat komponen perangkat pemungkin yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari antara lain:
  - a. Dasar hukum: landasan hukum memegang peranan penting untuk memastikan para pemangku kepentingan yang sudah diidentifikasi dan disepakati untuk melakukan penilaian indikator dapat melaksanakan monitoring secara berkelanjutan.
  - b. Kerangka kelembagaan: diperlukan tatanan kelembagaan untuk mengkoordinasikan pemangku kepentingan dari berbagai sektor yang terlibat dalam proses monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari.
  - c. Standar Operasional Prosedur: menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi termasuk tahapan, tata waktu, pemangku kepentingan yang terlibat, serta output yang diharapkan. SOP yang dirancang untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari dapat dilihat pada Tabel 5.8.
  - d. *Platform* monitoring dan evaluasi: *platform* berbasis website disusun untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam melakukan proses monitoring serta dapat dimanfaatkan sebagai database pengelolaan kakao Kabupaten Luwu Utara. Selain itu, *platform* ini juga dapat menjadi sarana komunikasi komitmen Kabupaten Luwu Utara untuk mewujudkan pengelolaan kakao lestari kepada publik yang lebih luas. *Platform* monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari dapat diakses melalui: <https://kakaolestariwisata.luwuutarakab.go.id>.

- Menu Kontributor  
Halaman khusus untuk Kontributor menginput hal-hal yang menunjang kelengkapan data bagi untuk memonitor capaian indikator, pelaksanaan kegiatan, maupun realisasi anggaran.
5. Identifikasi kebutuhan data  
Kebutuhan data untuk penilaian indikator harus diidentifikasi dan disepakati oleh anggota tim monitoring dan evaluasi. Kebutuhan data tidak hanya dipenuhi oleh perangkat daerah namun dapat juga memanfaatkan data yang dikumpulkan perusahaan maupun lembaga lainnya.
  6. Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data  
Penyediaan, pengumpulan, dan pengolahan data dilakukan oleh pemangku kepentingan kunci untuk setiap indikator dan didukung oleh pemangku kepentingan terkait. Untuk memudahkan proses pengolahan data perlu disusun pedoman pengumpulan dan pengolahan data untuk setiap indikator peta jalan kakao lestari.
  7. Monitoring pelaksanaan aktivitas dan intervensi peta jalan kakao lestari melalui alat bantu monitoring dan evaluasi  
Monitoring aktivitas dan intervensi peta jalan kakao lestari dilakukan dengan melakukan input data yang berkaitan dengan penilaian indikator dan target capaian.
  8. Verifikasi data monitoring  
Verifikasi data monitoring yang telah dimasukkan oleh setiap pemangku kepentingan kunci ditujukan untuk memastikan kesesuaian dan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penilaian indikator.
  9. Evaluasi pencapaian target indikator dan perumusan rencana aksi  
Evaluasi pencapaian target indikator dilakukan setidaknya satu kali dalam 5 tahun sesuai dengan periode evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi dilakukan melalui rapat Pokja untuk menentukan kemajuan pelaksanaan peta jalan kakao lestari. Selain itu, rapat evaluasi juga bertujuan untuk merumuskan rencana aksi yang diperlukan untuk mencapai target yang ditetapkan.
  10. Pemanfaatan data  
Data monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari diharapkan dapat digunakan sebagai umpan balik dalam proses perencanaan pembangunan daerah terutama terkait pengembangan komoditas kakao. Selain itu, data monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari juga dapat diakses oleh publik melalui *platform* monitoring dan evaluasi berbasis *website* yang sudah dibangun (<https://kakaolestariwisata.luwuutarakab.go.id>). Dengan demikian, diharapkan data monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari dapat dimanfaatkan seluas-luasnya baik oleh pemerintah, mitra pembangunan, pelaku bisnis, maupun pihak lainnya yang berkepentingan.

#### **Kelembagaan monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari**

Kelembagaan monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari ditentukan untuk menjamin keberjalanan proses implementasi, monitoring dan evaluasi. Penentuan struktur kelembagaan dilakukan melalui diskusi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara. Struktur kelembagaan terdiri dari tiga unsur utama yaitu penyedia layanan sistem monitoring dan

evalausi (M&E), tim verifikasi data, dan tim teknis (Error! Reference source not found.). Pembagian p  
 eran setiap pemangku kepentingan dalam proses monitoring dan evaluasi serta peran setiap pihak  
 dijabarkan pada Tabel 5.8. Struktur kelembagaan monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari  
 selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.



Gambar 5.3 Struktur kelembagaan monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara







Tabel 5.8 Pembagian peran dalam proses monitoring dan evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari Kabupaten Luwu Utara

Peran	Institusi	Uraian tugas dan fungsi dalam monitoring dan evaluasi
Pembina	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bupati</li> <li>Wakil Bupati</li> <li>Sekretaris Daerah</li> <li>Asisten Perekonomian dan Pembangunan</li> </ul>	Memberikan arahan dan petunjuk terhadap mandat dalam proses monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari beserta urgensi dan manfaat yang diharapkan.
Ketua Pokja	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi peta jalan (capaian target indikator).</li> <li>Menetapkan pembagian peran dan tugas anggota pokja</li> <li>Melaporkan implementasi dan hasil monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari kepada Bupati</li> </ul>
Wakil Ketua Pokja	Kepala Dinas Pertanian	Mendukung Ketua Pokja dalam mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi peta jalan.
Sekretariat Pokja		
Ketua Sekretariat Pokja	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	Mengkoordinasikan berbagai prosedur administrasi dan kesekretariatan.
Sekretaris Sekretariat Pokja	Kepala Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur Bapperida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi kebutuhan administrasi</li> <li>Merencanakan tata waktu monitoring dan evaluasi</li> </ul>
Anggota Sekretariat Pokja	Kepala Sub Bidang Ekonomi SDA dan Infrastruktur Bapperida	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengkoordinasikan pengumpulan data monitoring</li> <li>Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan monitoring oleh anggota pokja</li> </ul>
	Kepala Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Dinas Pertanian	

Peran	Institusi	Uraian tugas dan fungsi dalam monitoring dan evaluasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan input data monitoring indikator yang disepakati dalam alat bantu peta jalan kakao lestari</li> </ul>
Ketua Tim Monitoring		
Penyedia Layanan	Dinas Komunikasi dan Informasi	Penyediaan platform monitoring dan evaluasi
Sekretariat Layanan	Dinas Komunikasi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pengelolaan akun</li> <li>Melakukan pengelolaan dan perbaikan alat bantu monitoring dan evaluasi</li> <li>Pusat pengaduan dan pelaporan</li> </ul>
Tim Verifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dinas Pertanian</li> <li>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah</li> <li>Dinas Komunikasi dan Informasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa kelengkapan dan ketepatan data monitoring yang di-input kontributor teknis</li> <li>Melakukan verifikasi data monitoring yang dimasukkan oleh kontributor melalui alat bantu monitoring dan evaluasi.</li> </ul>
Kontributor teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah</li> <li>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</li> <li>Dinas Pertanian</li> <li>Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM</li> <li>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana</li> <li>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</li> <li>Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Kawasan Permukiman</li> <li>Kesatuan Pengelolaan Hutan</li> <li>Sekretariat Pokja</li> <li>Asosiasi</li> <li>Koperasi</li> <li>Mitra Pembangunan</li> <li>Perusahaan</li> <li>Perguruan tinggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan penyediaan, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data monitoring</li> <li>Melakukan input data monitoring pada alat bantu monitoring sesuai indikator yang disepakati.</li> </ul>

Tabel 5.9 Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Peta Jalan Kakao Lestari

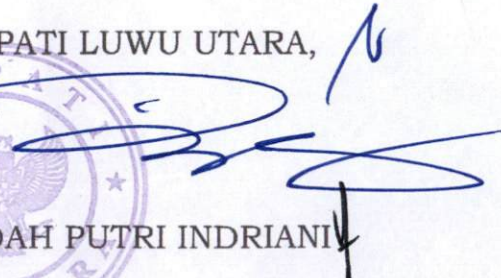
No.	Uraian kegiatan	Pelaksana							Baku mutu			
		Pembina	Ketua Pokja	Sekretariat Pokja	Kontributor teknis pemda	Kontributor teknis non pemda	Tim verifikasi	Penyedia layanan	Pengguna umum/ tamu	Kelengkapan	Waktu/ periode	Keluaran
1.	Memberikan arahan dan petunjuk terhadap mandat dalam proses M&E peta jalan kakao lestari beserta urgensi dan manfaat yang diharapkan									SK Pokja mencakup monitoring dan evaluasi kakao		Petunjuk dan mandat pelaksanaan M&E
2.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan M&E peta jalan kakao lestari											Rencana pelaksanaan M&E
3.	Menyediakan platform M&E dan akun yang siap digunakan											Platform M&E
4.	Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat pembahasan target tahunan										Bulan 1-2 (1x/tahun)	
5.	Menetapkan target tahunan untuk pelaksanaan kegiatan dan target anggaran									Daftar aktivitas dan anggaran instansi	Bulan 1-2 (1x/tahun)	Matriks target kegiatan dan anggaran
6.	Melakukan manajemen target capaian, kegiatan, dan anggaran dalam platform M&E									Matriks target kegiatan dan anggaran yang disepakati	Bulan 3 (1x/tahun)	Data target pada platform M&E
7.	Mengkoordinasikan pengumpulan data (yang bersumber dari										Bulan 5 (1x/tahun)	


No.	Uraian kegiatan	Pelaksana							Baku mutu			
		Pembina	Ketua Pokja	Sekretariat Pokja	Kontributor teknis pemda	Kontributor teknis non pemda	Tim verifikasi	Penyedia layanan	Pengguna umum/tamu	Kelengkapan	Waktu/ periode	Keluaran
	kontributor teknis non pemda)											
8.	Mengidentifikasi kebutuhan data monitoring									Meta data indikator M&E	Bulan 6-7 (1x/tahun)	Daftar kebutuhan data
9.	Melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung setiap indikator capaian, kegiatan, dan realisasi anggaran									Meta data indikator M&E	Bulan 6-7 (1x/tahun)	Dokumen pendukung
10.	Analisis perhitungan capaian indikator, pelaksanaan kegiatan, dan realisasi anggaran									Meta data indikator M&E	Bulan 6-7 (1x/tahun)	Daftar capaian indikator dan kegiatan
11.	Melakukan input data capaian indikator, kegiatan, dan realisasi anggaran									Platform M&E	Bulan 8 (1x/tahun)	Daftar capaian indikator dan kegiatan
12.	Melakukan verifikasi data input capaian, kegiatan, dan realisasi anggaran									Platform M&E	Bulan 9-11 (1x/tahun)	
13.	Merevisi data input capaian, kegiatan, dan anggaran									Platform M&E	Bulan 10 (1/tahun)	Daftar capaian indikator dan kegiatan

No.	Uraian kegiatan	Pelaksana							Baku mutu			
		Pembina	Ketua Pokja	Sekretariat Pokja	Kontributor teknis pemda	Kontributor teknis non pemda	Tim verifikasi	Penyedia layanan	Pengguna umum/tamu	Kelengkapan	Waktu/ periode	Keluaran
14.	Menampilkan data di platform M&E									Platform M&E	Bulan 11 (1x/tahun)	Daftar capaian indikator dan kegiatan
15.	Mengkoordinasi penyelenggaraan rapat evaluasi capaian										Bulan 1-2 (1x/5 tahun)	
16.	Melaksanakan evaluasi target dan capaian indikator, pelaksanaan kegiatan, dan realisasi anggaran									Daftar capaian indikator dan kegiatan	Bulan 1-2 (1x/5 tahun)	Laporan hasil evaluasi
17.	Melakukan perubahan target capaian indikator, kegiatan, dan anggaran											Laporan hasil evaluasi
18.	Menyusun laporan monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari										Bulan 2 (1x/ tahun)	Laporan M&E
19.	Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi peta jalan kakao lestari									Laporan M&E	Bulan 3 (1x/tahun)	
20.	Memanfaatkan data hasil capaian peta jalan kakao lestari dalam penyusunan laporan kinerja daerah									Laporan M&E Platform M&E		

No.	Uraian kegiatan	Pelaksana							Baku mutu			
		Pembina	Ketua Pokja	Sekretariat Pokja	Kontributor teknis pemda	Kontributor teknis non pemda	Tim verifikasi	Penyedia layanan	Pengguna umum/tamu	Kelengkapan	Waktu/periode	Keluaran
21.	Melakukan pemanfaatan data dan informasi yang disebarluaskan di dalam platform monitoring dan evaluasi									Platform M&		

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BUPATI LUWU UTARA,  
  
 INDAH PUTRI INDRIANI



## 6. Daftar Pustaka

- BPS. (2019). Statistik Perkebunan Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2019). Sulawesi Selatan dalam Angka 2019. Makassar: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2021). Luwu Utara dalam Angka 2021. Kabupaten Luwu Utara: Badan Pusat Statistik.
- Dewi S, Ekadinata A, Indiarto D, Nugraha A and van Noordwijk M. 2015. Negotiation support tools to enhance multifunctioning landscapes. In: Minang PA, van Noordwijk M, Freeman OE, Mbow C, de Leeuw J, and Catacutan D. (Eds.) *Climate-Smart Landscapes: Multifunctionality In Practice*. Nairobi, Kenya: World Agroforestry Centre (ICRAF). <http://goo.gl/ohIU74>
- ICRAF. LUMENS. <https://www.worldagroforestry.org/publication/land-use-planning-multiple-environmental-services-lumens>
- Fairuzia, N., Krisnamurthi, B., & Rifin, A. (2020). Analysis on sustainability status of cocoa plantation smallholders. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science*.
- Hutchins, A., Tamargo, A., & Kim, Y.-B. (2015). Assessment of Climate Change Impacts on Cocoa Production and Approaches to Adaptation and Mitigation: A Contextual View of Ghana and Costa Rica.
- Kelley, L. C. (2020). Explaining the Limitations of Agricultural Intensification Initiatives in Sulawesi, Indonesia. *Sec. Land, Livelihoods and Food Security*, 4.
- Kementan. (2019). *Hulu Hilir Kakao*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- Lahive, F., Hadley, P., & Daymond, A. J. (2019). The physiological responses of cacao to the environment and the implications for climate change resilience. A review. *Agronomy for Sustainable Development*.
- Leksono, A. S., Mustafa, I., Gama, Z. P., Afandhi, A., & Zairina, A. (2021). Organic cocoa farming in Indonesia: constraints and development strategies. *Organic Agriculture*, 445-455.
- Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. (2021). *RPJMD Kabupaten Luwu Utara*.
- Wijayanto, N. (2019, September 15). Analisis Status Keberlanjutan Perkebunan Kakao Rakyat di Kabupaten Luwu Utara. Retrieved from AGRIS FAO: <https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=ID2021110313>